

DR.H. Muhamad Rakhmat., SH., MH.



# LOGIKA HUKUM

Dialog Antara Analitik Sintetik Hingga Pembacaan  
Terhadap Dekonstruksi atas makna Teks & Realitas  
Hukum.

## **LOGIKA HUKUM**

Dialog Antara Analitik Sintetik  
Hingga Pembacaan Terhadap Dekonstruksi  
atas makna Teks & Realitas Hukum.

ISBN: 978-602-70607-1-5

Oleh

Dr. H.Muhamad Rakhmat, SH., MH.

Editor : E.Kosmayadi

Disain Cover Tim UP UNMA

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Cetakan pertama : 2015

Diterbitkan oleh Unit Penerbitan Universitas Majalengka

Jl. K.H. Abdul Halim No. 103. Majalengka

Telp/Fax 0233 281496

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Prawacana Ilmiah .....	
Daftar Isi .....	viii
<b>Bagian Pertama</b>	
Mengenalkan Logika .....	1
Menelusuri Sejarah Logika .....	1
Lingkaran Berpikir Dalam Logika .....	4
Logika: <i>Dari Mitos ke Logos</i> .....	14
Objek & Hukum Pikir .....	18
Pengertian Logika .....	21
Fungsi Logika .....	24
Jalan Pikiran Logika .....	26
<b>Bagian Dua</b>	
Logika Dalam Hukum .....	32
Logika Hukum: Logika Khusus .....	32
Logika Deduksi & Induksi Dalam Hukum .....	34
<b>Bagian Tiga</b>	
Penalaran Hukum: Wacana Aplikasi	
Logika Dalam Hukum .....	37
Apakah itu Penalaran Hukum .....	37
Langkah-Langkah dalam Penalaran Hukum .....	43
1. Langkah I (Menetapkan kasus) .....	44
2. Langkah II (Mengkualifikasikan) .....	48
3. Langkah III (Memilih Aturan Hukum) .....	50
4. Langkah IV (Interpretasi aturan Hukum) .....	51
5. Langkah V (Penetapan Hukum) .....	52
6. Langkah VI (Argumentasi Hukum) .....	53
7. Langkah VII (Pemecahan Masalah Hukum) .....	53

**Bagian Empat:****Logika Deduksi; Perdebatan antara**

<b>Teks &amp; Realitas Hukum</b>	<b>54</b>
Alam semesta & Reduksi	54
Terbentuknya Logika Deduksi	57
Problem Logika Deduksi	59
Logika Deduksi Mereduksi Realitas	
Hukum	61

**Bagian Lima:****Logika Induksi: Keselarasan Antara**

<b>Teks &amp; Realitas Hukum</b>	<b>67</b>
Wacana Pembuka	67
Menjawab Realitas Teks Hukum	73

**Bagian Enam:****Mengubah Penafsiran Hukum:**

Kajian Ke Arah Dekonstruksi	78
Mencoba Menuliskan Jacques	
Derrida	78
Dekonstruksi Derrida	80
Membaca Teks Hukum Bersama	
Jacques Derrida	81

**Bagian Tujuh:****Dekonstruksi Makna Kejahatan: Sebuah Kritik Terhadap Logika Deduksi Dalam Hukum**

	<b>83</b>
Menafsirkan Ulang Fenomena Kejahatan	
<i>Silmutation Of Crime</i>	83
Upaya Dekonstruksi Terhadap Makna	
Kejahatan	92
Dan Ternyata Undang-Undang Menyimpan Banyak Tabir *	
Kejahatan	94

**Bagian Delapan:****Logika Hukum: Sebuah Wilayah Untuk Terus di Tafsirkan**

	<b>103</b>
Tidak Sekedar Logika Induktif-	
Deduktif	103
Hukum Mendepankan Logika	
Tertutup	104

**Bagian Sembilan:****Dialektika Antara Logika Dengan Kecerdasan Pendidikan Hukum**

(langkah Awal Dalam Pemahaman Logika Selanjutnya)	<b>117</b>
Kecerdasan yang direncanakan	117
Dialektika Kecerdasan Hukum:	



Pencapaian Ke arah Spritual ..... 123

**Bagian Sepuluh:**

**Perlukah Mengganti Logika**

**Dedukti dalam Hukum?**

**(Uraian Akhir Untuk Mencapai**

**Tujuan Awal) ..... 130**

**Senarai Pusatak ..... 134**

**Riwayat Penulis .....**

## Bagian Satu: Mengenalkan Logika

*Seketika ciptaan Nya bergumam tentang artinya  
Rutinitas halusinasi terlempar dari siku rasio dan kehendak  
Kekakuan menjadi keluwesan, sungguh aneh  
Bagai bahasa tak terjemah dalam kebuntuan  
Seperti dua sisi yang berbeda  
Membentur harapan tanpa kemungkinan  
Tanpa akhir, lelah kata mencari kebahagiaan sejati  
Terpilih sebagai angin liukmat, sesaat tak tersesali  
Tersamar sepercak semangat dalam hidup singkat  
Hanya alasan kosong untuk menjawabnya  
Curam dan terjal menerpa halus janji Nya  
Karena tak ada yang tahu ketukan waktu Nya  
Menunggu jawab dan berpegang pada indahnya*

### Menelusuri Sejarah Logika.

Dalam kehidupan sehari-hari (pergaulan hidup), kita sering mengatakan "*pakai logika dong*", berpikir dengan logika, dan bahkan ada sebuah lagu yang dilantunkan oleh Agnes Monica, "*tak ada logika*". artinya, logika itu adalah "*menurut akal*". seperti yang dikatakan orang "*langkah yang diambil itu logis*". Namun, logika yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah logika sebagai sebuah metode atau teknis yang dapat diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran, artinya untuk memahami logika orang harus mempunyai pengertian yang jelas tentang logika, maka dengan demikian logika sebagai sebuah ilmu pengetahuan untuk menelaah sesat pikir lewat sebuah penalaran.

Istilah logika bukanlah istilah baru dalam lapangan ilmu pengetahuan, tetapi sudah lama dikenal, untuk pertama kalinya logika telah diperkenalkan oleh Zeno (334-262SM) dari Citium (Bertrand Russel. *History of Western Philosophy*.1974:76). Zeno ada yang mengatakan bahwa dia adalah sebagai pelopor kaum Stoa, kaum Stoa itulah yang mengembangkan bentuk-bentuk argumen *disyungtif* dan *hipotesis*. ungkapan kaum Stoa yang paling terkenal adalah "*Tanpa Chrysippus, Stoa tidak akan pernah ada*", maka dari itu, Chryisippus, mengembangkan logika menjadi bentuk-bentuk penalaran yang sistematis. Zeno (Diane Collinson. *Lima Puluh Filosof Dunia*. 2001:1) pernah mengatakan bahwa "*barang yang ada pada suatu tempat itu berhenti*" hal ini, tidak dapat dibantah, bahwa barang yang bergerak

setiap saat ada pada suatu tempat tertentu, sukar pula membantahkannya.

Pernyataan **Berthan Russel** di atas, mendapat sanggahan dari **K. Bertens** (1989:137-138), menurutnya walaupun **Zeno** sudah memperkenalkan logika, namun logika pertama kali telah diperkenalkan oleh **Cicero** pada abad ke-1 sebelum masehi. Namun sesungguhnya logika pertamakali sudah ada sejak **Thales** (642-548 SM), walaupun dia belum menggunakan istilah logika, ini terlihat dari cerita-cerita dongeng, yang sebetulnya sudah meletakkan dasar-dasar berpikir logis, pada saat **Thales** mengatakan bahwa *arche* (sumber kehidupan) itu adalah Air, maka sejak itulah ia sudah berpikir logis dengan logika Induktif, (**Diane Collinson Ibid:1**). penalaran yang dilakukan oleh **Thales** (**Jan Hendrik Rapar**. 1996: 13), dapat terlihat sebagai berikut:

Air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan  
 Air adalah jiwa hewan  
 Air adalah jiwa manusia  
 Air jugalah Uap, dan  
 Air jugalah Es

Jadi, Air adalah jiwa dari segala sesuatu, yang berarti Air adalah Alam semesta

Selain tokoh-tokoh di atas, ada juga yang mengatakan bahwa kaum sofis beserta **Plato** (427-347) yang pertama kali memperkenalkan logika, dengan metode bidan (*metode mayeutis*)-nya **Plato** dalam membantu lahirnya ilmu pengetahuan, sesungguhnya telah meletakkan cara-cara berpikir logis. Namun logika, baru benar-benar berkembang, baru menemukan istilahnya setelah **Aristoteles** (384-322) memperkenalkannya. Sehingga **Aristoteles** disebut sebagai bapak Logika Tradisional. dan **Aristoteles**-lah yang pertamakali mempergunakan istilah *silogisme* dalam penarikan kesimpulan. istilah logika yang pertamakali dipergunka oleh **Aristoteles** adalah *analitika*, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan *dialektika* yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya.

Buku **Aristoteles to Organon** (alat) berjumlah enam, yaitu:

1. *Categoriae* menguraikan pengertian-pengertian
2. *De interpretatione* tentang keputusan-keputusan
3. *Analytica Posteriora* tentang pembuktian.
4. *Analytica Priora* tentang Silogisme.
5. *Topica* tentang argumentasi dan metode berdebat.
6. *De sophisticis elenchis* tentang kesesatan dan kekeliruan berpikir.

Perkembangan logika sejak pada 370 SM-288 SM Theophrastus, murid **Aristoteles** yang menjadi pemimpin Lyceum, melanjutkan pengembangan logika. Istilah logika untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Zeno dari Citium 334 SM - 226 SM pelopor Kaum Stoa. Sistematisasi logika terjadi pada masa Galenus (130 M - 201 M) dan Sextus Empiricus 200 M, dua orang dokter medis yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. **Porphyry** (232 - 305) membuat suatu pengantar (*eisagoge*) pada *Categoriae*, salah satu buku **Aristoteles**. **Boethius** (480-524) menerjemahkan *Eisagoge* Porphyrius ke dalam bahasa Latin dan menambahkan komentar-komentarnya. **Johanes Damascenus** (674 - 749) menerbitkan *Fons Scientiae*. Pada abad 9 hingga abad 15, buku-buku Aristoteles seperti *De Interpretatione*, *Eisagoge* oleh Porphyry dan karya Boethius masih digunakan. **Thomas Aquinas** 1224-1274 dan kawan-kawannya berusaha mengadakan sistematisasi logika.

Lahirilah logika modern dengan tokoh-tokoh seperti: **Petrus Hispanus** (1210-1278) **Roger Bacon** 1214-1292 **Raymundus Lullus** (1232 -1315) yang menemukan metode logika baru yang dinamakan *Ars Magna*, yang merupakan semacam aljabar pengertian. **William Ockham** (1295-1349) Pengembangan dan penggunaan logika **Aristoteles** secara murni diteruskan oleh **Thomas Hobbes** (1588-1679) dengan karyanya *Leviathan* dan **John Locke** (1632-1704) dalam *An Essay Concerning Human Understanding* **Francis Bacon** (1561-1626) mengembangkan logika induktif yang diperkenalkan dalam bukunya *Novum Organum Scientiarum*. **J.S. Mills** (1806-1873) melanjutkan logika yang menekankan pada pemikiran induksi dalam bukunya *System of Logic*

Lalu logika diperkaya dengan hadirnya pelopor-pelopor logika simbolik seperti: **Gottfried Wilhelm Leibniz** (1646-1716) menyusun logika aljabar berdasarkan *Ars Magna* dari **Raymundus Lullus**. Logika ini bertujuan menyederhanakan pekerjaan akal budi dan lebih mempertajam kepastian. **George Boole** (1815-1864) **John Venn** (1834-1923) **Gottlob Frege** (1848-1925) Lalu **Charles Sanders Peirce** (1839-

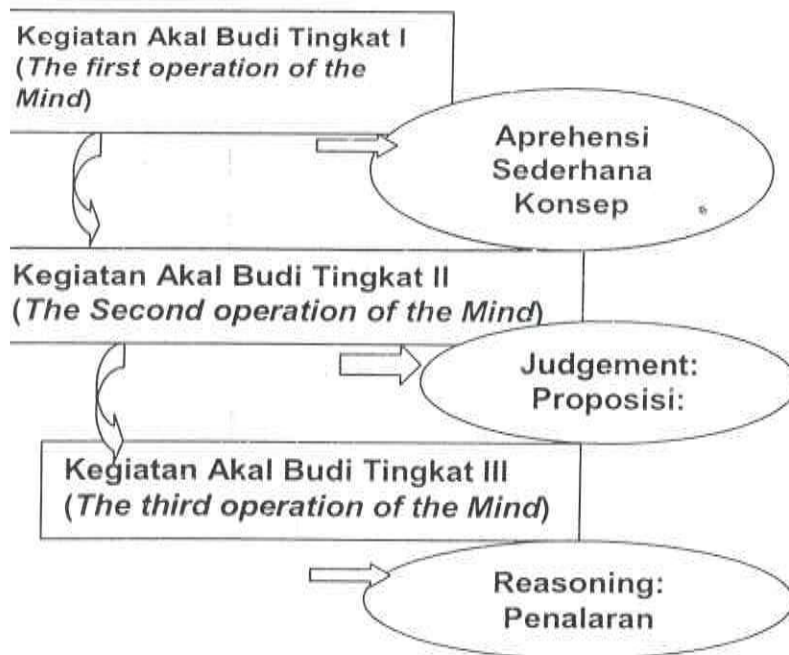


1914), seorang filsuf Amerika Serikat yang pernah mengajar di **John Hopkins University**, melengkapi logika simbolik dengan karya-karya tulisnya. Ia memperkenalkan dalil **Peirce** (*Peirce's Law*) yang menafsirkan logika selaku teori umum mengenai tanda (*general theory of signs*).

### Ingkaran Berpikir dalam Logika

Dalam kegiatan berpikir, terdapat tiga (3) kegiatan akal budi (*the mind*) manusia; menurut **Jacquers Maritian** (*Formal Logic*. 1937:1), tiga kegiatan itu adalah: *Coceptus*; proposisi; dan penalaran. Sebetulnya ketiga kegiatan ini harus di miliki dalam logika, atau dalam proses berpikir. Ketiga bentuk inilah, sebenarnya merupakan ciri yang harus ada dalam penalaran. Tidak akan ada proposisi tanpa pengertian, dan tidak akan ada penalaran tanpa proposisi. Maka dari itu penalaran akan selalu berlangsung dalam tiga tahap tersebut. Pentahapan itu sifatnya sistematis, dan tidak jigjag

Kemudian dari tiga kegiatan akal budi tersebut, dapat disebut sebagai kegiatan akal budi tingkat pertama I, kegiatan akal budi tingkat II, dan kegiatan akal budi tingkat III, selanjutnya dapat digambarkan sebagai berikut:

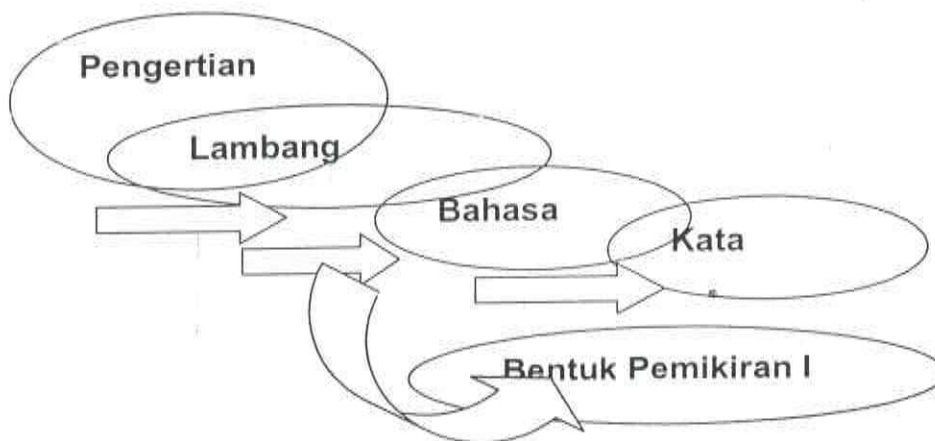




### Konsep (Concipere; Conceptus).

Dalam istilah yang cukup sederhana, penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Selain penalaran bentuk pemikiran yang lain adalah pengertian atau konsep (*conceptus; concept*); proposisi atau pernyataan (*propositio; statement*). Dalam logika, tidak ada proposisi tanpa pengertian, dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Maka untuk memahami penalaran, ketiga bentuk pemikiran tersebut harus dapat dipahami bersama-sama **R. G Soekadijo**. (*Logika Dasar; Tradisional; Simbolik; dan Induktif*. 1999: 3). sementara itu **Ahmad Tafsir**. dalam bukunya *Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai Capra*. (2001:33) menyatakan bahwa logika formal atau logika saja, membicarakan masalah-masalah pengertian, putusan, dan penuturan.

Pengertian atau konsep sebagai bentuk pemikiran pertama, adalah sesuatu yang sifatnya abstrak, kalau kita hendak menunjukkannya pengertian itu harus diganti dengan istilah 'lambang'. Lambang di sini adalah 'bahasa' (*language*). Di dalam bahasa, pengertian itu lambangnya berupa 'kata' kata sebagai fungsi pengertian disebut dengan 'term'. Perhatikan ragaan berikut ini.



Dari ragaan di atas, dapat kita lihat bahwa pengertian atau konsep adalah bentuk wujud dari sesuatu, yang terdapat dalam jiwa. Yang dimaksud bentuk wujud di sini adalah ciri hakikat sesuatu (**M. J. Langeveled**. *Menuju ke Arah Pemikiran Filsafat*. 1959:27) untuk itu perlu kita membedakannya kata "ujud" (wadah) dengan kata "wujud" (hakikat). Kata tangan, kaki, hidung, telinga misalnya sebagai pengertian yang tidak ada dalam ujud, melainkan terdapat dalam

wujud yang cirinya tertangkap dalam budi. Pengertian merupakan hal yang sifatnya *abstrak*, dan bukan konkrit. Jadi pengertian bentuknya objek ideal, atau berkat sukma.

Istilah konsep berasal dari bahasa latin (*concipere: kata kerja*) berarti mencakup, mengandung, menyedot, menangkap. Kata bendaanya *conceptus*, artinya tangkapan, jadi konsep adalah hasil tangkapan intelektual atau akal budi manusia, konsep sama dengan ide. Istilah '*idea*' berasal dari bahasa yunani, adalah perkataan (*eidos*) yang secara harfiah berarti orang lihat, yang menampakan diri, bentuk, gambar, rupa, dari sesuatu. Jadi *eidos* menunjukan pada yang ada atau yang muncul dalam intelek (akal-budi) manusia, dengan demikian idea atau konsep menunjukan pada *representasi* atau perwakilan dari objek yang ada di luar subjek (benda; peristiwa; hubungan; gagasan)

Pengertian atau konsep terdapat dalam sesuatu, apabila memiliki (M. J. Langeveled. Op cit: 47): *Ciri esensial*, yakni ciri pokok; ciri-ciri primer; ciri hakikat. Ciri ini adalah ciri yang menunjukan bahwa '*ia*' adalah '*ia*'. Ciri ini menunjukan kepada keadaannya. Intinya ciri ini adalah ciri yang tidak boleh tida ada pada pada sebuah objek, bila ciri esensila hilang, maka objek itu bukan objek itu lagi. kedua adalah konsep harus memiliki *Ciri eksidental*, adalah ciri sampingan, ciri *secondair*, dan ciri jadian. Ciri merupakan ciri pelengkap, sifatnya yang melekat pada esensi objek.

Menurut Sidi Gazalba (Sidi Gazalba. *Sistematika Filsafat*. 1973:145) bahwa yang merupakan ciri aksedensi adalah: Sifat (gagah; lemah; kuat; merah dan pahit); Jumlah (satu; dua banyak); Hubungan (hubungan waktu; hubungan milik; hubungan tempat; dan hubungan keluarga); Aksi (berjalan; menari); *Pasivitas*\* (segala sesuatu yanag dapat menjadikan subtansi mengalami perubahan keadaan, seperti juara, kalah, gagal, dengan melihat stuktur kalimat); Isi (besar; kecil); Waktu (pagi; sore; petang; siang); Situasi (keadaan yang melibatkan subtansi).

Misalkan pada benda yang disebut dengan "*meja*" ciri esensialnya adalah mempunyai alas yang cukup lebar sebagai tempat untuk meletakan sesuatu, serta mempunyai hakikat penyangga, sedangkan ciri *eksidentalnya* adalah bentuk alasnya atau ujud kakinya. Kedua macam ciri ini bisa saling tukar menukar nama, bergantung pada perubahan posisi benda. Umpamanya tangan bagi seorang intelektual adalah merupakan ciri eksidental, tetapi bagi petinju

tangan merupakan ciri esensial. Dari perumpamaan ini sebuah konsep adalah suatu pengertian tentang objek tertentu. Dapat dikatakan bahwa konsep itu adalah suatu perwakilan universal dari sejumlah objek yang memiliki unsur-unsur esensial yang mirip (dicirikan dengan kualitas primer dan sekunder). Jadi konsep atau pengertian adalah menunjukan pada sebuah objek, dengan demikian objek-objek yang ditunjukkan oleh konsep adalah anggota dari konsep itu.

Ciri esensial, dapat juga dikatakan sebagai ciri komprehensi atau yang lebih ilmiah dengan istilah konotasi (*intensi*) (Jan Hendrik Rapar. *Op cit:59*), adalah ciri yang menunjukan kepada kualitas, karakteristik, dan keseluruhan arti yang tercakup dalam satu term. dapat juga dikatakan bahwa komprehensi adalah muatan atau isi konsep suatu *term*. sebagai contoh term manusia komprehensinya adalah rasional, beradab, berbudaya dan sebagainya. selanjutnya, ciri eksidental dapat juga disebut sebagai ciri *ekstensi*, yang mengacu pada luasnya cakupan, kuantitas, bidang atau lingkungan konsep suatu term

Untuk dapat mengetahui ciri-ciri di atas, perlu dikuasai cara membentuk pengertian atau konsep. Menurut beberapa ahli logika cara membentuk pengertian ialah dengan mengenali ciri esensi objek dan membuang ciri aksedensinya. Karena kita harus membuang ciri aksedensi, maka ketahuilah ciri

Konsep atau pengertian dari sudut sumbernya dikelompokkan oleh Langveled (*op cit: 137*) menjadi dua macam:

1. **Konsep (pengertian) *a priori*:** adalah merupakan pengertian yang sudah ada pada budi sebelum pengalaman. Jenis pengalaman ini merupakan bawaan sejak lahir. Al Ghazali menamakannya sebagai ilmu "*auwali*" atau ilmu "*dharuri*". Kemampuan ini adalah sudah ada sejak lahir, sebagai kemampuan modal pokok. Kedudukan kemampuan ini adalah sebagai teori, konsep ini berlaku umum
2. **Konsep (pengertian) *a posteriori*:** pengertian yang baru ada pada akal budi setelah pengalaman. Jenis pengertian ini merupakan hasil pengamatan terhadap sesuatu. Al-Ghazali menamakannya sebagai ilmu "*Nadhari*" atau ilmu "*muktasab*". adalah pengetahuan tahu sesudah mengalami. Kedudukannya sebagai praktek, konsep ini berlaku khusus.



Kedua konsep diatas tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab teori dan praktek berpadu dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada intinya teori tanpa praktek tidaklah berisi, sedangkan praktek tanpa teori tidaklah berarti. Akan tetapi memang keduanya berbeda, untuk dapat membedakannya perhatikanlah uraian berikut ini:

*"Rasa hormat ada pada setiap manusia adalah sebagai pengertian a priori (teori), akan tetapi cara penghormatan yang perlu dipelajari adalah sebagai pengertian a posteriori. Sebagaimana kita ketahui bahwa rasa penghormatan itu beragam, baik dipandang dari segi umur, kedudukan, suku, maupun bangsa atau negara"*

Konsep apabila dikelompokkan ke dalam sudut bagiannya terdiri dari dua macam: *pertama* Isi pengertian, adalah kesatuan ciri yang menentukan pengertian sesuatu hal. *Kedua* lingkaran pengertian, adalah jumlah hal di mana isi berlaku sepenuh baginya.

Isi dan lingkaran pengertian merupakan suatu hal yang utuh, menyinggung isi pengertian, berarti secara implisit menyentuh pula lingkaran pengertian, begitu pula sebaliknya. Kerjasama antara keduanya mengikuti hukum "perlawanan". Jika isi pengertian meluas, maka lingkaran pengertiannya pun menyempit, demikian pula sebaliknya. Perhatikanlah bagan di bawah ini:

Isi pengertian	Lingkaran pengertian
Alas duduk; kaki	Kursi depot; kursi makan; kursi tamu; kursi kuliah
Alas duduk; kaki; sandaran; lengan;	Kursi kuliah

Selain kedua pengelompokan pengertian atau konsep di atas, Langveled pun mengelompokkan pengertian kedalam isinya (jumlah ciri). Menurut kelompok ini pengertian ada dua macam, pengertian berciri tunggal (ada, abadi, tuhan). Dan pengertian berciri ganda (alam, tumbuhan, manusia). Sementara dari segi lingkaran (jumlah benda), pengertian atau konsep terdiri dari empat macam: pengertian *universal* (semua), pengertian *partikular* (sebagian), pengertian *singular* (tunggal), dan pengertian *kommon* (wakil).

Pada kegiatan akal budi tingkat ini, secara langsung manusia melihat; mempersepsi; menangkap atau mengerti sesuatu objek tertentu. hal ini, terjadi baik melaluipancaindera maupun melalui kegiatan berpikir, dari kegiatan inilah terlahir ide atau gagasan untuk mewujudkan sesuatu agar menjadi sebuah konsep

Selanjutnya kegiatan akal budi manusia, setelah menemukan pengertian atau konsep. Selanjutnya mengumpulkannya menjadi defenisi, proses inilah yang dinamakan memindahkan ke dalam kalimat, atau menuliskan dan mengucapkannya. Rumusan *defensi* itu harus benar-benar mewakili (menggambarkan) pengertian objek yang ada di dalam jiwa kita. Proses dalam membuat defenisi ini adalah kemampuan dasar bagi setiap orang yang berminat mempelajari sebuah ilmu pengetahuan. Maka dengan demikian, kita tidak hanya meniru atau menggunakan pengertian konsep menurut pendapat para ahli, akan tetapi kita juga bisa membuat pengertian konsep dengan cara membuat defenisi. Dengan kata lain, defenisi atau batasan sebagai perpindahan dari konsep adalah merupakan ciri berpikir dan menulis logis.

**Hasbullah Bakry** (*Sistematika Filsafat: 1981:26*) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan defenisi adalah: *"Pengertian yang lengkap tentang sesuatu istilah, yang mencakupi semua unsur menjadi ciri utama istilah itu. Secara lebih operasional, defenisi adalah penyebutan seluruh esensi suatu objek dengan membuang seluruh ciri aksidensinya"*.

Secara umum defenisi dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. **Defenisi Nominal** (*literer; etimologi*): defenisi ini bukan arti defenisi yang sesungguhnya, ia sangat berlainan dalam arti kata yang dimaksudkan. Karena itu kita harus bisa menghindari defenisi nominal dalam karya-karya ilmiah. Defenisi ini bisa dicari dalam kamus. Contohnya: Ekonomi berasal dari kata Yunani, "*oikos*" dan "*Nomos*" yang artinya aturan rumah tangga. Sosiologi berasal dari kata Latin "*Socius*" artinya teman atau sahabat dan logos berarti ilmu.
2. **Defenisi real**: adalah defenisi yang memberikan penjelasan tentang konsep yang kita maksudkan dengan cara menyebutkan unsur-unsur pokok atau ciri-ciri utama dalam konsep tersebut

Dari kedua defenis di atas, defenisi real-lah yang memiliki cabangnya. Ia dapat berupa defenisi hakiki adalah defenisi yang dirumuskan untuk menyebut *genus proximum* (kelas terdekat) dan



pembedaan spesifik. Misalnya Gajah adalah mamalia (Merupakan *genus proximum*) yang berbelai atau memiliki gading (pembedaan spesifik). Ke dua defenisi ini dapat berupa defenisi gambaran, adalah defenisi yang dibuat untuk menyebutkan ciri-ciri konsep yang dimaksudkan; ketiga defenisi sebab akibat, adalah defenisi yang merumuskan dengan menggunakan hubungan sebab akibat untuk menjelaskan konsep atau pengertian. Misalnya "banjir adalah bencana alam yang terjadi karena melaupnya air sungai dan bobolnya tanggul sungai". Terakhir adalah defenisi tujuan, defenisi yang dibuat untuk menyebutkan tujuan, maksud atau manfaat dari sebuah pengertian.

Dalam membuat defenisi kita tidak sembarang, karena hal itu akan membingungkan konsep hendak kemana ia diarahkan, dan orang yang menerima defenisi itu akan kebingungan dalam menafsirkannya, sehingga yang terjadi adalah tersendatnya komunikasi atau '*bisu*' dalam artian defenis yang sembarang akan dimiliki hanya oleh sebagian orang tertentu saja, sehingga masyarakat tidak bisa mengerti. Untuk menghindari hal itu, setidaknya ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam membuat defenisi:

1. Ciri esensi yang disebut tidak boleh berlebihan dan atau tidak boleh kurang
2. Tidak memakai kata yang berulang-ulang
3. Tidak memakai perkataan yang terlalu umum
4. Tidak memakai kata negatif

**Hasbullah Bakry.** (*Sistematika filsafat*. Ibid: 24) yang menyebutkan bahwa aturan dalam membuat defenisi itu adalah;

1. Defenisi dapat dibolak-balik antara konsep dan rumusannya, jika setelah dibolak-balik tidak ditemukan konsep lain, maka defenis tersebut sudah tepat
2. Defenisi tidak boleh menggunakan bentuk negatif, dengan menggunakan kata "tidak" atau 'bukan'
3. Defenisi tidak menyebutkan konsep dalam rumusan, Contoh rumah sakit adalah tempat merawat orang sakit
4. Defenisi tidak menggunakan kata kiasan, atau kata-kata yang tidak mengandung artin ganda atau bias

### **Proposisi (pernyataan).**

Manusia dalam memberikan pengertian atau konsep itu tidak hanya satu, melainkan beragam konsep yang ditunjukan kepada objek yang dihadapinya. Kemudian dari berbagai pengertian itu,

terbentuklah rangkaian konsep dari A sampai Z, inilah yang disebut dengan *proposisi*, sebagai bentuk pemikiran tingkat ke-II dari manusia. Dalam setiap proposisi itu mengandung benar-salah, proposisi disebut dengan fakta, yaitu observasi yang dapat diverifikasi atau diuji kecocokannya secara empirik, dengan menggunakan indera (*an empirically verifiable observation*).

Proposisi yang dimaksud di sini adalah perkataan dari pernyataan. Dilihat dari sudut isi (*substansi*), pada hakikatnya proposisi adalah pendirian atau pendapat tentang sesuatu hal, yakni pendirian atau pendapat tentang hubungan antara dua hal. Terhadap proposisi dapat dikenakan penilaian benar atau salah, karena pendirian seseorang tentang hubungan antara dua hal itu dalam kenyataan dapat benar juga dapat salah. artinya, proposisi adalah suatu unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna. jika kita menganalisis suatu pemikiran, misalkan suatu buku, maka kita akan mendapatkan kesatuan pemikiran dalam buku itu, kemudian lebih khusus lagi dalam bab-bab nya. jadi apabila dalam pemikiran, tidak dapat dinilai benar atau salahnya tidak dapat disebut sebagai proposisi

Proposisi dapat dikatakan sebagai sebuah pernyataan tentang hubungan antara dua kelas (istilah lain untuk konsep) yang didalamnya berlangsung pengiyaan atau penyangkalan bahwa kelas yang satu termasuk ke dalam kelas yang lain untuk sebagian atau seluruhnya.

Dalam logika sebagai ilmu berpikir, dikenal dua macam proposisi, menurut sumbernya, (sebagaimana yang dikemukakan oleh Imanuel Kant) yakni *proposisi analitik* dan *proposisi sintetik*. proposisi analitik adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjeknya. sedangkan proposisi sintetik, adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya (Morton White. *The Age of Analysis*. 1960: 297). Sedangkan, proposisi menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi proposisi kategorik; proposisi hipotetik; proposisi disyungtif.

### Penalaran (*reasoning; redenering*)

Kegiatan berpikir I dan II di atas dapat berwujud proses dalam akal budi yang berupa gerakan dari satu pikiran ke pikiran yang lain. Pikiran di sini adalah suatu unsur dalam proses rokhani (proses

berpikir) yang memerlukan sebuah kalimat lengkap untuk dapat menyatakan secara penuh (utuh) dan bermakna. di lihat dari sudut bentuk penampilannya kalimat adalah rangkaian kata-kata yang tersusun dengan cara-cara tertentu, dan sebuah perkataan mengungkapkan (merupakan lambang dari) suatu gagasan atau rangkaian gagasan. Jadi, dipandang dari sudut bentuknya, proses berpikir itu rangkaian pernyataan yang terseusun (tertata) dengan cara-cara tertentu. Kegiatan akal budi inilah, yang menghubungkan satu pikiran dengan pikiran lain untuk menarik sebuah kesimpulan disebut dengan penalaran (*reasoning; redenering*), inilah bentuk pemikiran manusia ke III.

Menurut R. G Soekadijo (Logika Tradisional *op cit*: 6) dalam penalaran proposisi-proposisi atau pernyataan yang menjadi dasar penyimpulan disebut dengan *antesedens* atau premis, sedangkan kesimpulannya bersifat konklusi (*konsekuensi*). Di antara premis dan konklusi ada hubungan tertentu, hubungan itu disebut dengan *konsekuensi*. Jadi penalaran adalah kegiatan atau proses yang mempersatukan *anteseden* dan *konsekuensi*. Keseluruhan proposisi-proposisi *anteseden* dan *konsekuensi* itu dinamakan argumentasi atau argumen. Istilah penalaran menunjukan kepada akal budinya, sedangkan istilah argumen menunjukan kepada hasil atau kegiatan penalaran (Jacques Maritain. *Formal logic*. 1937: 6-7)

Penalaran pada dasarnya adalah sebuah proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran dapat menghasilkan sebuah pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir atau bahkan dengan perasaan. Dalam hal ini, budi atau perasaan memikirkan hal yang sudah ada\* untuk mendapatkan pengetahuan lain yang sebelumnya tidak ada. Maka dengan demikian, penalaran adalah sebuah aktivitas berpikir yang penting artinya untuk kepentingan perkembangan pengetahuan. Berpikir sendiri dalam hal ini berarti kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar (Anonim. *Filsafat Ilmu*. 1985:2).

Penalaran (*reasoning*; Inggris), (*raticinium*; Latin) dimaknai dengan pengertian: (Lorens bagus. *Kamus Filsafat*. 1996: 794)

1. Proses penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan
2. Penerapan logika dan atau pola pemikiran abstrak dalam memecahkan masalah atau tindakan perencanaan



3. Kemampuan untuk mengetahui beberapa hal tanpa bantuan langsung persepsi inderawi atau pengalaman langsung

Penalaran adalah sebuah proses berpikir dalam merumuskan pengetahuan. Secara teoritis, satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan untuk melakukan penalaran adalah manusia. Maka oleh karena itu, kegiatan penalaran ini hanya dapat dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan kegiatan perasaan yang juga berlaku bagi manusia (Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*. 1982:42).

Kegiatan penalaran ini tersusun atas dua tahap. Pertama pemahaman berada dalam tahap pemahaman sebuah proposisi atau sejumlah proposisi dan hubungan diantara proposisi-proposisi tersebut. Tahap kedua adalah tahap tindakan akal budi yang memunculkan sebuah proposisi yang disebut dengan kesimpulan. Tindakan akal budi yang memunculkan kesimpulan itu disebut dengan istilah "*inferensi*". Inferensi adalah sebuah tindakan akal budi yang memunculkan sebuah proposisi yang dinamakan kesimpulan dari atau berdasarkan proposisi (*proposisi-proposisi*) *anteseden* (premis atau premis-premis) sebagai sebuah kegiatan berpikir. Kegiatan penalaran itu merupakan suatu kegiatan berpikir secara logis, kegiatan berpikir ini harus dilakukan menurut pola tertentu atau dengan logika tertentu, dan kegiatan ini harus dilakukan dengan secara analitis. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir secara logis dan analitis, maka kegiatan yang kita lakukan itu harus diisi dengan materi pengetahuan yang berasal dari sumber kebenaran. Apabila materi untuk kegiatan penalaran bersumber pada *rasio* atau *fakta*, maka kemudian dikenal dengan istilah *rasionalisme*. Sedangkan apabila fakta-fakta itu bersumber dari pengalaman manusia, maka paham ini disebut dengan *emperisme*. Perlunya ada pembedaan antara cara-cara berpikir *logis*, *analitis* dengan *berpikir biasa*, sebab tidak semua kegiatan berpikir bersifat *logis* dan *analitis*, atau dapat kita katakan bahwa cara berpikir yang tidak termasuk kedalam penalaran, bersifat tidak logis dan analitis. Oleh karena itu, kita dapat membedakannya misalnya dengan "*perasaan*" dalam hal ini perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. Selain perasaan misalnya intuisi, kedua bentuk berpikir ini adalah *non analitis* yang tidak mendasarkan diri pada pola berpikir tertentu.

### **Logika: Dari Mitos ke Logos.**

Seseorang telah dapat dikatakan melakukan penalaran dengan benar, dan karena itu telah disebut memiliki karakter berpikir nalar, apabila seseorang itu memperlihatkan pemikirannya yang *logic* dan *analitis*. Logika secara sederhana diartikan sebagai metode atau teknik yang dapat diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Logika menunjuk pada cara berpikir; cara hidup; dan sikap hidup tertentu, yakni masuk akal.

Secara Etimologis, Logika berasal dari kata Yunani *logike* (kata sifat) dan kata bendanya adalah *λόγος* (*logos*) yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. atau yang lebih sederhana perkataan sebagai manifestasi pikiran manusia. Luce. (*Logic*. 1975:1), mengatakan bahwa Logos berarti wacana (*discourse*), maka dengan demikian pikiran dengan kata mempunyai hubungan erat, artinya bahwa bahasa mempunyai kaitan erat dengan pikiran.

Sebagai ilmu, logika disebut dengan *logike episteme* (Latin: *logica scientia*) atau ilmu logika (ilmu pengetahuan) yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu disini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal.

Istilah *logos* dalam hal ini, kadang-kadang dapat mengacu pada *mitos* itu sendiri, makna yang tersembunyi, sesuatu yang tidak diketahui. Akan tetapi, saya pikir yang terbaik adalah menafsirkan bahwa istilah itu mengacu pada upaya pertama untuk *mengungkap* makna ini dalam kata-kata. Karena "*logos*" berarti "kata", kita bisa menyatakan bahwa dalam pengertian ini istilah "*logis*" mengacu pada penggunaan kata-kata sedemikian sehingga kata-kata membawa beberapa *makna*. mengikuti *logos* ini, ada dua tipe logika: tipe pertama benar-benar mengabaikan segala makna yang *tersembunyi* (yakni mitologis), sedangkan tipe kedua hampir seluruhnya berfokus pada penyingkapan makna-makna semacam itu seterang-terangnya.

Istilah *logos* tersebut di atas yang saya maksud adalah untuk memperjelas, bahwa logika berasal dari mitos yunani kuno, di awal telah disebutkan bahwa sejak Thales logika sudah digunakan walaupun pada waktu itu istilah logika belum ada, namun cara



berpikir Thaleslah yang menunjukkan bahwa itu adalah cara berpikir dalam logika. saya sebutkan sejak Thales telah ada logika, karena filsuf pertama kali yang lari dari mitos (*mite; mitologi*), adalah Thales ia mencoba untuk merubah cerita-cerita para dewa yang menciptakan alam semesta ini, ia pun mencoba untuk mempertanyakan tentang terjadinya alam semesta yang disebut sebagai *Thelogia: Cosmogoni*. Dari hal itulah filsafat lari dari mitos menuju logos, dari takhayaul ke pikir, dan tentunya Thales-lah yang pertama kali menggunakan pikirnya untuk merubah mitos-mitos menjadi logos.

*Logos* arti dasarnya perkataan atau sabda. Masyarakat Timur Tengah (Arab) memperkenalkan logika dengan kata "*Mantiq*" yang diambil dari kata kerja "*Nataqa*". Menurut Lois Ma'luf (*Kamus Munjid*. 1973:816) kata *mantiq* diartikan sebagai hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan dalam berpikir. Kata ini lajim diartikan sebagai "*berkata atau berucap*" dari perkataan inilah logika merupakan berpikir dengan benar, logika juga sering diartikan sebagai masuk akal atau menurut ketentuan akal.

Istilah "*Mantiq*" menurut **George F. Kneller** (*Logic & Language of education*. 1966: 13), disebut sebagai penyeledidikan tentang dsar-dsar dan metode-metode berpikir benar. istilah ini, dapat kita bandingkan dengan pengertian *mantiq* yang diungkapkan oleh **Louis Ma'luf** (*Munjid*. 1973:816), bahwa *mantiq* adalah hukum yang memelihara hati nurani dalam kesalhan berpikir. secara sederhana *mantiq* berarti ilmu untuk menggerakan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh suatu kebenaran, adalah hati inti daripada *mantiq*, dengan hati kebenaran akan didapatkan

Dari *logos* tersebut, maka logika mempunyai dua makna, *pertama* sebagai logika sebagai ilmu pengetahuan, yang merupakan sebuah ilmu pengetahuan dimana obyek materialnya adalah berpikir (khususnya penalaran atau proses penalaran) dan obyek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. *Kedua*: logika dapat dikatakan sebagai sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis disini berarti logika dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. pengertian logika yang kedua ini didukung oleh bahwa logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Dalam usaha untuk memasarkan pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya, filsuf-filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan

penalarannya. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika.

Selain kedua hal tersebut di atas, Logika masuk kedalam kategori matematika murni karena matematika adalah logika yang tersistematisasi. Matematika adalah pendekatan logika kepada metode ilmu ukur yang menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik (logika simbolik). Logika tersistematisasi dikenalkan oleh dua orang dokter medis, **Galenus** (130-201 M) dan **Sextus Empiricus** (sekitar 200 M) yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri.

Sehingga dapat dikatakan inilah Puncak logika simbolik terjadi pada tahun 1910-1913 dengan terbitnya *Principia Mathematica* tiga jilid yang merupakan karya bersama **Alfred North Whitehead** (1861-1914) dan **Bertrand Arthur William Russel** (1872 - 1970). dengan demikian, Lalu logika diperkaya dengan hadirnya pelopor-pelopor logika simbolik seperti: **Gottfried Wilhelm Leibniz** (1646-1716) menyusun logika aljabar berdasarkan *Ars Magna* dari **Raymundus Lullus**. Logika ini bertujuan menyederhanakan pekerjaan akal budi dan lebih mempertajam kepastian. **George Boole** (1815-1864) **John Venn** (1834-1923) **Gottlob Frege** (1848-1925) Lalu **Chares Sanders Peirce** (1839-1914), seorang filsuf Amerika Serikat yang pernah mengajar di **John Hopkins University**, melengkapi logika simbolik dengan karya-karya tulisnya. Ia memperkenalkan dalil **Peirce** (*Peirce's Law*) yang menafsirkan logika selaku teori umum mengenai tanda (*general theory of signs*)

Logika simbolik sebagaimana yang dimaksudkan Peirce harus kita bedakan dengan istilah tanda, perbedaan antara "simbol" dan "tanda" (*sign*). *Tanda* adalah obyek yang bisa diketahui yang dengan melampaui diri hanya menunjuk kepada suatu obyek yang bisa diketahui lainnya, sedangkan *simbol* adalah obyek yang bisa diketahui yang dengan melampaui diri menunjuk kepada suatu realitas tersembunyi, walau, pada saat yang sama, *ikut serta* dalam misteri yang diarah olehnya tersebut. Tanda penunjuk jalan mengarahkan kita ke tempat yang kita tuju, namun ketika kita mencapai tujuan kita, kita melihat bahwa itu tidak berkaitan dengan tanda penunjuk jalan yang kita ikuti. Seperti "tangga" (Wittgenstein: 1961). kita dapat

mencampakkan tanda segera sesudah tugasnya terselesaikan. Sebaliknya, kemampuan kita untuk mengalami realitas yang dibicarakan berkaitan erat dengan simbol. Tanpa simbol, kita tak mampu mengalami hal yang disimbolkan. Secara demikian, misalnya Tillich mengemukakan, "bahasa simbolik sendirian mampu mengungkap yang-terdalam. ... Bahasa iman adalah bahasa simbol". Perbedaan antara tanda dan simbol, pada kenyataannya, sejajar dengan perbedaan antara logika analitik dan sintetik.

Berikut adalah tampilan dari logika analitik dan sintetik

	<b>Analitik</b>	<b>Sintetik</b>
Metode Argumentasi	<i>deduksi</i>	<i>induksi</i>
Tipe proposisi	Merah adalah warna. " warna merah	Kapur tulis ini putih." benda putih kapur tulis putih kapur-tulis
Hukum Logika	Hukum Dasar Identitas: $A=A$ Non-kontradiksi: $A \neq \neg A$	Hukum Dasar Non-identitas: $A \neq A$ Kontradiksi: $A = \neg A$

Dari uraian di atas, pada dasarnya ada dua tipe logika yang berlainan: *Pertama* logika analitik muncul dari hukum identitas dan hukum non-kontradiksi; *Kedua* logika sintetik\* muncul dari hukum-hukum kebalikannya, yaitu hukum non-identitas dan hukum kontradiksi.

Logika analitik tepat untuk menerangkan segala sesuatu yang *nir-mustahil* untuk kita *ketahui*, sedangkan logika sintetik tepat untuk menerangkan segala sesuatu yang *mustahil* untuk kita *ketahui*. Proposisi analitik adalah ungkapan logika analitik lantaran menyamakan dua konsep yang dalam pengertian tertentu keidentikannya telah diketahui; proposisi sintetik adalah ungkapan logika sintetik lantaran menyamakan dua hal yang pada dasarnya tidak identik-yakni konsep dan intuisi. Akhirnya, wujud logika analitik yang paling tepat adalah argumen deduktif, yang simpulannya mengikuti premis-premis



sebagai persoalan kepastian *matematis* (yakni *non-kontradiktif*); wujud logika sintetik yang paling tepat adalah *argumen induktif*, yang simpulannya selalu bergantung pada beberapa proposisi *dugaan* (yaitu pada penegasan paradoksis tentang hal-hal yang tidak kita ketahui).

## Objek & Hukum Pikir

Logika sebagai cabang filsafat yang mempelajari kegiatan berpikir manusia, jadi objek studinya adalah kegiatan berpikir, tetapi bukan menunjuk kepada proses pikirnya. inilah yang menjadi *objek material dari logika*. adalah segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia, yang meliputi dunia alam semesta dan dunia manusia sendiri, sedangkan bentuk atau pola-pola dari kegiatan berpikir manusia, disebut sebagai *objek formal logika*. yakni objek material dipandang dari sudut tertentu, sudut tertentu ini dalam objek formal dapat disimpulkan sebagai kerja-kerja pikiran manusia yang harus ditaati agar kita dapat berpikir benar, dan mencapai kebenaran (Burhanudin Salam. *Logika Material*. 1997:2).

Pengertian "sudut pandang tertentu" juga meliputi:

1. Mempelajari asas-asas, kaidah-kaidah, norma-norma hukum berpikir yang harus di taati agar kita dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran
2. Mempelajari proses-proses yang memungkinkan ditimbangnya pengetahuan yang benar dan cara atau teknik sarana yang membantu dalam mendapatkan pengetahuan yang benar itu.

Objek material logika adalah kegiatan berpikir, yang dipelajari juga oleh epistemologi, Psikologi, dan Antropologi. dan objek formal, mempelajari bentuk-bentuk atau pola pemikiran dan struktur kombinasi pernyataan-pernyataan itu menunjukkan adanya aturan-aturan tertentu (*straight thinking or correct argument*). yakni kegiatan yang berlangsung dengan aturan-aturan tertentu dalam logika.

Dari objek formal dan material dari logika, maka logika membagi dirinya menjadi dua bagian, yakni logika formal dan logika materil. Pada logika formal atau formil, manusia diarahkan pada pekerjaan hukum-hukum pikir, atau pekerjaan akal budi manusia yang terdiri dari pengertian; putusan; dan pemikiran (M. Sommers, 1992: 9). Sedangkan pada logika materil, walau pekerjaannya hanya

**Irian Tiga**

**Penalaran Hukum:**

**Wacana Aplikasi Logika Dalam Hukum**

Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) merupakan salah satu unsur yang harus dipahami oleh seorang peneliti hukum. Karma tanpa pemahaman terhadap penalaran hukum, maka seseorang peneliti akan kehilangan arah dan bukan menemui kesulitan besar dalam mensistematisasikan bahan hukum yang menjadi topik, serta dapat mempengaruhi kualitas ilmiah kesimpulan penelitiannya.

**Apakah itu Penalaran Hukum?**

Pada saat *menginterpretasikan* aturan hukum; ketika itulah anda sedang masuk wilayah "*legal Reasoning*" (penalaran hukum). Dan atas aktivitas atas "*legal reasoning*" ini orang dapat juga mengidentifikasikannya sebagai "*legal argumentation*" (argumentasi yuridis). Karena dengan melakukan "*legal reasoning*", orang diandaikan sebagai tengah terlibat di dalam usaha membangun argumen-argumen hukum. Dan bagaimanapun pada "*legal reasoning*" ini di dalamnya terlingkup tipe-tipe penalaran yang dilihatnya sebagai proses intelektual untuk pada dasarnya sampai kepada *inferensiatif*. (Herman bakir, *Kastil Teori Hukum*, 2005: 65)

Apa yang diungkapkan oleh Herman Bakir di atas, *legal reasoning* hanya terbatas pada apa yang dilakukan oleh Hakim, khususnya ketika para hakim dalam menyelesaikan kasus diuntut untuk menyelesaikan gejala-gejala problematik di bidang hukum. Kemudian ia menandakan, bahwa *Legal Reasoning* semata-mata ditunjukkan untuk memelihara rasionalitas dan konsistensi (*taat asas*) atau doktrin pada praktek hukum, dan untuk melaksanakan berbagai aktivitas yuridik; misalnya pembentukan Undang-undang; penerapan hukum; penyelenggaraan peradilan; perancangan hukum; negosiasi serta logika hukum.

lain halnya dengan Johnny Ibrahim (Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 2006:239) yang mengatakan bahwa:

Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) merupakan salah satu unsur yang harus dipahami oleh seorang peneliti hukum



karena tanpa pemahaman terhadap penalaran hukum, maka seseorang peneliti akan kehilangan arah dan bukan menemui kesulitan besar dalam mensistematisasikan bahan hukum yang menjadi topik, Berta dapat mempengaruhi kualitas ilmiah kesimpulan penelitiannya.

**Johnny Ibrahim**, tidak hanya membatasi penalaran hukum ini hanya kepada kegiatan oleh hakim, akan tetapi para peneliti hukum pun harus dapat mengetahui penalaran hukum. Baginya, studi penalaran hukum mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pertumbuhan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*), yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan. kebenaran (*justification*) terhadap keputusan hukum yang dibuatnya.

Jadi pada intinya, seorang hakim harus mempunyai alasan-alasan ilmiah dari keputusan yang tengah diputuskannya, tugas inilah yang menjadi bagian dari ilmu hukum. Maka dari itu ilmu hukum dan hukum berada dalam lingkaran penalaran hukum.

Penalaran Hukum apa yang dikatakan. oleh **Herman Bakir** dan **Johnny Ibrahim** di atas, merupakan saduran dari kerangka berpikir B. **Arief Sidharta**. (B. Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Ilmu* . (2000:163-164) dengan sebutan penalaran hukum sebagai "*Proses berpikir problematika tersistematis*". Penalaran hukum kegiatan berfikir problematis, ini ditunjukkan kepada wilayah-wilayah penalaran hukum praktis. Penalaran ini, berada dalam berada dalam konsep argumentasi yuridik, atau yang sering dilakukan oleh hakim. (H. Ph. Vissert Hooft. Terjemahan B. Arief Sidharta 2002:23-24)

Untuk sampai kepada cara berpikir ini. Penalaran hukum menurut B. **Arief Sidharta** sendiri dijelaskan bahwa sejak zaman Yunani sudah dibedakan dua kutub cara berpikir:

1. Cara berpikir aksiomatik (*berpikir sistematis*): Berpikir ini menunjukkan pada proses berpikir yang bertolak pada kebenaran-kebenaran yang tidak diragukan, melalui mata rantai yang bebas- ragu, sampai pada kesimpulan yang mengikat (*konklusif*). Proses berpikir ini, mengacu pada model pengetahuan yang pasti, yang digambarkan dengan sebuah sistem yang puncaknya berupa seperangkat aksioma eviden, dan selanjutnya melalui mata rantai perantara yang bebas ragu di jabarkan ke dalam keseluruhan putusan.

2. Cara berpikir tipikal (*berpikir problematik*): adalah cara berpikir yang betolak belakang dengan cara berpikir aksiomatik, cara berpikir ini tertuang dalam suasana yang didalamnya tidak ditemukan kebenaran yang bebas ragu, yang didalam pertentangan pendapat masalahnya berbeser dari hal menentukan apa yang konklusif menjadi hal menentukan apa yang dapat diterima, yang paling akseptabel, yang paling plausibel.

Dari dua kerangka berpikir di ataslah, ilmu hukum memadukannya sehingga tercipta kerangka berpikir *problematis* tersistematika. Alasan ilmu hukum berpikir seperti ini karena:

1. Pengembangan ilmu hukum<sup>1</sup> terarah untuk memberikan penyelesaian terhadap masalah hukum konkret, aktual maupun potensial. Maka mustahil kerangka berpikir ilmu hukum adalah menggunakan cara berpikir *problematic*
2. Akan tetapi yang dicari dalam hukum, adalah penyelesaian dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku, yang dalam dirinya hingga derajat tertentu sudah terstruktur secara sistematis yang menjamin stabilitas sehingga dapat mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat
3. Dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, maka cara berpikir keduanya dapat dipandukan, sehingga terciptalah kerangka berpikir *problematis* tersistematika.

Namun dengan demikian, pada spek *epistemologi*, penalaran hukum *direpresentasikan* dengan mengikuti rangkaian proses bekerja (berpikir), seorang hakim (*judicial reasoning*). Dengan demikian penalaran hukum telah dipersempit pengertiannya menjadi penalaran hakim tat kala yang bersangkutan menghadapi kasus konkret. Akan

---

<sup>1</sup> Pengembangan hukum dikatakan oleh D.H.M. Meuwissen adalah sebagai kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum dalam masyarakat, yang meliputi kegiatan *membentuk hukum; melaksanakan hukum; menerapkan hukum; menemukan hukum; menafsirkan hukum; mempelajari dan mengajarkan hukum*. Pengembangan hukum ini dapat dibedakan menjadi: Pengembangan hukum praktis (pembentukan hukum; penemuan hukum; Bantuan hukum). Yang *kedua* adalah Pengembangan Hukum Teoritis (Ilmu-Ilmu Hukum; yang terdiri dari ilmu hukum praktis; sejarah hukum; perbandingan hukum Sosiologi hukum; psikologi hukum; dan Teori Hukum, yang disebut juga sebagai Filsafat Hukum). Lihat dalam D. H. M. Meuwissen. *Pengembangan Hukum*. (Terjemahan B. Arief Sidharta). Dalam PRO JUSTITIA Tahun XII Nomor 1 Januari, 1994. hlm: 61-80.



tetapi jika dikaitkan dengan aspek *ontologis* hal ini jelas merupakan penyempitan makna (*reduksionisme*) dari penalaran hukum.

Dari pengertian penalaran hukum di atas, dapat dikatakan bahwa penalaran hukum menjadi batu uji kritis dari segi ilmu hukum untuk mengkaji semua kegiatan yuridis dan produk yang dihasilkan dari para pengemban hukum. Sebab meskipun intuisi seseorang pengemban hukum telah dibangun secara bertahap melalui pendidikan hukum dan serangkaian pengalaman, boleh dikatakan bahwa intuisi yang dimilikinya adalah intuisi seorang profesional di bidang hukum. Maka dari itulah, pengemban hukum harus selalu aktif dalam melakukan penalaran hukum. Karena dengan penalaran hukum, akan lebih mendekatkan terhadap keadilan bagi pencari keadilan.

Penalaran hukum, disebut-sebut oleh Jan Gijssels & Mark van Hoecke (Jann Gijssels & Mark van Hoecke. *Apakah Teori Hukum Itu?*. Terjemahan B. Arief Sidharta. 2000:106). sebagai *argumentasi yuridikal*. Dalam hal ini, penalaran hukum mencakupi tipe penalaran sebagai proses intelektual untuk mencapai kesimpulan dalam memutus perkara (kasus) yang digunakan oleh hakim, yang tujuannya adalah untuk memelihara dan meyutifikasi rasionalitas dan konsistensi doktrinal dan untuk melaksanakan aktivitas yuridis lainnya seperti pembentukan hukum, penerapan hukum, penyelenggaraan peradilan, perancangan hukum, negosiasi transaksi hukum. Jika kita mempelajari *argumentasi yuridikal* ini, maka hal ini ihwalnya dalam kenyataan secara umum selalu berkenaan dengan penelitian tentang argumentasi kehakiman.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penalaran hukum itu merupakan:

1. Penalaran Hukum sebagai wilayah yang berada dalam baling berkaitan, kalau anda melakukan interpretasi hukum, maka anda akan melakukan penalaran hukum, dan tidak mungkin anda melakukan penalaran hukum tanpa interpretasi hukum.
2. Penalaran Hukum dalam segi praktis, Bering dilakukan oleh hakim. Karena tujuannya adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus, hal inilah yang dinamakan dengan penalaran hukum problematis. Artinya para penafsir berangkat dari hal-hal yang sifatnya problematis (dari masalah tertentu).

3. Penalaran Hukum dari segi teoritis, bisa juga di sebut penalaran hukum tersistematis. Adalah kegiatan yang dilakukan bukan oleh hakim saja, akan tetapi juga oleh hamba hukum lainnya (termasuk peneliti hukum; Dosen hukum)

Dalam melakukan aktivitas penalaran hukum (baik bagi teoritis hukum maupun praktisi hukum). Itu akan mengikuti aspek-aspek *diskursus hukum; retorika hukum*; serta logika hukum (B. Arief Sidharta). *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivistis*. 1998: 21). yang dimaksud dengan *diskursus hukum* adalah (J. A. Pontier. *Rechtsvinding*: Terjemahan B. Arief Sidharta. *Penemuan Hukum*. 2004: 70)

Suatu proses intelektual dari seorang (baik praktisi hukum maupun teoritis hukum), untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang secara langsung; dan sebagai *preservasi* dan pengembangan tradisi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat hukum yang terorganisasi secara politik sebagai suatu keseluruhan; dan sebagai *preservasi* dan pengembangan tradisi nilai-nilai profesi hukum.

Suatu *diskursus hukum*, tidak mungkin akan berhasil dengan baik, kalau tanpa dukungan dari umum (masyarakat). Untuk megefektifkan *diskursus hukum* ini, dibutuhkanlah apa yang dinamakan dengan *retorika hukum*. Secara ringkas, yang dikatakan dengan *retorika* adalah seni untuk berbicara secara baik serta menyakinkan publik atau masyarakat. Atau bisa juga disebut sebagai seni berdebat.

Dalam *retorika* orang beranjak dari hal bahwa argumentasi dapat diarahkan untuk mencapai dampak tertentu pada orang bagi siap argumentasi itu ditunjukkan. Untuk pertanyaan apakah sebuah putusan dan argumentasinya meyakinkan, maka *auditorium* adalah penting *Retorika hukum* dalam artian umum adalah (B. Arief Sidharta. *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivistis*.

Op cit: 21

Seni persuasi dengan '*appeals to emotions*' dan seni untuk memperoleh dukungan umum dengan '*appeals to reason*' sebagai cara penalaran. *Retorika hukum* ditunjukkan untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku dalam pembentukan hukum serta pengambilan keputusan, dan menampilkan



alasan-alasan untuk mendukungnya. Ciri khas dalam retorika hukum adalah '*appeals to authority*' (mengacu pada otoritas, kewenangan, dasar hukum), yakni mengacu pada apa yang biasa disebut sebagai sumber hukum formal yang memberikan kewenangan tersebut. Dalam pengacuan ini terjadi terhadap *teks otoritatif* (atau proses menentukan makna)"

Dalam retorika, biasanya orang menggunakan pernyataan *subjunctive*, normatif Berta imperatif, yang dikemukakan untuk mempengaruhi pikiran atau perilaku orang, dalam aturan hukum yang biasanya dirumuskan dalam kalimat indikatif, sesungguhnya memiliki signifikansi retorikal di samping signifikansi logikal. Aspek retorika dalam penalaran hukum ditunjukkan pada perilaku, pada aktivitas hukum baik pembentukan hukum maupun pemberitaan putusan hukum. **H.J. Berman** sebagai mana yang dikutip oleh **B. Arief Sidharta** lebih jelas mengemukakan apa itu retorika hukum Retorika hukum ditunjukkan untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku dalam pembentukan hukum atau pengambilan keputusan. Yang menjadi ciri khas dari retorika hukum adalah: *appeal to authority*; adalah pengaruh yang mengacu kepada otoritas; kewenangan dan dasar hukum (*formal*) yang memberikan kewenangan tersebut.

Aktivitas terakhir dari penalaran hukum adalah *logika hukum*. Logika hukum adalah logika yang diterapkan dalam bidang hukum. Menurut **B. Arief Sidharta** sifat khas dari logika hukum adalah bahwa walaupun silogisme penting dan perlu bagi ilmu hukum, namun tidak *adekuat* sebagai metode penalaran hukum. Sebab dalam ilmu hukum premis-premisnya belum atau tidak terberi (*riðt given*), melainkan harus diciptakan Kualitas dari logika penalaran hukum ini, sebagai mana dikatakan oleh **H.J. Berman** adalah:

1. Penalaran hukum berusaha untuk mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar pikirannya adalah keyakinan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang termasuk ke dalam yuridiksinya. Kasus yang sama harus diberi putusan yang sama berdasarkan asas "*similia similibus*" (asas persamaan)
2. Penalaran hukum berusaha memelihara kontinuitas dalam waktu (*konsistensi historikal*). Penalaran hukum akan mengacu pada aturan - aturan hukum yang sudah

terbentuk sebelum dan putusan-putusan hukum terdahulu, sehingga dapat terjamin stabilitas dan prediktabilitas

3. Dalam Penalaran hukum akan terjadi proses dialektika, yakni menimbang-nimbang klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan undang-undang maupun dalam proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan atau dalam proses negosiasi.

### **Langkah-Langkah Penalaran Hukum.**

Hakim yang melakukan kegiatan berpikir ini, maka ia sedang memasuki suatu wilayah penalaran hukum (*legal reasoning*). Seorang penalar, guna menemukan hukumnya maka ia tidak berada pada jalan yang lurus, adakalanya seorang penalar hukum menemukan halangan dan rintangannya. Misalnya, pada saat hakim melakukan proses penalaran hukum, ia menemukan dakwaan yang kabur, pertanyaannya apakah dakwaan itu dapat dilanjutkan ke langkah penalaran berikutnya, dapat di jawab dakwaan itu batal demi hukum, maka proses menalarnya dapat kembali ke langkah pertama.

Dalam melakukan penalaran hukum ini, menurut **Gr. Van der Brught & J. D. C Winkelman** (*Penyelesaian Kasus*. Terj: B. Arief Sidharta. 1994: 35-36) seorang hakim harus mempunyai langkah-langkah sebagai berikut

1. Hakim harus meletakkan sebuah pemetaan kasus atau memaparkan sebuah kasus. Atau memaparkan secara singkat duduk perkaranya (Menetapkan kasus)
2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi)
3. Menyeleksi aturan hukum yang relevan (Pemilihan aturan Hukum)
4. Menafsirkan dan menganalisisnya terhadap aturan hukum itu (Interpretasi)
5. Menerapkan aturan hukum itu pada kasus konkret (Penerapan hukum)
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian (argumentasi hukum)
7. Merumuskan (formulasi) penyelesaian kasus tersebut. (Pemecahan masalah)



Bandingkan dengan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Kenneth J. Vandevelde., langkah-langkah yang ia lakukan adalah sebagai berikut

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*Identifitry the applicable source of law*)
2. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*)
3. Mensistematisasikan aturan hukum tersebut ke dalam stujktur yang koheren, yakni stuktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherent stucture*)
4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available fact*)
5. Menerapkan stuktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang ditimbulkan dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the stucture of rules to tie fact*)

Langkah-langkah tersebut di atas, merupakan suatu model pencarian untuk sampai kepada kesimpulan (salah atau benar). Jika hakim, dihadapkan kepada suatu kasus maka ia akan berangkat dari hal "*kebenaran bebas-ragu*" adalah kebenaran yang tidak bisa diragukan, misalnya setiap malam pasti akan terjadi gelap, ini kebenaran bebas ragu, dan seorang pencuri pasti akan berhadapan dengan Pasal 362 KUH-Pidana.

Biasa hakim dalam menemukan hukum melewati langkah-langkah sebagai berikut:

### **Langkah I (Menetapkan Kasus)**

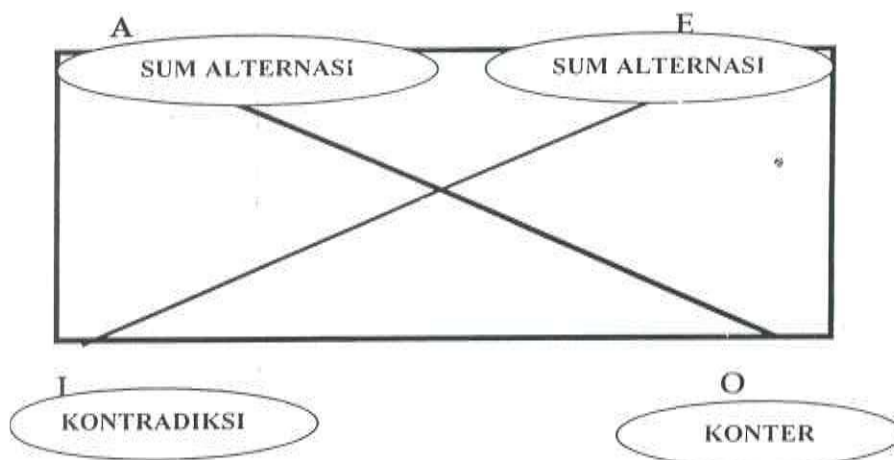
Pada saat penggugat (X) mengajukan perkara mereka ke pengadilan yang berisi peristiwa konkret, dan tergugat (Y) menjawab berbagai gugatan X di depan pengadilan. Pada saat itulah hakim harus menempatkan para pihak dengan sejajar dan hakim berkewajiban untuk mendengarkan berbagai keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak (*audi et alteram*). Hal ini harus dilakukan hakim, guna memperoleh keterangan tentang kasus apa yang sedang

disengketakan tersebut. Pada saat para pihak mengajukan perkaranya mereka, sering terjadi bahwa peristiwa konkrit yang diajukan tersebut memiliki *karakteristik* sebagai berikut: (Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. 200: 35-34.

1. Tergugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat yang sama dengan peristiwa konkrit yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya
2. Peristiwa konkrit yang diajukan sama sekali tidak sama dengan peristiwa konkrit dari penggugat, misalnya penggugat mengemukakan tentang jual beli, sedangkan tergugat mengemukakan tentang hutang piutang
3. Peristiwa konkrit dari tergugat ada yang tidak sama dengan peristiwa dari penggugat, tetapi ada juga yang sama

Ketiga hal di atas, adalah merupakan persengketaan, apabila proposisi penggugat dalam posisinya bertentangan dengan proposisi tergugat dalam jawabannya, maka berarti telah terjadi persengketaan antara kedua belah pihak. Bentuk persengketaan dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, *Konter; Kontradiksi; sub konter; serta sub alternasi*.

Pertentangan antara berbagai pihak dapat dilihat sebagai berikut



Yang dimaksud dengan *Konter* Adalah suatu bentuk pertentangan atau sengketa antara proposisi A dengan proposisi E, misalnya: Penggugat, menyatakan bahwa Semua harta sengketa adalah milik penggugat (A). dan Tergugat menyatakan :Semua harta



sengketa adalah bukan milik penggugat (E). Dalam pertentangan ini nampak bahwa subjek pada dua proposisi tersebut adalah sama, yakni sama-sama universal (semua). Akan tetapi hubungan antara subjek dengan predikat tidaklah sama, yaitu pada proposisi penggugat bersifat *afirmatif* sedang pada proposisi tergugat bersifat negatif. Jika hakim menemukan persengketaan seperti ini, maka hal yang harus dilakukan adalah membenarkan salah satu proposisi dari para pihak, karena tidak mungkin kedua-duanya benar.

**Kontradiksi** Adalah bentuk pertentangan atau sengketa antara proposisi (pernyataan) A dengan O, atau antara I dengan E. perhatikanlah ilustrasi berikut: Penggugat: Semua harta sengketa adalah milik penggugat (A) Tergugat : Sebagian harta sengketa adalah bukan milik penggugat (O) Penggugat : Sebagian harta sengketa adalah milik penggugat (I) Tergugat: Semua harta sengketa adalah bukan milik penggugat (E)

Dari pertentangan ini nampaknya bahwa subjek antara dua proposisi tersebut berbeda, yaitu universal dan khusus, dengan demikian pula untuk hubungan subjek dengan predikat pada dua proposisi tersebut juga berbeda, yaitu *afirmatif* dan negatif. Jika terjadi pertentangan semacam ini, maka logikanya adalah: Jika proposisi (pernyataan) penggugat benar, maka proposisi tergugat salah; tidak mungkin kedua-duanya benar; dan tidak mungkin salah.

Yang dimaksud dengan **Sub Konter** Adalah bentuk pertentangan antara proposisi I dengan O, misalnya, lihat contoh dalam Konter di atas. Sedangkan sub alternasi adalah pertentangan dari *alternasi* (bagian alternasi)

Dari berbagai pertentangan di atas, maka hakim perlu mengetahui apa yang sekiranya menjadi sengketa bagi kedua belah pihak tersebut. Untuk maka diadakanlah prosedur jawab menjawab dari para pihak, dari jawaban itu akhirnya akan diketemukan peristiwa manakah yang sekiranya terjadi. Dalam hal ini, hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkret yang telah terjadi. Dari berbagai versi keterangan para pihak, hakim selanjutnya akan mengidentifikasikan dengan membuang keterangan-keterangan yang *irelavan*, sehingga ia sampai kepada keyakinan tentang posisi kasus yang sesungguhnya (*relavan*). Suatu peristiwa dapat dikatakan peristiwa yang *relavan*, jika peristiwa itu penting bagi hukum, yang berarti bahwa peristiwa itu dapat dicakup oleh hukum,

dan dapat dipecahkan oleh hkum, peristiwa yang sesuai dengan kenyataan yang dilukiskan oleh hukum. Untuk dapat mengetahui, apakah peritiwa itu relaven atau tidak, maka hakim terlebih dahulu harus mengetahui tentang peraturan hukumnya, dan hal ini diperlukan penguasaan terhadap aturan hukum. yang disebut dengan stuktur kasus atau stuktur fakta. Kemudian, hakim masih harus membuktikan kebenarannya dari peristiwa yang didapatkan tersebut. Hakim harus memperoleh kepastian atau sengketa konkret yang terjadi, inilah proses yang kita dinamakan dengan penetapan kasus

Penetapan kasus dalam hukum acara pidana dapat kita lihat dalam proses meninjau alat bukti<sup>2</sup>, yang sudah diterima oleh Kepala Sub Kepaniteraan. Dalam meninjau alat-alat bukti, hakim memerlukan berbagai teori diantaranya:

1. *Negatief wettelijk*: Wettelijk artinya berdasarkan UU, sedangkan Negatief artinya walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti yang sesuai dengan UU, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa; intinya teori yang mengatakan bahwa hakim wajib terikat pada alat bukti minimum menurut UU, akan tetapi masih perlu ditambah dengan keyakinan hakim<sup>3</sup>.
2. *Positief Wettelijk*. Adalah sistem menurut UU Positif (hukum yang berlaku saat ini); Teori yang mengatakan bahwa alat bukti yang dipakai adalah alat bukti sebagaimana yang tertuang dalam UU, cara bagaimana hakim mempergunakan alat bukti ini adalah telah ditentukan dalam UU, walaupun hakim tidak menyakininya.

---

<sup>2</sup> Alat bukti dalam hukum acara pidana terdiri dari lima (5) alat bukti: Keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHP). Alat-alat bukti ini, harus kita bedakan dengan barang bukti. Yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.

<sup>3</sup> Dalam Pasaal 183 KUHP dinyatakan:

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya"*

Rumusan Pasal ini dapat menyimpulkan bahwa negara kita (Indonesia) memakai sistem pembuktian yang negatif

3. *Vrij bewijs (Conviction Raissonne)*: Hakim dalam memakai alat bukti dibebaskan dari ketentuan sebuah UU, jadi alat-alat bukti dan cara pembuktiannya tidak ditentukan dalam UU

Penulis lebih senang menyebut langkah ini sebagai langkah perumusan masalah-masalah yuridis (*legal problem formulation*). Pada saat hakim mengidentifikasi masalah mana yang relevan dengan keterangan para pihak, maka hal ini dapat saya sebut sebagai sengketa yang sifatnya sederhana. Atau sengketa yang dapat dipertanggungjawabkan. Masalah ini juga harus dapat dipecahkan (*resolvable*).

## Langkah II (Mengkualifikasi)

Setelah peristiwa konkret itu didapatkan, dan telah dibuktikan bahwa itu adalah masalah yuridis, atau dinyatakan sudah terbukti telah terjadinya masalah hukum, maka hakim dapat mencari dasar hukumnya. Kemudian peristiwa konkret itu harus diterjemahkan kepada bahasa hukum, atau dicari kualifikasinya.

Langkah II ini merupakan titik krusial dalam penalaran hukum, fakta-fakta yang diformulasikan oleh para pihak sebagian besar berupa simbol atau bahasa sehari-hari. Dalam kegiatan kualifikasi ini perlu dicarikan kaitannya antara *das sein* dengan *das sollen*, antara peristiwa konkret dengan peraturan hukumnya. Di sini ditetapkan hubungan antara peraturan hukum dengan peristiwa konkret. Dalam artian, peraturan hukumnya dikonkretisasikan dengan menghubungkan terhadap peristiwa hukum.

Pengkualifikasian ini menurut pribadi penulis akan mudah dilakukan jika kasus yang tengah dihadapkan kepada hakim strukturnya sangat sederhana (*clear case*). Dalam memecahkan kasus-kasus yang ringan (*clear case*), misalnya kasus berupa permohonan penetapan hakim, pergantian nama seseorang atau adopsi anak, tidak menghadapkan pihak yang bersengketa, maka penalaran yang dilakukan adalah dengan *inferensi langsung*, adalah bentuk penalaran yang menggunakan konversi dan obversi: *Konversi* adalah, proses inferensi langsung yang berupa dari sebuah proposisi tertentu ditarik sebuah proposisi lain yang subjeknya adalah predikat dari proposisi asal (premis) dan predikatnya adalah subjek dari proposisi asal.

Namun, dalam kenyataan tidak semua kasus mempunyai struktur yang sederhana. Ada juga kasus yang sedemikian kompleks



**Empat:**  
**Logika Deduksi:**

**Perdebatan antara Teks & Realitas Hukum**

Ruang hukum selalu dikuasai  
oleh orang-orang yang ber "uang"  
hukum adalah permainan  
semacam adu kekuasaan  
maling maling kecil dihakimi  
maling maling besar dilindungi.  
hukum adalah komoditas  
barangnya para tersangka  
ada uang kau kan dimenangkan  
tak ada uang ya saygobye

**Alam Semesta & Reduksi.**

Adalah Rene Descartes (1596-1650), yang memperkenalkan *logika deduksi*, dengan menemukan titik *koordinat Cartesian* di mana manusia dapat mendeskripsikan secara tepat letak suatu alam raya ini. corak berpikirnya adalah matematis. ia juga melukiskan bahwa alam semesta ini dapat di-matematika-kan. alam ini dilukiskan sebagai pusat mesin terbesar, dan manusia dianggap sebagai mesin terkecil dari alam raya ini. sehingga paradigma Descartes disebut paradigma Cartesian.

Rene Descartes (1596-1650), dikenal sebagai Bapak Filsafat Modern (Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan kondisi Sosio-Politik zaman kuno hingga sekarang*. 2004: 732) Descartes adalah seorang ahli matematika; dan dianggap sebagai bapak *geometri analisis*, memberikan banyak sumbangan penting bagi ilmu Al-jabar.

Dalam persoalan ilmu; alam semesta dan manusia, bahkan Tuhan, Descartes selalu berusaha untuk membuktikan kebenaran-kebenaran filsafat dengan cara seperti membuktikan sebuah dalil matematika. Dengan kata lain, dia ingin menggunakan instrumen yang persis sama dengan yang digunakan oleh ahli matematika yaitu angka-angka. (Jostein Gardner. *Dunia Sophie: Sebuah Novel Filsafat*. 2004: 259)

Dari pembuktian semacam itulah, Descartes disebut sebagai Bapak logika deduksi. Sebutan ini memperlihatkan pengakuan dunia terhadap pengaruh besar Descartes terhadap terbentuknya kesadaran modern di Eropa pada abad ke-17 M. Descartes merupakan orang



yang pertama memiliki kapasitas filosofis tinggi dan sangat dipengaruhi oleh fisika dan astronomi baru. Descartes adalah seorang filosof, matematikawan dan ilmuwan. Dalam filsafat dan matematika, karyanya sangat tinggi maknanya; dalam sains meskipun laik dipuji, tidak sebagus karya-karya teman sejawatnya. Menyusul hegemoni Eropa atau Barat terhadap dunia sejak itu, maka kesadaran modern Cartesian itupun berkembang menjadi kesadaran dunia global. Ada tiga karya utama Descartes yaitu; *Discourse de la Methode* (Wacana tentang Metode), pada tahun 1637, *Meditationes de Prima Philosophiae* (Renungan tentang Metafisika) tahun 1642, dan *Principia Philosophiae* (Prinsip-Prinsip Filsafat), tahun 1644.

Dalam kedua buku pertamanya tersebut Descartes mengawali dengan menjelaskan metode apa yang disebut "*keraguan Cartesian*". Untuk membangun sebuah dasar yang kuat bagi filsafatnya, dia berkeputusan untuk membuat dirinya meragukan segala sesuatu yang dapat diragukannya. Karena, menurut perkiraannya, proses ini bisa membutuhkan waktu, dalam pada waktu di mengatur perilakunya sesuai dengan aturan-aturan yang diterima masyarakat umum; ini akan menyebabkan pikirannya tidak terhalang oleh konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari keraguannya untuk dipraktikkan.

Adalah karya Descartes yang terakhir, *Principia Philosophiae* (Prinsip-Prinsip Filsafat), Bukunya ini merupakan buku yang paling banyak memuat teori ilmiah, meskipun ada beberapa buku lain yang hampir sama yaitu *Essais philosophiques* (1637, yang membahas ilmu optik dan geometri).

Dalam pandangan Descartes, alam bekerja sesuai dengan hukum-hukum mekanik, dan segala sesuatu dalam alam materi dapat diterangkan dalam pengertian tatanan dan gerakan bagian-bagiannya. Dalil '*Cogito Ergo Sum*', (aku berpikir maka aku ada), merupakan pernyataan yang jelas dan terpilah, segala sesuatu yang jelas (*clearly*) dan terpilah (*distinctly*) adalah kebenaran. Segala sesuatu yang jelas dan terpilah pasti benar, konsekuensi dari dalil ini bermuara pada perbedaan yang mencolok antara rasio (*cogito, think, mind*) dengan tubuh (*body*), karena baik benak maupun badan sama-sama dipandang nyata. Pandangan ini menempatkan Descartes sebagai seorang penganut paham dualisme.

*Cogito ergo sum*, (Stephen Palmquis, *Pohon Filsafat: The Tree of Philosophy*, 2000: 77-78) prinsip inilah yang banyak dikenal oleh orang. Prinsip ini terciptakan, Kala Descartes berbaring di ranjangnya di ruang yang gelap dengan melakukan eksperimen pemikiran yang mendalam, tiba-tiba ia menemukan jawaban yang ia cari-cari. Ia dapati ia tidak bisa menyangsikan bahwa pada saat itu ia sedang sangsi. Ini karena kesangsian itu mustahil eksis tanpa ada yang melakukan penyangsian Kesangsian merupakan bentuk pemikiran, menurut Descartes dalam meditasinya yang kedua, sehingga pemikiran pasti menjadi dasar pembuktian kepastian akan eksistensinya sendiri. Karenanya ia mengajukan pepatah yang sangat terkenal, *Cogito Ergo Sum*. Eksistensi yang "berada yang berfikir" (*thinking being*) ini merupakan fundasi yang pasti mutlak bagi semua pengetahuan. Saya atau "ego" bertempat di luar sejarah dan kebudayaan sebagai asumsi metafisi dasar, tidak bergantung pada jenis iman apapun, karena ketidak berdayaannya itu mustahil selama saya tahu saya berfikir.

Apa yang diungkapkan oleh Descraets (Jostein Gardner, *Dunia Sophie*, Op cit:263) ini mengandung makna bahwa Substansi rasio adalah *res cogitans* (pemikiran), sedang substansi tubuh adalah *res extensa* (berkeluasan). *Cogitans* merupakan bidang jiwa, sedang *extensa* merupakan bidang materi, bidang ilmu alam. Pikiran sesungguhnya adalah kesadaran, dan tidak mengambil tempat dalam ruang dan karenanya tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tetapi materi adalah perluasan, dan ia mengambil tempat dalam ruang karenanya dapat selalu dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih kecil lagi, tapi ia tidak mempunyai kesadaran. Descartes menyatakan bahwa kedua substansi itu berasal dari Tuhan, sebab hanya Tuhan sajalah yang ada tanpa tergantung pada apapun yang lain. Namun meskipun gagasan dan perluasan itu berasal dari Tuhan, kedua substansi itu tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Pikiran sama sekali tidak bergantung pada materi, dan begitu pula sebaliknya, proses materi sama sekali tidak tergantung pada pikiran.

Di abad ke-18 di mana Abad hidupnya Descrates (Cecep Sumarna. *Filsafat Ilmu*. 20067: 138) sering disebut abad pencerahan (*enlightenmt*), barat sudah mulai menemukan teori besdar dengan keyakinan pada otak manusia yang tidak terbatas. di abad ini, seababd

dengan Descartes, terlahirlah ilmuwan seperti Isaac Newton (peletak dasar ilmu sains)

Menurut sejarahnya, **Isaac Newton** yang lahir di Inggris pada tahun 1642, yaitu tahun kematian Galileo. Newton mengembangkan suatu formulasi pandangan dunia *mekanistik* yang matematis dan lengkap, sehingga melahirkan suatu *sintesis* agung-karya-karya Copernicus, Kepler, Bacon, Galileo, dan Descartes. Fisika Newton mahkota prestasi ilmu abad tujuh belas, memberikan suatu teori matematis dan konsisten tentang dunia yang tetap menjadi dasar pemikiran ilmiah hingga abad ke dua puluh. Pemahaman Newton tentang matematika jauh lebih kuat daripada orang-orang sezamannya. Dia menciptakan suatu metode yang jauh melampaui teknik-teknik matematika Galileo dan Descartes. Prestasi intelektual yang luar biasa ini telah dipuji oleh Einstein sebagai Menurut **Fritjof Capra**, (*The Tao of Physics*, 2004: 56) "kemajuan yang mungkin terbesar dalam pemikiran yang pernah dibuat oleh pribadi tunggal, dialah Newton.

### Terbentuknya Logika Deduksi.

Asyik memang (bagi sebagian orang tanpa terkecuali anda), berkelana, berfilsafat dengan Descartes dan Newton, mempelajari hidup mereka adalah pelajaran bagi kita, pelajaran mengapa kita tidak direduksi oleh mereka? mengapa manusia (kita) di kecilkan oleh manusia juga, dalam pandangan **Descartes-Newton**, alam ini besar, dan kita hanya diara, mengikuti hukum-hukum alam.

Pemikiran mereka berdua (walau banyak pemikiran sejaman mereka), dikenal dengan istilah Paradigma Cartesian-Newtonian, yang merupakan paradigma yang ditasbihkan sebagai pilar peradaban modern, yang dalam perkembangannya telah menyatu dan *built-in* dalam berbagai sistem dan dimensi kehidupan modern, baik dalam kegiatan wacana ilmiah maupun dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari. Paradigma ini telah menjadi kesadaran kolektif (*collective consciousness*) (**Husain Heryanto**, *Paradigma Holistik*. 2003: 2) dan menghegemoni cara pandang manusia modern.

Dalam wacana lain, penulis berkelana dengan Durkheim, demi mencari arti dari *collective consciousness*, Durkheim menyebut akan hal ini dengan "*istilah fakta sosial*", dengan landasan: bahwa gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu, yang merupakan cara bertindak,



berpikir, dan berperasaan dari mulai bahasa, sampai sistem sosial. Adalah semuanya berada diluar kesadaran individu. Kemudian, semua pemikiran itu memaksa individu untuk mengikutinya. Seterusnya ia bersifat umum, maka disebutlah sebagai sebuah kesadaran kolektif (*Collective consciousness*). (Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. 1984: 177-179)

**Van Peursen** (C.A van Peursen, *Orientasi di Alam Filsafat*. 1991:11) menyebutkan bahwa pengalaman sehari-hari tidak berdiri dan lepas dari filsafat dan ia menyatakan bahwa gambaran tentang dunia yang dianut manusia modern dipengaruhi oleh cara pandang sains modern. Paradigma ini dipandang telah menjadi bagian cara berada dari sistem, pola dan dinamika modernisme. Terlepas dari kenyataan apakah manusia modern menyadari hal ini atau tidak.

Bagaimana logika deduksi Descartes itu terbentuk? kita tahu bahwa Kepastian Cartesian pada dasarnya bersifat matematis. Descartes percaya bahwa kunci alam semesta adalah struktur matematis, dan dalam pikiran ilmu itu sinonim dengan matematika. Oleh karena itu dalam hubungannya dengan sifat-sifat objek fisik, dia menulis "Saya mengakui tidak menerima apapun sebagai kebenaran jika tidak dapat direduksi, dengan kejelasan gambaran matematika, dari pengertian-pengertian umum yang kebenarannya tidak dapat kita ragukan lagi. Karena semua fenomena alam dapat dijelaskan dengan cara ini, maka saya berpendapat bahwa tidak ada prinsip-prinsip lain dalam fisika yang perlu diterima, dan tidak ada pula prinsip-prinsip lain yang diperlukan.

Dari reduksi alam semesta inilah, Descartes menggunakan metode yang bersifat analitik, (*logika analitik*) metode itu terdiri atas pemecahan pikiran dan masalah menjadi potongan-potongan kecil dan penyusunan kembali potongan itu ke dalam tatanan logisnya. logika analitik ini barangkali merupakan sumbangan Descartes terbesar pada dunia ilmu. Logika itu telah menjadi sesuatu *karakteristik* penting pikiran ilmiah modern dan telah terbukti sangat bermanfaat dalam perkembangan teori-teori ilmiah dan pelaksanaan proyek-proyek teknologi yang kompleks.

Logika Descartes, telah membuat pemikiran lebih pasti daripada materi dan membawanya kepada kesimpulan bahwa akal dan materi merupakan dua hal yang terpisah dan berbeda secara mendasar. oleh karena itu, dia menegaskan bahwa "*tidak ada yang*



*tercakup di dalam konsep tubuh menjadi milik akal; dan tidak ada yang tercakup di dalam konsep akal menjadi milik tubuh". (Capra. Op cit: 24).*

### **Problematika Logika Deduksi**

Dunia moderen di barat telah dimulai dari periode *Renaissans*, periode yang merupakan awal dari perkembangan sains dan teknologi, perluasan dan ekspansi perdagangan, perkembangan wawasan moderen tentang *humanisme*, sebagai tantangan terhadap abad pertengahan dan sebagai satu bentuk pendewasaan *rasionalitas* dalam pemecahan masalah-masalah manusia. Semangat renaissans sangat terlihat sekali pada pemikiran Descartes yang melalui wawasan humanismenya, menjadikan manusia dengan segala kemampuan rasionalnya. Sebagai aku (*subjek*) yang sentral dalam pemecahan masalah dunia, wawasan Cartesian dalam hal ini bersifat sangat *mekanistik*. Dalam pengertian rasionalitas dijadikan sebagai ukuran tunggal kebenaran, dan mesin dijadikan sebagai paradigma dalam mewujudkan mimpi-mimpi utopias manusia moderen dan kekuasaan.

Untuk dapat memahami dan memberi makna terhadap peradaban moderen yang dibangun sejak abad Ke-17 M di barat tersebut, maka kita tak dapat melepaskan diri dari cara pandang Cartesian-Newtonian. Karakter peradaban moderen dicirikan dengan meluas dan mendalamnya cara pandang Cartesian-Newtonian dalam segala bidang kehidupan. dari mulai pola pikir, visi, sampai sistem nilai manusia moderen pada umumnya. Proses *ekstensifikasi* dan *pervasifnya* pandangan dunia (*world-view*) ini berlangsung sedemikian rupa sehingga paradigma Cartesian-Newtonian telah menyatu dan *Built-in* dalam berbagai sistem dan dimensi kehidupan moderen, baik dalam kegiatan dan wacana ilmiah maupun dalam kehidupan sosial-budaya sehari-hari. Paradigma ini telah menjadi kesadaran kolektif (*Collective consciousness*) manusia moderen sehingga banyak orang mengikutinya tanpa sadar.

Manusia-manusia moderen dengan paradigma Cartesian-Newtonian, telah diperlakukan seperti mesin besar yang diatur menurut hukum objektif, *mekanistik*, *deterministik*, *linear*, dan *materialistik*. cara pandang ini menempatkan materi sebagai dasar dari semua bentuk *eksistensi*, dan menganggap alam kosmos sebagai suatu kumpulan objek-objek yang terpisah dirakit menjadi sebuah mesin raksasa. Fenomena yang kompleks selalu dipahami dengan cara

mereduksi menjadi bolak-balik bangunan dasarnya dan dengan mencari mekanisme interaksinya. (Husain Heriyanto. *Paradigma Holistik: Dialog Filsafat, Sains, Dan Kehidupan Menurut Shadra dan Whitehead*. Op cit: 4-8) Menurut Capra, cara pandang Cartesian-Newtonian dikenal dengan *reduksionisme* yang telah tertanam sedemikian rupa dalam kebudayaan moderen sehingga sering diidentifikasi sebagai metode ilmiah (*Scientific method*).

Pandang Cartesian-Newtonian, pada tataran praktis menimbulkan problem-problem global seperti krisis ekologi, dehumanisasi, dan konflik kekerasan yang sangat besar. Pada tataran teoritis Pandangan ini tidak mampu lagi memberi penjelasan dan pemaknaan terhadap fenomena-fenomena yang muncul dalam perkembangan sains muthakhir, seperti teori relativitas, teori kuantum, teori chaos, evolusi kreatif dan sibernetika.

Formulasi sains modern yang dibangun di atas logika murni Rene descartes telah membawa akibat-akibat buruk yang luas terhadap dimensi ontologi, aksiologi, dan epistemologi ilmu pengetahuan. Dalam dunia moderen pengertian ilmu pengetahuan di batasi pada hanya sekedar ilmu alam (saja) semata, dan epistemologi ilmu pengetahuan juga dibatasi pada pengertian-pengertian metoda eksperimental belaka. Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang tidak berobjek benda-benda alam dan tidak menggunakan metoda-metoda eksperimental dianggapnya bukan sains.

Filsafat ilmu pengetahuan yang berparadigma Cartesian seperti yang telah disinggung di atas, telah memberikan dasar dan pengukuhan terhadap eksistensi ilmu pengetahuan, dan juga telah memberikan energi yang besar bagi perkembangan dan kemajuan sains. Akan tetapi di sisi lain, pengukuhan itu juga telah mengakibatkan pengaburan pada dimensi-dimensi saintifik lainnya. sehingga, di samping membawa pengaruh positif terhadap eksistensi perkembangan sains, filsafat cartesian juga telah mengakibatkan pengaburan terhadap karakteristik sains Global (Alfred North whitehead. *Science and The moderen*. 1926: 194)

Maka dari hal tersebut, para filsuf moderen pertama-tama menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau dogma-dogma gereja, juga tidak berasal dari kekuasaan feodal, melainkan dari diri manusia itu sendiri (Nico (et al). *descartes, Hume, & Kaint: tiga Tonggak filsafat Moderen*. Dalam Fx Mudji Sutrisno & F Budi Hardiman (ed), *para filsuf Penentu Gerakan Jaman*. 1992: 55) sebagai ahli

waris zaman renaissance, filsafat zaman moderen itu bercorak *antroposentris*, artinya manusia menjadi pusat perhatian penyelidikan semua filsuf zaman itu menyoediki segi-segi subjek manusiawi "Aku" sebagai pusat pemikiran, pusat pengamatan, pusat kebebasan, pusat tindakan, pusat kehendak dan pusat perasaan.

### **Logika Deduksi Mereduksi Realitas Hukum.**

Descartes dan Newton melalui dua paradigmanya, membatasi pengertian ilmu pengetahuan pada cabang-cabang ilmu alam (*natural science*) semata, dan pengertian epistemologi ilmu pengetahuan dibatasi pada pengertian metode-metode eksperimental belaka. Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang tidak berobjek benda-benda alam dan tidak menggunakan metode eksperimental dianggap bukan sains. Penegasan ontologi ilmu pengetahuan dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran ilmu alam dan penegasan epistemologi ilmu juga dilakukan dengan menggunakan batasan-batasan metode eksperimental, akibatnya sains terputus dari perspektif global. Sains menjadi bidang pengetahuan yang eksklusif dan tidak memberikan manfaat apapun terhadap lingkungan.

Menurut Alfred North Whitehead, (Lili Rasyidi. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. 2003:2), Paradigma Cartesian-Newtonian, pada satu sisi memberikan dasar dan pengukuhan eksistensial terhadap ilmu pengetahuan, juga telah memberikan energi yang besar bagi perkembangan dan kemajuan sains, tetapi pada sisi lainnya pengukuhan itu juga telah mengakibatkan pengaburan pada dimensi-dimensi saintifik lainnya. Sehingga disamping membawa pengaruh positif terhadap eksistensi dan perkembangan sains, filsafat Cartesian-Newtonian juga mengakibatkan pengaburan terhadap karakteristik sains global. Paradigma Positivisme adalah anak kandung dari epistemologi modern yang dirintis oleh Descartes-Newton. Dalam hukum, paradigma ini telah diyakini sebagai salah satu metode yang paling pokok. sehingga tidak heran, apabila logika dalam hukum adalah logika deduksi. mengenai Positivisme hukum ini, akan dibicarakan lebih lanjut pada kesempatan yang lain.

Pembicaraan kita kali ini adalah apakah benar logika deduksi dalam hukum itu, dapat mereduksi (mengurangi) realitas kemasyarakatan? Kalau menganggap hukum sebagai ilmu, maka kita



**Bagian Lima:**  
**Logika Induksi:**  
**Keselarasan Antara Teks & Realitas Hukum**

**Wacana Pembuka**

Di dalam kehidupan yang mulai banyak mengalami perubahan-perubahan *transformatif* yang amat cepat, terkesan kuat bahwa hukum (positif) tak dapat berfungsi efektif untuk menata perubahan dan perkembangannya. Tak ayal lagi, berbagai cabang ilmu-ilmu sosial- khususnya sosiologi yang akhir-akhir ini mulai banyak mengkaji dan meneliti ihwal perubahan-perubahan sosial "dipanggil" untuk ikut menyelesaikan berbagai masalah dan perubahan sosial yang amat relevan dengan permasalahan hukum. (Soetandyo Wigjosoebroto, 2002:160), artinya Ilmu-ilmu sosial yang mulai "ditengok" dalam kerangka ajaran *sociological jurisprudence* mulai banyak pula dimanfaatkan untuk memungkinkan usaha memperbaharui dan memutakhirkan norma-norma hukum. Kajian-kajian *sociology of law* dengan metode sosialnya yang nomologis-induktif kini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah-masalah keefektifan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum.

Dalam pada itu Satjipto Rahardjo (*Sosiologi Pembangunan Peradilan*, 2000:18) menambahkan, bahwa pemahaman hukum secara *legalistik positivistic* dan berbasis peraturan (*rule bound*), Maksudnya yang hanya mengikuti logika deduksi atau mengikuti Descartes, tidak mampu untuk menangkap kebenaran karena memang tidak mampu melihat dan mengakui hal itu. Dalam ilmu hukum yang *legalistic-positivistic*, hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi suatu yang *sederhana, linear, mekanistik, deterministik*, terutama untuk kepentingan profesional. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum yang demikian yang masih dominan, yang termasuk kategori legismenya Schuyt. Oleh karena *legisme* melihat dunia hukum dari teleskop Undang-undang belaka untuk kemudian menghakikmi peristiwa-peristiwa yang terjadi (Satjipto Rahardjo, 2000:9). Kebiasaan yang dominan adalah melihat dan memahi hukum sebagai suatu yang rasional logis, penuh dengan kerapian dan keteraturam rasional

Baik dari pandangan Soetandyo maupun Satjipto, pemikiran Logika hukum dalam tulisan ini mengantarkan kepada pemikiran yang lebih luas daripada yang lajim dilakukan kalangan para yuris atau sarjana hukum yang *positivistis*. Dari kedua pendapat pakar sosiologi hukum tersebut di atas, hukum dalam tulisan ini hendaknya diantarkan kepada konteks, artinya menempatkan hukum dalam konteks sosial yang lebih besar. Dengan kata lain hukum itu tidak dipahami sebagai suatu institusi yang *esoterik* dan otonom, melainkan sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar. Maka dengan tegas hukum dalam wilayah seperti ini dapat dikatakan sebagai "*law as a great anthropological document*". Artinya untuk mengubah ke arah itu sebaliknya merubah pemahaman mengenai hukum sebagai instrumen profesi semata menjadi suatu dokumen antropologis.

Tentunya semangat dari Satjipto dan Soetandyo tersebut di atas senantiasa "*seraching for (the social) meaning of law*" mendapatkan jalan yang lebih lapang. Dan sosiologi (hukum) dalam hal ini membantu melakukan *dekonstruksi* terhadap pikiran hukum yang absolut dengan membawa hukum ke alam kenyataan sehari-hari. Ia memandang sosiologi hukum merupakan salah satu pintu masuk ke dalam apa yang disebut "*the scientific study of law*"

Dalam kajian Non-doktrinal, hukum tidak lagi dikonsepkan secara filosofi-moral sebagai norma *ius constituendum* atau *law as what ought to be*, dan tidak pula secara positivistis sebagai norma *ius constitutum* atau *law as what it is in the books*, melainkan secara empiris yang teramati di dalam pengalaman, dengan kata lain hukum tidak lagi dimaknakan sebagai suatu norma-norma yang eksis dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Penelitian Non-doktrinal melihat *Dari segi substantinya* kini hukum terlihat sebagai kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah dan bekerja dengan hasil yang mungkin saja efektif dan mungkin saja tidak efektif, untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat. *Dari segi strukturnya*, hukum terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang kerjanya mentransformasikan masukan-masukan (materi hukum *in abstracto*-UU) menjadi keluaran-keluaran (keputusan *in concreto*), yang dengan cara demikian mencoba mempengaruhi dan mengarahkan serta proses interaksi yang berlangsung dalam masyarakat.

Maka dari itulah menurut konsepnya hukum akan dapat diamati, kalau demikian halnya hukum yang dikonsepkan secara

sosiologis ini akan dapat dijadikan objek penelitian yang dikerjakan secara saintifik (non-doktrinal) dan tidak akan lagi dijadikan penggarap untuk menyusun sistem normatif yang koheren belaka (atas dasar logika deduktif), dengan premis-premis yang diperoleh dari bahan-bahannya (yang primer atau sekunder) atau dari sumber-sumber yang ranahnya normatif (formil, ataupun materil).

Ciri metoda yang sangat jelas dalam penelitian *non-doktrinal* adalah, pada peran logika induksi yang amat mengedepankan untuk menemukan asas-asas umum (*empirical uniformities*) dan teori-teori (baik yang miniatur atau yang *middle range*, maupun yang grand) melalui *silogisme induksi*. Dalam silogisme induksi ini, premis-premis (kecuali konklusinya) selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Di sinilah letak perbedaannya dengan model penelitian doktrinal (normatif) yang dikerjakan oleh para filosof-moralis ataupun teoritis *positivis* untuk menemukan asas-asas umum hukum positif. Penelitian-penelitian doktrinal semacam ini selalu bertolak secara deduktif dari norma-norma yang kebenarannya bernilai formal, dan tidak berasal dari hasil pengamatan yang kebenaran materialnya selalu diperasolakan dan karenanya selalu dicek. Kemudian, dengan menggunakan silogisme induksi dan memperoleh simpulan-simpulan dari proses induksi, akan selalu bersifat deskripsi atau ekplanasi tentang ada atau tidaknya hubungan (kausal atau korelatif) antara berbagai variabel sosial-hukum.

Cara berpikir dalam penelitian hukum non-doktrinal (SW. 2002: 171) adalah “berpikir *ekplanatif*” dan “larinya” akan tak pelak lagi menuju akan menuju ke upaya menemukan hubungan sebab akibat, hubungan pengaruh. *Ekplanasi* seperti ini tak akan mungkin diperoleh dengan atau melalui logika deduksi. Akan gantinya, orang harus segera beralih kepada logika induksi. Akan tetapi logika seperti ini belum masuk kedalam pengajaran cara berpikir di kalangan fakultas hukum.

Berpikir menurut pola pikir *silogisme induktif* (dalam hukum) (SW. Ibid:172) formulanya sebagai berikut:

Premis I: Si A diancam sanksi, Si B diancam sanksi, Si C diancam sanksi, Si D diancam sanksi, Si E diancam sanksi, Si F diancam sanksi, dan yang lainnyapun diancam sanksi.

Premis II: Sia A menjadi taat, Si B dan yang lainnyapun (C, D, E, F) menjadi taat.



Premis III: Jadi dimana ada ancaman sanksi, maka di situ akan ada ketaatan (artinya ada hubungan antara ancaman sanksi dan ketaatan)

Pola berpikir seperti itu adalah disebut dengan pola "*cannon of agreement*" hadirnya suatu variabel tertentu (X), apabila dalam situasi apapun selalu seiring atau selalu diikuti oleh munculnya variabel tertentu yang lain (Y), maka berdasarkan logika dapatlah disimpulkan bahwa X menyebabkan Y, atau setidaknya ada hubungan antara X dan Y.

Formula ke II adalah "*negative cannon of agreement*" dapat pula dipakai untuk menguji ada tidaknya hubungan antara X dan Y, apabila tiadanya suatu variabel tertentu selalu diikuti atau selalu berseiring dengan tiadanya sesuatu variabel tertentu yang lainnya, maka secara logika dapatlah disimpulkan bahwa antara kedua variabel itu ada hubungan (kausal atau pengaruh)

Formula III dapat disebut sebagai "*cannon of difference*" atau "*cannon of joint accurrence*". Formula ini adalah formula gabungan kedua cannon yang disebut di muka. Dikatakan bahwa tatkala ada X akan ada Y, sedangkan kalau tidak ada X maka Y pun tidak akan ada. Maka menurut hubungan logika induksi ada hubungan antara X dan Y. Formula semacam ini dapat juga disebut sebagai "*cannon of concomittance*" terjadi tatkala variabel-variabel yang tersimak dan dijadikan anasir dalam silogisme itu bisa diukur secara kuantitatif. Apabila demikian halnya, maka formulanya terbaca sebagai berikut" apabila makin tinggi kuantitas X akan makin tinggi (atau rendah) kuantitas Y, sedangkan makin rendah kuantitas X akan makin rendah (atau tinggi) pula kuantitas Y.

Dapat disimpulkan (SW. Ibid:174) apapun formulanya (baik I,II,III) semua prinsip itu menyatakan bahwa hubungan tersebut hanya mungkin terjadi dalam hubungan antara variabel. Di sini semua prinsip bisa dikembalikan ke prinsip-prinsip dasar bahwa logika hanya bisa menyimpulkan ada tidaknya hubungan kalau amatan menemukan data adanya perubahan pada variabel yang satu yang lain seiring dengan adanya perubahan pada variabel yang lain. Maka logika induksi ini hanya bisa didayagunakan dan dioperasikan untuk menggerakkan pengujian-pengujian dalam penelitian keilmuan, tatkala

objek bisa dikonsepsikan terlebih dahulu yang tertentu mempunyai nilai-nilai atau kualitas-kualitas yang dapat divariasikan.

Pada intinya metoda doktrinal menggunakan pendekatan normatif-nomologis serta silogisme deduktif. Sedangkan penelitian dengan menggunakan metoda non-doktrinal adalah *empiris-nomologis* serta silogisme induktif. Dengan metoda Normologis-Deduktif (Normatif), orang akan memandang "peradilan harus cepat dan murah", dan akan dapat disimpulkan peradilan dalam perkara warisanpun di Indonesia akan selalu murah. Akan tetapi lain halnya, jika orang memandang dengan metoda Nomologis-Induktif (Sosiologis), orang akan menemukan simpulan hubungan kausal antara kecepatan proses peradilan itu dengan gejala-gejala lain dalam masyarakat.

Penelitian-penelitian non-doktrinal yang sosial atau empiris atas hukum (penelitian sosiologi terhadap hukum) akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perubahan sosial. Teori-teori ini dikembangkan dari hasil-hasil penelitian yang berruang lingkup makro dan umumnya juga amat kuantitatif untuk mengelola data amat masalah, terorganisasi dalam suatu gugus yang disebut *the social theories of law*. Seluruh hasil kajian disistematiskan ke dalam suatu kajian khusus yang berkategori tidak hanya sebagai cabang kajian ilmu sosial, akan tetapi juga sedang diusahakan agar menjadi bagian dari studi atas hukum. Kajian itu disebut sebagai *law in society* (eropa) kemudian di amerika serikat lebih dikenal dengan *Law and society*, penelitian-penelitian empiris seperti ini lajim dikenal dengan istilah *socio-legal research*.

Sebagaimana halnya ilmu selalu ada penolakan, penelitian non-doktrinal inipun ditolak oleh paham *interaksionisme*, paham ini berpendapat bahwa, kehidupan itu tidaklah muncul secara empiris dalam alam amatan, dan menampak dalam wujud perilaku yang terstruktur secara objektif (apalgi secara normatif), dan karenanya bisa diukur-ukur. Menurut aliran intekasionisme ini, sesungguhnya realitas kehidupan itu hanya eksis dalam alam makna yang simbolis, yang karena itu akan sulit untuk ditangkap, lewat pengamatan dan pengukuan begitu saja dari luar. Realitas menurut paham ini, akan mungkin ditangkap lewat pengalaman dan penghayatan internal yang membuahkan gambaran yang utuh dan lengkap (*verstehen*) dan tidak

cukup kalau hanya diperoleh lewat beberapa indikator yang cuma terlihat di permukaan. Karena realitas adalah bagian dari alam makna atau simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman intern para subjek pelaku (SW, 2002 Ibid:166. lihat pula SW. 2006. Opcit:11) maka menurut para interaksionisme ini tidaklah akan mungkin lain daripada yang dijumpai para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman, penghayatan, dalam kehidupan yang dijalani. Maka dari itulah dapat kita ketahui bahwa metoda kuantitatif (*theory testing*) untuk meneliti dan memecahkan masalah-masalah yang dikonsepskan pada tingkat analisis yang makro sebagai realitas empiris, sedangkan metoda kualitatif (*theory building*) untuk meneliti dan memecahkan masalah-masalah pada tingkat analisis mikro sebagai realitas simbolis.

Metode kuantitatif adalah metoda yang klasik dan konvensional, dikenal orang sejak masa silam, yakni semasa orang menganalogikan sistem kehidupan manusia kedalam kehidupan non-manusia, yang alami dan kodrati, dan yang hayati dan non-hayati (anorganik). Metoda ini semula memang terbukti efektif untuk meneliti fenomena alam yang "tak memiliki kehendak bebas" di dalam berbagai cabang ilmu alam kodrati dan ilmu alam hayati, metode ini pada mulanya disambut baik di kalangan masyarakat, akan tetapi karena perkembangan di masyarakat (bukan tidak mampu mengungkap pola yang terus berkembang). Akan tetapi karena studi tentang masyarakat hendak pula mengungkapkan aspek-aspek nilai, ide, serta makna-makna kepercayaan dan keyakinan itu tak sekedar struktural akan tetapi juga bersifat *individualized*, maka muncullah metoda penelitian kualitatif. (SW. 2006, Ibid:12)

Metoda kualitatif (SW, 2002 ibid:168) adalah merupakan metoda penelitian yang baru, ia memperoleh kemapanannya pada akhir tahun 1970-an dan belum begitu banyak dipelajari dan dikenal orang. Membedakan diri dari metoda penelitian kuantitatif yang efektif untuk mereduksi gejala kehidupan manusia ke dalam angka-angka untuk kemudian digarap dan dianalisis statistik. Metoda kualitatif, dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, *kausalitas* sifatnya namun mendalam (*in depth*) dan total atau menyeluruh (*holistik*), dalam artian, penelitian kualitatif tak mengenal pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif, ytasng kita kenali dengan sebutan variabel. Dalam hal ini metoda penelitian kualitatif juga dikembangkan untuk



*Bagian Enam*  
**Mengubah Penafsiran Hukum:  
Kajian Ke arah Dekonstruksi**

Dekonstruksi cenderung dilihat sebagai sesuatu yang *antiteori* dan *antimetode*. Karena kecenderungan yang antiteori dan antimetode itu, ia mendapat tanggapan yang serius dari berbagai kalangan (ilmuwan), terutama kaum positivis dan kaum modernis. Mereka keberatan dengan dekonstruksi, karena ia cenderung relativis atau bahkan nihilistik terhadap diskursus, sehingga ia dikatakan sebagai *intellectual gimmick*, yang berarti 'tipu muslihat intelektual', yang tidak berisi apa-apa selain permainan kata-kata.

**Mencoba Menuliskan Jacques Derrida.**

Manusia di abad moderen ini, semakin membutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih memuaskan tentang realitas kehidupan di tengah hegemoni Paradigma Cartesian-Newtonian. Karena dalam realitasnya, sebagaimana yang diungkapkan di atas, paradigma ini tidak mampu untuk menjawab persoalan yang berkembang, dan hukum hanya mengandalkan metode logika Deduktif belaka.

Apa artinya?, bukan merupakan hasil perenungan pribadi penulis terhadap realitas, namun hasil perenungan manusia pada umumnya, bahwa saat ini alam semesta membutuhkan metode dekonstruksi **Jacques Derrida**. adalah, dia yang saya maksud dalam tulisan ini. secara gampalng, Derrida menyuguhkan sebuah pembacaan radikal atas filsafat dan sejarah itu sendiri. Metodenya dapat juga disebut sebagai metode '*anti-metode*' adalah dengan mendekonstruksi pengandaian-pengandaian yang paten dalam teks dan memperlihatkan kompleksitas penafsiran yang mungkin dicerap dari teks.

Bagi sebagian pemikir, Antimetode ini sering pula disitilahkan dengan Dekonstruksi, sebagaimana dijelaskan **Ben Agger**, dekonstruksi sebagai antimetode (*deconstruction as antimethod*). Dekonstruksi atau anti metode di sini dimaksudkan sebagai anti terhadap dominasi positivisme dan anti terhadap saintisme yang menganggap ilmu pengetahuan berada di atas segala aspek budaya lain. Istilah antimetode juga digunakan oleh **Paul Feyerabend**, untuk

membongkar asumsi-asumsi positivisme, sehingga pada akhirnya terlihat bahwa metode itu hanya merupakan salah satu metode di antara yang lain. (Akhyar Lubis. *Paul Feyerabend; Penggagas Anti Metode*.2003:99-100).

Pemikiran muda Indonesia (dalam usianya 23 tahun), dan satu-satunya di Indonesia pemikiran muda yang menuliskan tentang **Derrida**, adalah **Muhammad Al Fayyadl**, dalam bukunya Derrida (2006:xxi), ia menuliskan bahwa : Filsafat Derrida bukanlah filsafat dalam pengertiannya yang biasa. Mungkin inilah yang membuat pendekatannya tampak memukau bagi banyak orang. Derrida adalah filsuf yang memilih menjadikan filsafatnya sebuah penafsiran. Karena itu, ia memulai filsafatnya dengan menafsirkan teks-teks filosofis lalu mencari kelemahan-kelemahan yang tersembunyi di dalamnya, sambil mempermainkan logika dan asumsi dalam teks. Dengan cara itu Derrida ingin menunjukkan bahwa tak ada makna yang stabil dalam teks. Sebuah teks selalu ditandai oleh dinamika terus menerus, yang tidak mungkin distabilkan ke dalam satu tafsiran tunggal”

Dengan konsep Dekonstruksi ini paham *logos* (*Logosentrisme*) yang selama berabad-abad menjadi pusat (inti) pemikiran metafisika Barat modern (*modernitas*) mengalami guncangan, hal ini berpengaruh pula pada perkembangan hermeneutika pada umumnya khususnya menyangkut teori penafsiran teks.

Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang konsep Dekonstruksi dari Derrida, kita baca terlebih dahulu tentang sejarah beliau, ini sesuai dengan sub judul di atas ”mencoba menuliskan Derrida”.

Derrida (**Muhammad Al Fayyadl**, Ibid: 2) Lahir pada 15 Juli Tahun 1930 di El Biar Aljazair, satu wilayah yang agak terpencil, dari keluarga Yahudi, Jacques Derrida adalah seorang asisten ahli (*maitre assistant*) bidang filsafat. Pada usia 19 tahun Derrida kuliah ke Perancis, dan pada tahun 1956-1957 memperoleh beasiswa untuk belajar di Harvard. Pada tahun 60-an Derrida adalah salah seorang intelektual muda yang menulis untuk jurnal *avant garde*, *Tel Quel*. (Gayatri Chakravorty Spivak, *Membaca Pemikiran Jacques Derrida*. 2003:9)

Ada orang yang mengatakan bahwa setelah kelahirannya pada tahun 1930. kemudian pada tahun 1959 ia pindah dan menetap di Perancis. Ia pernah belajar militer di perancis, selain itu juga ia belajar

di *ecole normale Supérieure (rue d'Ulm)* di Perancis, dan ia mulai memperoleh perhatian publik pada tahun 1965. sejak tahun 1967, ia mulai memperoleh perhatian publik dalam pemikiran perancis kontemporer. Di Yale University, ia terkenal dengan teori Dekonstruksinya (Alex Sobur. *Semiotika Komunikasi*. 2004: 93-94).

Selama kuliah Derrida, melakukan kajian terhadap tradisi Yahudi yang membesarkannya dapat dilihat dalam "*Edmond Jabes et la question du livre*" dan "*Elipse*" keduanya terdapat dalam "*L'écriture et la différence*". Dipenghujung "*Ellipse*" dia menjelaskan asal namanya dengan mengutip Jabes. "*Reb Derrisa*". Dalam tanggapannya kepada Gerard Kallin yang muncul setelah "*La Question du style*". (Gayatri Chakravorty Spivak. OP cit: 9).

Derrida (Gayatri Chakravorty Spivak, Ibid:10) juga pernah menjadi profesor tamu di Johns Hopkins University dan di Yale University. Dia sangat berpengaruh di kalangan intelektual pantai timur Atlantik-Cambridge, New York, Baltimore, yang seringkali disebutnya Amerika. Pada awalnya memang hanya tempat-tempat inilah yang terpengaruh, namun secara perlahan hampir seluruh daratan Amerika Serikat mendapat pengaruh intelektual Derrida

Beliau, sangat di kenal memiliki pergaulan yang sangat luas terutama dengan banyak intelektual garda depan di Perancis, misalnya seperti Foucault, dan Althusser. Namun minat utama dari Derrida adalah *fenomenologi*, terutama melalui versinya yang paling awal pada pemikiran Husserl dan Heidegger. sedikit tentang Fenomenologi adalah gerakan filsafat dan merupakan salah satu arus pemikiran yang paling berpengaruh pada abad ke-20, sebut saja para filsuf seperti Ernst Cassirer (*neo-kantianisme*), McTaggart (*idealisme*), Frege (*logisisme*), Dilthey (*hermeneutika*), Kierkegaard (*eksistensialisme*), Derrida (*Poststrukturalisme*), semuanya sedikit banyak mendapat pengaruh fenomenologi. (Donny Gahral Adian, *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif*, 2006:138). Fenomenologi Derrida, ini kemudian berkembang kepada Husserl adalah ilmu tentang penampakan (fenomena), artinya semua perbincangan tentang esensi di balik penampakan dibuang jauh-jauh. Isitlah *fenomenologi* sendiri bertolak secara etimologis dari bahasa Yunani *phainomenon* (*phainomai*, menampakan diri) dan *logos* (akal budi). Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri ke



pengalaman subjek. (Donny Gahral Adian. *Percik Pemikiran Kontemporer*, Ibid:139)

Kembali kepada sejarahnya, Ketika berceramah di Universitas John Hopkins, Derrida bertemu dengan Paul de Man, seorang yang sangat berpengaruh (terutama dalam beberapa hal) bagi karir dan pemikiran Derrida. Bagi Derrida Paul de Man adalah orang pertama yang dengan baik memperlihatkan pembacaan dekonstruktif terhadap bahasa melalui telaah-telaahnya atas teks-teks literer filsafat; Derrida bahkan menulis sebuah persembahan untuk de Man, yang ditulis lama sesudah itu "*memoires; Pour Paul de Man* (1988). persembahan untuk de Man itu kemudian memicu kontroversi secara luas karena isinya mendukung sikap *anti-semitisme* de Man. Derrida banyak dikritik atas sikapnya yang seolah mengampuni pemihakan de Man atas Nazisme. (Muhammad Al- Fayyadl. Op cit:5).

Di Universitas Johns Hopkin (tempat Derrida Ceramah), itu pernah diadakan Konferensi "*The Languages of Criticism and The Science of Man*" yang memberikan pengaruh luar biasa bagi iklim intelektual Perancis, karena tidak lama setelah itu mulai tumbuh kecenderungan baru ke arah *Poststrukturalisme*. Diantara yang hadir pada konferensi tersebut tercatat nama Jean Hyppolite, komentator Hegel yang termasyur, Roland Barthes, dan Jacques Lacan. Terkecuali Hyppolite, para filsuf yang hadir dalam pertemuan itu umumnya mulai menunjukkan ketidak puasan terhadap pendekatan strukturalis.

Pada usianya yang 37 tahun, Derrida mengawali serangkaian kuliah yang disampaikannya pada konferensi Baltimore, Amerika. Tiga bukunya terbit pada tahun ini "*Of Grammatology*", (Judul aslinya *De la Grammatologie*, Paris: Les Editions de Minuit, 1967, kemudian diterjemahkan oleh Gayatri Chakravorty Spivak, *Of Gramatology*, Baltimore; The John Hopkins University Press, 1974, revisi, 1976.) *Writing and Differences*, dan *Speech and Phenomena*. *Of Gramatology* boleh dikatakan sebagai karya besar Derrida yang paling fundamental dalam pemikirannya. Melalui bukunya tersebut Derrida memulai sebuah proyek filsafat yang berbasis pada tulisan, sebagai perlawanan terhadap dominasi logosentrisme dalam metafisika Barat.

Itulah Derrida, setelah saya menuliskan kembali sejarah Derrida (sebagaimana orang lain tuliskan) saya kagum atas pemikiran-pemikiran Derrida, karena ia mampu mengembangkan pemikirannya dalam usia yang relatif muda, di Usia 19 tahun sudah mendapatkan

prestasi yang sungguh luar biasa, sementara usia 19 tahun diri saya hanya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermakna.  
sekali lagi, itulah Derrida.....!

### Dekonstruksi Derrida.

Istilah '*de-konstruksi*' sendiri sebenarnya lebih sama dengan pengertian etimologis dari kata analisis, yang berarti mengurai, melepaskan, membuka (*to undo*) ketimbarig pengertian etimologis kata *destruksi*. Dalam kamus *Webster's Unabridged Dictionary*, dijelaskan pengertian analisis sebagai "*the separating of any material or abstract entity into its constituent elements*". Ini mirip dengan pengertian "*deconstruct*", yang berarti "*to break down into constituent parts*".

Menurut **Yasraf Amir Piliang**, (*Hipерsemiotika, Tafsir Cultural*. 2003:12) dengan menyitir pendapat Derrida menyatakan, *dekonstruksi* adalah penyangkalan akan oposisi ucapan atau tulisan, ada atau tidak ada, murni atau tercemar, dan penolakan akan kebenaran logos itu sendiri.

**Michael Collin & Andreas Papadakis**, *Postmodern Design*, (**Yasraf Amir Piliang**, *Hipерsemiotika, Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*. Ibid: 129), mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Dekonstruksi* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menerangkan lembaran baru filsafat, strategi intelektual, atau model pemahaman. Terlalu beragam definisi yang diberikan oleh para ahli atau sarjana yang mencoba memahami istilah dekonstruksi ini, dan terkadang cukup rumit namun itu hakekat sebenarnya. Memahami dekonstruksi yaitu memahami Derrida yang membingungkan, hal itu disebabkan terdapat ketidak sejajaran antara ide-ide dekonstruksi pada strategi intelektual dengan dekonstruksi pada tingkat estetika, hal itu dapat dicontohnya tentang dekonstruksi dan dekonstruktivisme, sebagaimana dijelaskan Michael Collin dan Andreas Papadakis, tersebut di atas.

Menurut **Christopher Norris** (*Membongkar Teroi Dekonstruksi Jacques Derrida*, 2003:20-22) seorang kritikus sastra paling berpengaruh di Amerika menjelaskan, bahwa dari sudut etimologis dekonstruksi adalah ampas yang selalu ada antara 'krisis' dan 'kritik sastra'. Yang diperlihatkannya adalah kenyataan bahwa, pergeseran radikal yang terjadi dalam pemikiran *interpretatif* selalu datang menghadang batas-batas yang terlihat absurd.

Dekonstruksi bermain di kekaburan batas yang sama, menanggukkan segala yang kita terima *taken for granted* dari bahasa, pengalaman dan kemungkinan-kemungkinan lain dari komunikasi normal antara manusia.

Menurut **Paul de Man** (Christopher Norris. *Menibongkar Teori* Ibid: 20) dekonstruksi dapat dikatakan sebagai aktivitas pikiran yang tak melulu konsisten dalam aksinya-dan di sinilah terletak dimensi 'kegilaan'-nya, namun pada saat yang sama juga memiliki kepastian yang tidak dapat dibantah. Paul de Man berpendapat bahwa dekonstruksi bukanlah merupakan permainan akademis yang menjenuhkan atau sebagai 'senjata para teroris'.

Selanjutnya Menurut **Chris Barker** (Chris Barker. *Cultural Studies*. 2005:102-103) dekonstruksi adalah pembongkaran sebuah teks untuk mencari tahu dan menunjukkan asumsi-asumsi yang dipegang teks tersebut, melakukan dekonstruksi menurut Barker adalah melakukan pembongkaran atas oposisi-oposisi biner hirarkhis, seperti tuturan atau tulisan, realitas atau penampakan, akal atau kegilaan dan lain-lain yang berfungsi menjamin kebenaran dengan cara menafikan pasangan yang lebih "inferior" dalam masing-masing oposisi biner.

*Dekonstruktivisme* merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan satu kategori estetika atau gaya postmodernisme, yang sebenarnya bukan berakar dari model filsafat dekonstruksi Derrida. Dekonstruktivisme,

Menurut **Collin & Papadakis** sebenarnya berakar dari *Konstruktivisme* Rusia. Dalam model berkarya *Konstruktivisme* yang asli, para artis *Konstruktivisme* mengembangkan bentuk dengan menggali kemungkinan-kemungkinan dari prinsip-prinsip konstruksi permesinan. Dalam proses eksperimen mereka memecah volume bentuk menjadi beberapa komponen, dan mendestruksi elemen-elemen tersebut dengan cara yang rasional, untuk mendapatkan hasil akhir, Strategi Dekonstruktivisme adalah, (Yasraf Amir Piliang. *Hipersemiotika, Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*. Op cit: 129)

### **Membaca Teks Hukum Bersama Jacques Derrida.**

Derrida adalah seorang filosof postmodernisme yang paling teliti. Ia menjadi terkenal setelah Nietzsche meninggal dunia, dan sekaligus ia sebagai pengikut Nietzsche dalam bidang *dekonstruksi*.



Pemikiran Derrida di dasarkan kepada tradisi pemikiran barat serta mengurangi ketergantungan tradisi ini pada logika identitas yang telah lama diturunkan oleh aristoteles, yang menurut Russell terdiri dari (John Lechte. *Lima Puluh Filsuf kontemporer*. 2001:169) hukum identitas, sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Hukum kontradiksi, sesuatu tidak bisa serentak menjadi ada dan tiada. Hukum tiadanya yang berada di tengah, antara ada dan tiada tidak boleh ada apapun juga.

Pada intinya pemikiran Derrida yang dituangkan dalam Dekonstruksi adalah:

- 1) Ia menolak logosentrisme, suatu paham yang mengajarkan bahwa logos (bahasa) khususnya bahasa tertulis sebagai pembawa makna. Karena itu, *logosentrisme* akan berhubungan dengan metafisika kehadiran (*metaphysica of presence*), yang mengatakan bahwa ada sesuatu "kehadiran" dalam bahasa kita. Ia menolak *logosentrisme* yang mencari arti di luar permainan bahasa, jadi ia mencari suatu hal yang transendental
- 2) Ia mengetengahkan teori *dekonstruksi* adalah suatu teori yang berhubungan dengan bahasa yang menggunakan filsafat untuk menolak *logosentrisme*. Ia menolak tradisi filsafat barat untuk mencari dasar di luar (*transendental*) bagi bahasa.
- 3) Ia menolak anggapan kaum realis yang menyatakan bahwa bahasa menunjukan realitas yang sebenarnya sehingga bahasa dapat menyingkap suatu kebenaran yang pasti sebaliknya. Ia beranggapan bahwa bahasa tidak dapat mengungkapkan realitas yang sesungguhnya, karena itu diperlukanlah penafsiran atau Hermeneutika terhadap teks-teks tertulis
- 4) Ia menolak sikap kaum modernis yang terlalu mengedepankan rasio sebagaimana yang dilakukan oleh Kant, dan ia bahkan bertanya apa dasarnya kita menggunakan rasio kita

Pada dasarnya ia menolak memberikan status istimewa apapun kepada filsafat yang selama ini dianggap tukang atur rasio yang paling berkuasa. Selanjutnya derida mengatakan selama ini para filosof bisa meneriakkan berbagai sistem pemikiran yang hanya dengan cara mengabaikan, merepresi dampak-dampak bahasa yang dirasa mengganggu. Dengan dekonstruksi yang menjadi tujuan utama derida

adalah untuk memperlihatkan dengan cara mengabaikan dampak-dampak ini dengan cara melakukan pembacaan kritis yang akan memahami, dan sedapat mungkin menggali, elemen-elemen metafora dan nilai-nilai *figuratif* lain dalam teks-teks filosofis. Inilah letaknya dekonstruksi, yang bekerja sebagai bentuk sisa dari cara-cara di mana bahasa bisa membelokan atau memperumit proyek-proyek para filsuf (Chirtopher Noris. *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. 2003: 57-58)

Dekonstruksi menurut derida adalah untuk menghilangkan ide-ide ilusif yang selama ini menguasai metafisika barat, adalah ide yang mengatakan bahwa rasio bisa lepas dari bahasa dan sampai kepada kebenaran, atau metode murni dan otentik dalam dirinya sendiri tanpa bantuan yang lainnya. meskipun filsafat mencoba menyingkirkan karakter tektual atau tertulisnya, namun tanda-tanda pertempuran tersebut masih tetap terpampang jelas di dalam berbagai metafora dan strategi retorika filsafat lainnya.

Dilihat dari kaca mata filsafat bahwa dorongan untuk melakukan sebuah dekonstruksi adalah tidak hanya untuk menunjukkan bahwa hukum-hukum pemikiran itu tidak lengkap. Akan tetapi kecenderungan yang tampak jelas dalam Derrida adalah untuk membangkitkan pengaruh, untuk membuka wilayah baru dalam dunia filsafat sehingga terus menjadi ajang kreativitas dan penemuan baru. Pada intinya dekonstruksi derrida adalah untuk membongkar bahasa sehari-hari dan dunia akademik.

Pemikiran Derrida memiliki keterkaitan dengan beberapa aliran pemikiran, namun yang paling utama paling tidak ada dua aliran penting yang mendasari pemikiran Derrida. Dua aliran itu adalah *fenomenologi* dan *strukturalisme*. Pengaruh ini terlihat betul dalam tulisan dan karya Derrida berjudul "*La Voix et la Phenomene*" (ucapan dan fenomena). Derrida membantah gagasan bahwa filsafat dapat mengembalikan cara kerjanya ke logika tentang makna yang diambil dari data-datanya tentang kesadaran. Edmund Husserl (1859-1938), pendiri fenomenologi modern, ingin menciptakan metode yang ketat untuk melawan skeptisisme yang mendominasi daratan Eropa pada awal abad ini. Husserl memulai karyanya dengan dua metode, satu positif, dan satu negatif. Metode positif dimaksudkan untuk melepaskan jalan pikiran dari apa saja yang dianggap ideal tetapi tidak berdasarkan diri pada realitas. Menurut Husserl yang terpenting

**Bagian Tujuh**

**Dekonstruksi Makna Kejahatan**  
**Sebuah Kritik Terhadap Logika Deduksi Dalam Hukum**

Simulasi kejahatan adalah kejahatan yang diciptakan atau direkayasa oleh para pihak tertentu, yang lewat teknologi pencitraan (*imagology*) dan teknik narasi (*narrative*), kejahatan tersebut dipresentasikan lewat media tertentu, sehingga realitas kejahatan dan kebenaran (*truth*) di baliknya, seakan-akan seperti yang tampil di dalam media tersebut. Padahal representasi tersebut adalah hasil dari manipulasi media semata.

**Menafsirkan Ulang Fenomena Kejahatan**

Para ahli Sosiologi berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya (Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey. *Principles of Criminology*. 1960: 3-5) Analisis terhadap kondisi-kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu *pertama* yang terdapat hubungan antara variasi kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial di mana kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial di mana kejahatan tersebut terjadi, maka angka-angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dari proses-proses misalnya gerak sosial, persaingan dan penentangan kebudayaan, ideologi, politik, agama, ekonomi. Dengan cara inilah sosiologi memandang arti sebuah kejahatan.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan dari sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan oleh karena itu di mana ada manusia, pasti ada kejahatan "*Crime is eternal-as eternal as society*" (Frank Tannembaum). Masalah ini merupakan suatu masalah yang sangat menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa ini. Maka pengertian kejahatan adalah relatif tak memiliki batas, hal ini pernah dibicarakan oleh G.Peter Hoepnagles. (G.Peter Hoepnagles *The Concept*



of Crime: an Introduction of Comparative Criminology, 1984: 3; Lihat juga dalam Marving E. Wolfgang (et al). *The Sociology of Crime and Delinquency*.1970: 119)

*We have seen that the concept of crime is highly relative in common parlance. The use of the term "crime" in respect of the same behavior differs from moment to moment (time), from group to group (place) and from context to context (situation). To arrive at a scientific concept of crime, we can distinguish between three approaches: (1) We can start with behavior held punishable by the law; then the approach is a legal one and in fact one positive law. (2) We can use a sociological approach and look for criteria for certain kinds of behavior, which criminology will then call crime. Sometimes a distinction as made between these two approaches as the legal and the social approach. This is a misconception: the legal approach is a species of the social one. Two scientific disciplines are involved here the sociological and the legal one from which the criminologist must make a choice for a definition of his concept, or choose a combination of the two. (3) we can combine the first and second approaches and use criteria from both disciplines to arrive at a concept of crime.*

Relativitas kejahatan dan aspek yang terkait di dalamnya tidaklah merupakan konsepsi hukum semata-mata, sekalipun memang legalitas penentuan kejahatan lebih nyata nampak dan dapat dipahami, akan tetapi aspek-aspek hukum diluar itu (*extra legal*) tidaklah mudah untuk ditafsirkan . karena keniscayaan konsep kejahatan yang aneka macam seperti itu sering didengar didalam percakapan sehari-hari, kejahatan dalam artian hukum, sosiologi, dan kombinasi dari semuanya itu. Relativitas jelas akan berpengaruh terhadap penggalan faktor sebab musababnya yang pada gilirannya berpengaruh terhadap metode penanggulangan kriminalitas pada umumnya.

Tentunya relativitas kejahatan memerlukan atau bergantung kepada ruang dan waktu, serta siapa yang menamakan suatu itu adalah kejahatan. "*Misdaad is benoming*" yang berarti tingkah laku didefinisikan sebagai jahat oleh manusia-manusia yang tidak mengkualifikasikan diri sebagai penjahat. (J. E. Sahetapy. *Kapita Selekta Kriminologi*. 1979: 67)

Meskipun kejahatan itu relatif, ada pula perbedaannya antara "*mala in se*" dengan "*mala in prohibita*". Mala in se adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan *Mala in prohibita*, adalah suatu

perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam Undang-undang. Siapakah sebenarnya penjahat itu? Apakah cukup mereka yang dinyatakan melakukan perbuatan yang dilarang dan diberi sanksi hukum yang tercantum dalam pasal undang-undang disebut sebagai penjahat? Dalam KUH-Pidana (kita) tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa penjahat adalah..., dan KUH-Pidana kita tidak menyebutkan siapakah orangnya yang menyandang gelar penjahat. Akan tetapi mereka hanya dicap sebagai penjahat dengan sebutan "*barang siapa*" tentunya menurut penulis penjahat itu merupakan label atau stigma dari undang-undang (Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*. 2004: 5; lihat juga Yesmil & Adang, *Criminologi: Handbook*, 2010)

Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara (Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. 1994: 49)

Maka dengan demikian, kejahatan itu relatif karena aspek-aspek tersebut yang melatar belakangnya. Uraian ini telah menjelaskan bagaimana relativitas kejahatan tersebut. Kemudian dalam bagian ini pun penulis akan menjelaskan apa itu kejahatan.

Studi kejahatan sejak era Lombroso sampai dengan perkembangan studi kejahatan melalui perspektif dan paradigma *Trikotomi* ataupun *dikhotomi* pada tahun 1970-an telah dilaksanakan oleh pakar-pakar kriminologi. Yang kesemuanya telah mengatakan bahwa kejahatan dapat didefinisikan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis adalah *segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana*. Sedangkan secara kriminologi tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kejahatan. Maka disini dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah sebuah perbuatan yang anti sosial merugikan dan serta menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Seperti yang telah diuraikan di muka kejahatan adalah merupakan masalah manusia yang tak henti-hentinya. Karena meskipun telah diterapkan sanksi yang berat, tetap yang namanya kejahatan itu merebah ke segala arah sampai ke titik nadirnya, Terlepas dari permasalahan asal muasal kejahatan atau kausa

kejahatan, di mana ada dua atau lebih manusia yang berkumpul, maka disitu mulailah terjadi penilaian dengan segala akibat serta komplikasinya atas sesuatu perbuatan atau perilaku dalam suatu pergaulan hidup. Dengan kata lain, apa yang dinamakan dengan kejahatan ataupun pembangkangan atau deviance akan selalu dan hanya terdapat dalam suatu pergaulan bersama, kejahatan akan ada dan selalu ada di dalam masyarakat (J.E Sahetapy. *Teori Kriminologi: suatu Pengantar*. 1992: 32-33).

Kejahatan adalah sebagai salah satu permasalahan manusia yang sering terjadi. Dalam sejarah manusia, sulit menentukan kapan saat pertama terjadi kejahatan. Bergantung pada persepsi dan keyakinan, dapatlah dikatakan Adam dan Hawa sudah melakukan kejahatan, karena mereka telah melanggar ketentuan Tuhan, yaitu dengan memakan buah yang dilarang itu. Dalam konteks parable alegorik, ternyata Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Ini kejahatan pertama menurut kitab kejadian (J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologis*, 2005: 1-2)

Manusia berupaya keluar dan menyelesaikan permasalahan kejahatan tersebut, sudah banyak cara dilakukan untuk maksud itu, antara lain dengan membentuk lembaga negara yang menangani kejahatan, badan peradilan, sistem keamanan masyarakat, dan lain-lain. Selain usaha pemberantasan yang terus diupayakan bergerak maju, harus diakui pula bahwa kejahatan (melalui para pelakunya) juga berusaha berbenah diri dan menciptakan ruang-ruang perlindungan agar tetap eksis. Karena demikian, maka manusia atau institusi dituntut selalu melakukan penemuan baru dalam rangka mencari penyelesaian permasalahan kejahatan, perlu upaya pembaharuan. Untuk semuanya itu harus dibangun pemahaman, untuk memahami kejahatan berarti kita mesti berani membuka baju kejahatan, mengamati tubuh kejahatan lalu menyetubuhinya. Untuk melakukan itu diperlukan ilmu-ilmu (*sciences*); ilmu pengamatan, ilmu tafsir, ilmu berfikir dan ilmu merangkai teks sehingga sampai pada suatu pemahaman yang holistik. Pemahaman holistik tentang kejahatan, artinya mengerti, memahami, menjiwai seluruh aspek kejahatan tersebut mulai dari pra kondisi atau sebab-sebab atau stimulus yang merangsang insting kejahatan tersebut menyeruak dari sanubari manusia, permulaan kejahatan, pelaksanaan, bentuk, dampak hingga akhir suatu kejahatan (*the end of crime*)?



Fenomena kejahatan dihidangkan dengan menu lengkap oleh media massa. Begitu bangun pagi, hidangan kejahatan sudah tersedia, menggoda di meja baca keluarga. Koran-koran kriminal, acara televisi khusus menyajikan berita kriminal membuai mata dan pikiran 'penikmat' berita kriminal setiap hari bahkan lima hingga sepuluh kali dalam sehari dihidangkan santapan kejahatan. Para pencari berita (jurnalis) tidak pernah kekurangan bahan untuk diolah menjadi sebuah sajian berita kejahatan, inilah indikasi bahwa dunia ini semakin jahat?

### **Simulation of crime: Upaya Dekonstruksi Terhadap Makna Kejahatan.**

Kejahatan tetap kejahatan, kelihatan atau tidak kelihatan, kerasa atau tidak kerasa, apapun alasannya, sekalipun berlandung dibalik kepentingan 'rakyat', yang namanya kejahatan tetap kejahatan. Masalahnya, media massa hanya menyajikan kejahatan yang terpotret oleh kamera dan yang tergores tinta wartawan, diyakini, itu hanya sebagian kecil saja tema kejahatan yang benar-benar ada dan terjadi. Ada kejahatan yang tidak terekspos atau barangkali tidak boleh diberitakan atau tak terjangkau oleh kelihaiian jurnalis.

Kejahatan yang terakhir ini masuk dalam kategori kejahatan tertentu; tertentu pelakunya atau korbannya, tertentu cara dan metodanya, tertentu lokasi dan perencanaannya. Kejahatan 'tertentu' tersebut diorganisir oleh kekuatan yang tertentu pula. Kejahatan yang disebut terakhir tampil dalam bentuk simulasinya, yaitu simulasi kejahatan (*simulation of crime*). Simulasi kejahatan adalah kejahatan yang diciptakan atau direkayasa oleh para pihak tertentu, yang lewat teknologi pencitraan (*imagology*) dan teknik narasi (*narrative*), kejahatan tersebut dipresentasikan lewat media tertentu, sehingga realitas kejahatan dan kebenaran (*truth*) di baliknya, seakan-akan seperti yang tampil di dalam media tersebut. Padahal representasi tersebut adalah hasil dari manipulasi media semata. (Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas, Realitas kebudayaan dalam era posmetafisika*, 2004: 1)

Kejahatan sebagaimana di atas, disebut juga Poskriminalitas. Menurut Yasraf Amir Piliang salah satu metode penting di dalam poskriminalitas adalah penciptaan simulakra. Simulakra adalah sebuah duplikasi dari duplikasi, yang aslinya tidak pernah ada, sehingga perbedaan antara duplikasi dan asli menjadi kabur. Untuk

menciptakan simulakra diperlukan simulasi, simulasi adalah proses penciptaan bentuk nyata melalui model-model yang tidak mempunyai asal-usul atau referensi realitasnya, sehingga memungkinkan manusia membuat yang supernatural, ilusi, fantasi, khayali menjadi tampak nyata.

Beberapa contoh kejahatan yang sempat terangkum dalam statistik kriminal sederhana dari media massa, antara lain, teror di KBRI Asutralia, pengroyokan, judi jakpot, tawuran, pencabulan, penggusuran, sodomi, perampokan bertopeng, peredaran pose bugil, korupsi, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penyalahgunaan narkotika, mutilasi, dan lain-lain. Intinya, media hanya mampu menyajikan *"kejahatan yang difinitif dalam undang-undang pidana"*. Selain di media, kisah kejahatan juga bisa digauli di kantor polisi, kantor kejaksanaan dan di pengadilan. Lembaga-lembaga itu bersentuhan dengan kejahatan setiap hari.

Di tempat-tempat itu, kadang kejahatan didendangkan dengan jelas, kadang tampil dengan suara merdu tak terdengar, sering kali didramatisasi ala dagelan-pentas seni rekayasa, setelah selesai berdendang, makan siang bersama

Prinsip *Critical legal studies* yang menolak anggapan ahli hukum tradisonal yang mengatakan bahwa hukum itu obyektif, artinya kenyataan adalah tempat berpijaknya hukum, hukum itu sudah tertentu, artinya hukum menyediakan jawaban yang pasti dan dapat di mengerti, hukum itu netral, yakni tidak memihak pada pihak tertentu. (Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, 2003: 6)

Ha;l di atas, berarti bahwa Harus diakui bahwa selama ini institusi hukum kita baik itu kepolisian, kejaksanaan, kehakiman dan lembaga advokat, semuanya mengungkap kejahatan dalam jeratan formalisme dogmatika hukum. Bekerja profesional memenuhi prosedur dan formalitas belaka, Usaha demikian, sebenarnya *"mematikan kreatifitas"* dan membatasi lingkup cakrawala pikiran manusia yang sejatinya luas tanpa batas, karena hukum hanya dimaknai sebagai mesin usang tak terawat dan karatan, terongok di dalam pabrik dengan operasi monoton dan mekanistik (begitu saja) yang sering kali membuat gemas pikiran yang telah terbebas dari jerat positivisme, asal prosedur dan formalitas terpenuhi maka pekerjaannya sudah dianggap benar dan baik. Bekerja demikian

adalah bekerja untuk memenuhi egoitas semata, bukan untuk sebuah esensi kebenaran yang bukan sekedar fakta, karena kebenaran yang sebenarnya bukanlah permasalahan fakta, melainkan kebenaran makna dan keberartian realitas. Karenanya bekerja demikian benar-benar menutup mata nurani rapat-rapat, bahkan dalam persidangan, dalam usaha mencari keadilan, mata para penegak hukum juga terpejam rapat, kalau tidak ngantuk atau malas, dipastikan mereka menderita degradasi moral atau berada di persimpangan, dalam keadaan *antara*, berdiri diatas batas. Akibatnya, bekerja demikian hanya akan melihat apa yang sudah nyata-nyata terlihat dan tidak akan pernah mampu menerawang hingga menembus pada kedalaman perasaan sosial yang sungguh-sungguh melatari suatu fenomena kejahatan. Institusi hukum hanya mengungkap (secara formal) kejahatan yang tampak terang dan jelas *criminal definitive*. Dengan demikian, ada (banyak) kejahatan yang sungguh kejahatan namun tidak pernah terungkap. Terlihatpun, terjamahpun tidak, mustahil bisa terungkap.

### **Dan Ternyata Undang-Undang Menyimpan banyak Tabir Kejahatan.**

Apa itu kejahatan? jawabannya (selama ini) selalu mengarah kepada pandangan bahwa, kejahatan merupakan produk kultural maupun *biologik*. Meski jawaban ini bukan jawaban yang memuaskan, kebanyakan ahli hukum dan sebagian besar kriminolog sependapat dengan pandangan tersebut. Seseorang jahat karena undang-undang menyebutnya penjahat. Jahat karena miskin, jahat karena bodoh, jahat karena memang sudah jahat, adalah pandangan yang substansinya sama dengan pendapat di atas. Begitu banyak label jahat yang dengan mudah dilekatkan kepada perbuatan tertentu yang oleh aturan disebut sebagai kejahatan, contohnya saja pencurian, perkosaan, perampokan dan penipuan. Kualifikasi perbuatan itu jelas dan terpatok, sehingga untuk melihat apakah perbuatan tersebut jahat atau tidak cocokan saja unsur-unsur yang ada dalam aturan tersebut. Namun tidak demikian apabila sebuah perbuatan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan tertentu dengan dalih aturan yang mendukung. Perbuatan itu menjadi sulit untuk dikualifikasikan sebagai sebuah kejahatan, meskipun perbuatan tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian moril maupun materiil. Hal demikian itu di pandang lumrah



(paling tidak menurut sebagian orang) karena aturan biasanya menunjuk kepada orang lain, bukan terhadap penegak hukum atau pembuat aturan. Memukul pedagang kaki lima atas nama hukum dan ketertiban, menganiaya pencuri untuk memperoleh pengakuan, memanipulasi bukti untuk memenangkan perkara, membunuh demi keamanan dan banyak lagi model lain yang serupa. ini disebut '*false sense of normalcy*', perbuatan yang salah namun dianggap normal. Kita dapat menyebut pandangan ini sebagai pandangan klasik dan positivistik terhadap kejahatan

Kriminailitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan); juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa maupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar; yaitu dipikirkan direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar; misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi. Obsesi atau obsesio adalah pikiran yang tidak bisa dilenyapkan, gambaran paksaan, seolah-olah dikejar-kejar oleh hantu jahat. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali, misalnya harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Kejahatan seperti itu biasa, tapi ada yang lebih luar biasa, saya katakan Undang-undang menjadi jahat, karena di dalamnya ada penekanan terhadap masyarakat lemah, dan dengan demikian, Kejahatan sempurna akan selalu menyelip dalam tubuh batang serta pasal sebuah Undang-undang, apa itu benar kita akan lihat bagaimana logika ini didekonstruksi oleh penafsiran yang lebih dalam.

Undang-undang dengan perundang-undangan memiliki dua kata atau memiliki arti yang berbeda, namun secara substansi tidaklah terlalu prinsipil. Kajian terhadap masalah ini tidak sesederhana seperti sering dipahamkan mengenai arti tersebut. Perundang-undangan (undang-undang) tidak dapat dipahami hanya dengan melihat peruntukan atau proses pembuatan atau sebagai suatu perangkat aturan yang berisi perintah, larangan dan sanksi-sanksi tertentu. Dalam wahana (ilmu) hukum polemik ini dapat dijelaskan secara gamblang, bukan menyangkut apakah undang-undang itu

**Bagian Delapan:**  
**Logika Hukum; Sebuah Wilayah Untuk Terus di**  
**Tafsirkan**

Nalar hukum kita, yang sudah membudaya, mendarah  
dagaing dengan para ilmuwan, aparat penegak hukum,  
para pengacara, hakim, jaksa, dan polisi, adalah Nalar  
dangkal, yang terpaku pada Nalar Positivistik (Penulis,  
2011)

**Tidak Sekedar Logika Induktif-Deduktif**

Nalar kita terbatas, kekuasaan Tuhan lebih besar, dan kehidupan (baik hukum; ekonomi atau yang lainnya) tidak hanya sekedar diuraikan, tidak hanya sekedar dijelajahi oleh logika baik deduktif maupun Indiktif. katanya logika deduktif adalah logika sempurna, namun ada yang tidak bisa terjangkau oleh logika ini, kedalam hati, kesungguhan niat.

Lalu bagaimana nalar kita yang sesungguhnya? Bagaimana nalar kita saat ini? Pandangan Barat tentang nalar khususnya pandangan modern (*positivistik; positivisme*) seringkali bersifat *opposite binary*, misalnya menempatkan peran nalar sebagai sesuatu yang *superior* yaitu menyangkut hal bersifat ilmiah melalui bukti-bukti sains (*induktif & deduktif*) dan menganggap takhyul (perdukunan, *Voodoo*) sebagai sesuatu yang tidak ilmiah artinya tidak bernalar.

Pandangan demikian dalam era post-modernis jelas-jelas ditentang, salah satu yang paling keras dikemukakan oleh seorang filsuf sekaligus penghibur (*entertainer*) **Paul Feyerabend**, dengan teorinya yang dikenal sebagai *teori anarkhis* atau '*anti foundationalis*'. **Feyerabend** menjelaskan bahwa tidak ada ukuran untuk menuju kesana (kearifan ilmiah dan sihir atau perdukunan), menurutnya "ilmu tidak harus selalu berjalan melalui hukum-hukum universal yang mapan dengan mengorbankankemanusiaan semua metodologi ilmu mempunyai keterbasan. satu-satunya yang *survive* adalah "apa saja boleh". Gagasan Feyerabend ini telah membawa kita kepada pemahaman tentang "*Pluralisme kebenaran dalam ilmu dan metodologi*", bahkan Einstein menyatakan bukan semata-mata logika (nalar) semata untuk sampai kepada pemahaman semesta tetapi diperlukan pula *semacam kecintaan yang mendalam..*

Batas nalar, ya....itulah ungkapan yang patut kita ungkapan, karena nalar kita ini sesungguhnya terbatas. Seberapa hebat daya kerja nalar? Donald B. Calne dalam bukunya berjudul "Batas Nalar" diterjemahkan dari judul aslinya "*Within Reason*"; *Rationality and Human Behaviour*" (Donald B. Calne, *Batas Nalar; Rasionalitas dan Perilaku Manusia*. 2004: 5-10) mencoba memberikan penjelasan, bahwa menurutnya "nalar hanyalah piranti yang berevolusi melalui seleksi alam selama jutaan tahun; ia merupakan *fasilitator* dan bukan *inisiator*; kita menggunakan nalar untuk memperoleh yang kita mau bukan menentukan apa yang kita mau. Menurutnnya nalar hanyalah piranti (alat), sebagaimana matematika, atau bahasa juga adalah alat.

Menurut Calne nalar diakui sebagai piranti luar biasa, namun apa yang dapat dicapai oleh nalar sangatlah terbatas. Nalar hanyalah sebuah produk biologis yang lambat laun terbentuk berkat proses evolusi. Nalar terbatas kepada melayani bukan menentukan kebijakan. Kekuatan nalar betul-betul merupakan kemampuan manusia yang nyata, jelas, dan tidak boleh tidak bekerja dalam hampir semua bidang kehidupan, tetapi nalar tidak dapat memberi atau mengendalikan tujuan-tujuan yang terkait dengannya. Menurut Donald B. Calne Sejauh ini nalar selalu ditampilkan sebagai kekuatan paripurna, luhur, lengkap dengan misi suci.

Uraian singkat ini, ingin menguraikan bahwa tidak sekedar logika deduktif atau induksi yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga logika nurani. logika yang mementingkan banyak orang. Jika ada aorang yang tertindak oleh pemerintah, jika ada terdakwa yang yang mendapatkan kesalahan putusan hakim, maka apa yang harus dilakukan, kedua logika tersebut\*tidak dapat menjawab, tentunya hati nurani akan selalu berbicara.

memang benar, nalar kita terbatas, dan logika (deduktif-Induktif) tidak bisa menjawab realitas, karena inilah yang kita kenal dengan krisis makna. Dengan terbatasnya nalar kita, maka pencarian akan makna merupakan motivasi penting dalam hidup kita. pencarian inilah yang menjadikan kita sebagai mahluk spiritual.

## Hukum:

### Mengedepankan Logika Tertutup

Di muka telah kita bicarakan tentang aplikasi logika terhadap hukum, ternyata dalam Penemuan hukum (penalaran hukum), bersifat



terbuka hanya berlaku bagi sistem hukum perdata (*open systeem van het recht*), sebagaimana yang dinyatakan oleh Paul Scholten (A. Pitlo. *Het Systeem van Het Nederlands Privaatrecht*. (Terjemahan: Sudikno). Op cit: 49-dst) sifatnya terbuka, karena sistem hukum perdata membutuhkan putusan-putusan atau penetapan yang senantiasa menambah luasnya sistem hukum tersebut. Maka dengan demikian, bidang hukum perdata dapat memberikan kesempatan yang lebih lapang bagi para *functionaris* hukum (khususnya hakim) untuk memberikan penemuan-penemuan hukum (*rechtsvinding*). Keleluasaan hakim, dalam sistem hukum ini dibolekannya dalam menggunakan *metode konstruksi hukum*. Metode konstruksi hukum akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan dengan kekosongan hukum (atau kekosongan UU). Karena pada prinsipnya, hakim tidak boleh meniadak perkara yang diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya, melalui metode konstruksi hukum, hakim harus terus menggali hukum dan menemukannya dalam realitas kemasyarakatan.

Ada yang mengatakan bahwa metode *konstruksi* hukum tidaklain adalah metode *argumentasi* hukum yang telah penulis paparkan di atas, ahli yang berpihak kepada kubu ini adalah misalnya: E. Utrecht & Moh Saleh Djindang ia mengatakan dengan perantara konstruksi maka hakim dapat menautkan, atau dapat mempersatukan (*naar elkaar toetrekken*) dari sistem formil dari hukum dengan sistem materiil dari hukum. Akan tetapi apabila sistem formil dan sistem materiil telah berbeda, maka menautkan itu tidak bisa lagi, dalam hal demikian UU tidak mengikat. Dalam sistem formil tidak ada pertentangan karena sistem hukum merupakan perwujudan dari sebuah kesatuan yang logis. Apabila hakim akan mengisinya suatu ruang yang kosong dalam sistem hukum, pengisian tambahan itu tidak boleh bertentangan dengan asas pokok dari sistem tersebut, maka dengan demikian, apabila hakim melakukan *konstruksi* hukum dalam rangka menemukan hukum, ia harus menggunakan akalanya. Karena itu, dapat dikatakan, bahwa melakukan konstruksi hukum adalah pekerjaan dengan akal, atau merupakan proses berpikir dari hakim.

Selanjutnya Utrecht menyebutkan metode konstruksi hukum adalah dengan menggunakan *analogi*; *menghaluskan hukum* (*penyempitan hukum*); serta *metode argumentum a contrario*. Cara berpikir Utrecht yang membagi *metode konstruksi hukum* atau mengartikan konstruksi hukum

tidak lain adalah metode argumentasi hukum, kemudian di ikuti oleh **Yudha Bhakti Ardhiwisastra**. Dalam bukunya, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*.

Akan tetapi lain halnya dengan hukum pidana, metode konstruksi atau argumentasi ini dilarang penggunaannya dalam praktek hukum pidana. Jadi sistem hukum pidana adalah bersifat tertutup. Penjelasannya, kita lihat sebagai berikut: Argumentasi yang berlandaskan kepada penggunaan analogi (*metode argumentasi*) adalah suatu cara untuk memenuhi syarat koherensi. Yang berkenaan dengan suatu aturan yang dalam asasnya tidak dapat diterapkan pada suatu kejadian konkret (*peristiwa konkret*), dapat dilakukan penalaran bahwa fakta-fakta dari kejadian yang bersangkutan itu serupa dengan kejadian yang biasanya terliputi, sehingga penerapannya dapat dipandang masuk akal, selain itu juga secara analogi peristiwa konkret itu dapat dinalar bahwa asas hukum yang melandasai aturan hukum yang bersangkutan juga dapat diterapkan pada kejadian konkret sama seperti pada kejadian yang biasanya termasuk ke dalam wilayah cakupan aturan tersebut. (A. Potier. *Penemuan Hukum*. Terjemahan Arief Sidharta. 2004: 84-85)

Metodologi ini berarti kegiatan memperluas suatu aturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkupnya, yang kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan apa yang dimaksudkan dalam sebuah aturan hukum, (*Analogi: disamakan*). Jadi metode ini, mengharuskan hakim untuk mencari hal yang esensial bersifat umum dari sebuah peristiwa konkret atau perbuatan hukum yang telah diatur oleh UU.

Analogi hukum, memberikan sebuah penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberikan kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan aturan tersebut, dan sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa hukum yang sebenarnya tidak dimasukan ke dalam aturan hukum, kemudian lewat analogi dapat dianggap sebagai peristiwa hukum. Ini berarti bahwa analogi merupakan suatu metode penemuan hukum yang sekaligus merupakan penciptaan hukum yang baru. Kalau demikian adanya, analogi dapat diidentifikasi sebagai *interpretasi ekstensif*, karena memperluas pengertian hukum.

Menurut Zevenberger, analogi dapat digunakan apabila hakim menghadapi peristiwa-peristiwa konkret yang mirip dengan apa yang



dirumuskan oleh peraturan hukum, tidak hanya mirip juga kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama. Sikap hakim dalam melakukan penalaran analogi adalah harus menyamakan dengan pembentuk UU yang mengetahui adanya kekosongan hukum, yang akan melengkapinya dengan peraturan-peraturan yang serupa seperti yang dibuatnya untuk peristiwa-peristiwa yang telah ada aturannya.

Metode analogi ini merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam perkara perdata, akan tetapi menimbulkan polemik tersendiri bagi perkara pidana. Jelas ini membingungkan kita, sebab hukum pidana membolehkan *interpretasi ekstensif*. Penggunaan analogi dalam hukum pidana, dapat disimpulkan terdapat dua aturan antara bolehnya digunakan analogi dan tidak bolehnya digunakan analogi.

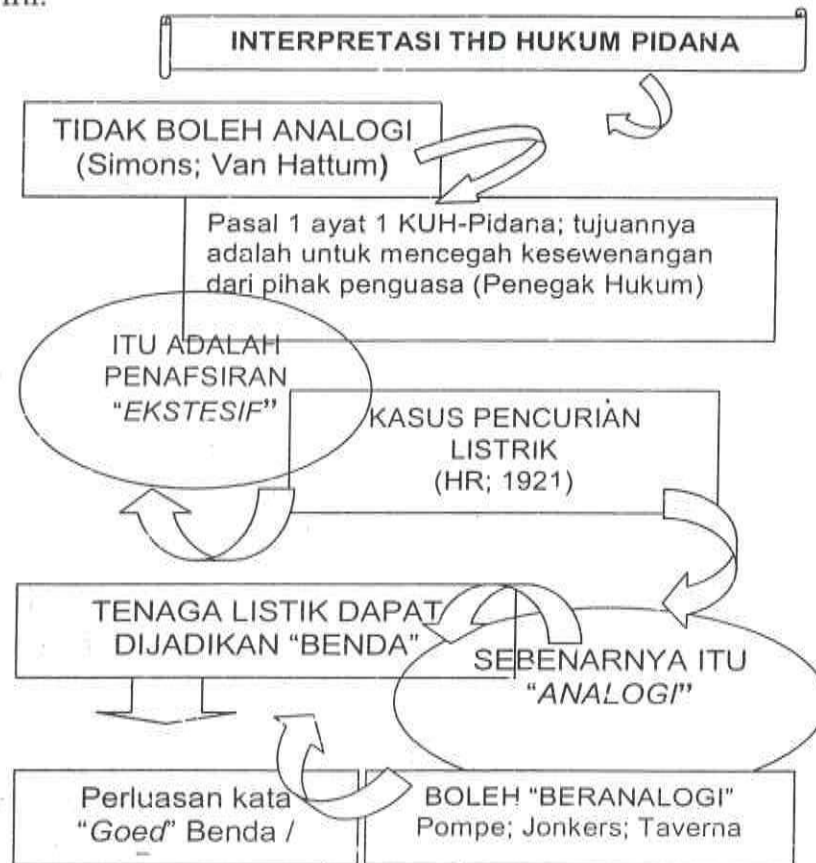
Suatu alasan yang pasti, bahwa hukum pidana dilarang menggunakan analogi tetapi boleh melakukan *interpretasi ekstensif*, karena analogi tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Alasan yang paling utama adalah, agar ketidak pastian hukum dalam masyarakat tidak terlalu besar (P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. 1997: 75-75)

kita tahu bahwa Pasal 1 ayat 1 KUH-Pidana berbunyi *tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*. Pasal 1 ayat 1 KUH-Pidana tersebut, lebih dikenal dengan azas legalitas, dalam bahasa latin Pasal 1 itu berbunyi. "*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Pasal ini berarti bahwa hanya UU yang dapat menentukan sanksi pidana; dan ketentuan sanksi pidana itu tidak boleh berlaku surut.

Tidak bolehnya melakukan analogi dalam hukum pidana, sudah sejak semula sudah dirumuskan, Pasal 1 ayat 1 KUH-Pidana tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan terhadap kesewenangan pengadilan, jika dibolehkan penggunaan analogi maka kesewenangan dari penguasa akan menjadi lebih besar. Argumen inilah yang keluar dari mereka yang tidak menyetujinya (Simons; Van Hattum). Bagi mereka yang tidak setuju dilakukannya analogi dalam hukum pidana, menyatakan bahwa pada saat tenaga listik dapat dikategorikan sebuah benda, dan perbuatan mengambil tidak harus dilakukan dengan memindahkan secara pisik, mereka menyatakan bahwa itu bukan analogi, akan tetapi sebagai *interpretasi ekstensif*



(memperluas). Akan tetapi menurut **Pompe** (orang yang setuju), kegiatan itu tidak lain adalah analogi. Perhatikanlah bagan di bawah ini:



Dari bagan di atas, terlihat perbedaan antara *Analogi* dengan *ekstensif* sangat tipis. Namun keduanya mempunyai persamaan bahwa sama-sama memperluas keberlakuan dari aturan hukum; keduanya masih tetap berpegang kepada sebuah bunyi aturan hukum; dasar kedua penafsiran ini adalah menemukan norma yang lebih tinggi (*lebih umum dan lebih abstrak*) dari norma yang tersedia, dan kemudian melahirkan atau memperluas aturan yang ada.

Perbedaannya, kalau pada *interpretasi ekstensif*, penalarannya masih berpegang kepada aturan yang ada. Dan aturan tersebut, kita harus beri makna sesuai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. sementara pada *analogi*, peristiwa yang menjadi persoalan (*peristiwa konkret*) tidak dapat dimasukkan ke dalam aturan yang ada, meskipun diyakini bahwa peristiwa itu seharusnya juga diatur atau dijadikan

sebagai peristiwa hukum, itulah sebabnya bahwa jika melakukan analogi terhadap hukum pidana, akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 KUH-Pidana.

Dalam perkembangan kejahatan, Pasal ini jelas tidak bisa menjerat pelaku tindak pidana yang semakin canggih, terutama yang memakai cara-cara teknologi komputer yang tengah berkembang saat ini. Namun bukan itu yang akan kita bahas. Sebelumnya terlebih dahulu kita mengetahui bahwa upaya penanggulangan hukum pidana adalah merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun hukum pidana, masih digunakan dan diandalkan sebagai sarana politik kriminal, bahkan pada akhir-akhir ini-akhir ini kebanyakan perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub tentang “ketentuan pidana”. Ini adalah menjadi satu bukti nyata, bahwa hukum pidana masih terus digunakan sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) ternyata juga telah memberi banyak kemudahan bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya. Dari perspektif hukum pidana muncul masalah *apakah norma-norma hukum pidana yang berlaku mampu untuk mengikuti perkembangan iptek, termasuk pemanfaatan iptek dalam melakukan kejahatan korporasi misalnya. Persoalan ini muncul karena pelakunya lolos dari tuduhan serta tidak dipidana*. Bukan karena kejahatan ini rumit untuk ditangkap, akan tetapi karena hukumnya yang tidak mampu untuk menjangkau kejahatan seperti ini. Bayangkan saja Sistem Hukum Pidana kita yang sudah 57 tahun itu adalah merupakan warisan *kolonialisme* belanda, semuanya menitikberatkan pada tindak pidana yang *konvensional*. Maka kejahatan bisnis atau Kejahatan komputer (misalnya) yang sifatnya masih baru, ada keterbatasan hukum pidana tersendiri dalam menanggulangnya. Bagaimana dengan korupsi, yang jelas-jelas itu adalah perilaku.

Kita dapat melihat walaupun penggunaan sanksi pidana yang sudah tua tersebut, dan selalu dicantumkan dalam setiap peraturan perundang-undangan. Namun dalam konteks praktis kita sudah bisa menyaksikan bahwa peran hukum pidana tersebut tidak selamanya berhasil dan dipandang sebagai satu-satunya instrumen hukum yang dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan dari penggunaan hukum pidana sering juga menimbulkan masalah yang baru atau konflik sosial yang berkepanjangan. Di sini memperlihatkan

bahwa hukum pidana mempunyai keterbatasan, seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas.

Sehingga dari *perspektif* (sudut pandang) hukum pidana, kejahatan-kejahatan tersebut menimbulkan masalah yang sangat besar apakah hukum pidana kita (Indonesia) telah mampu mengantisipasi munculnya kejahatan tersebut, yang sangat beraneka ragam. Dengan kata lain apakah Undang-undang pidana kita mampu menjerat pelaku tindak pidana tersebut. Lain lagi masalahnya dengan hukum acara pidana, memang perhatian terhadap korban mulai dikedepankan sejak berlakunya kitab undang-Undang Hukum acara Pidana (UU No 8 Tahun 1981). Namun dalam prakteknya ketentuan seperti ini masih harus diuji dalam praktik peradilan kita. Misalnya dalam kasus-kasus konsumen yang biasanya menyangkut kebiasaan yang sangat luas bagi masyarakat konsumen, perhatian dari aparat penegak hukum bagi konsumen masih dirasakan kurang, apakah perilaku ini bukan sebuah tindak korupsi?. Coba kita perhatikan pada promosi dan iklan yang secara spesifik memuat janji untuk menjual barang dalam jumlah tertentu atau secara spesifik memuat janji untuk menjual barang dengan cara tertentu merupakan suatu penawaran promosi dan iklan. Di Inggris iklan ini bukanlah suatu penawaran, melainkan suatu undangan untuk berunding dalam kaitannya dengan jual beli barang dan jasa. Bayangkan berapa banyak konsumen yang menjadi korban dari kegiatan iklan dan promosi ini. Korupsi, dalam kegiatan seperti ini bisa terjadi. Jadi mengapa kita berlarut-larut memikirkan azas legalitas, kenapa kita tidak menerobosnya dengan sesuatu yang beda.

*Perspektif* hukum pidana, pada masalah kejahatan tersebut mengandung dua makna pertama sebagai *ultimum remedium*. Akan tetapi pada perspektif ini, telah dijelaskan di atas, pidana itu tidak mampu untuk menyelesaikan masalah, ia malah memperewut masalah. Kedua merupakan *primum remedium*. Karena perspektif *primum remedium* akan berlaku jika. Korbannya sangat besar, terdakwaanya *recedivist*, dan kerugiannya tak dapat dipulihkan. Maka sejalan dengan pendapat itu, masalah kejahatan bisnis (misalnya) dapat dibenarkan jika perspektif hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium* ini tetap digunakan. Karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang sifatnya khusus dan memerlukan cara yang luar biasa untuk mencegah dan mengatasinya. Dalam hal ini penggunaan hukum pidana sebagai sarana yang bersifat *primum remedium* bukan suatu



**Bagian Sembilan**  
**Dialektika antara Logika**  
**Dengan Kecerdasan Pendidikan Hukum**  
**(Langkah awal dalam Pemahaman Logika Selanjutnya)**

Orang-orang modern melakukan aktivitasnya bukan karena aktivitas itu bermakna, tetapi karena dipaksa oleh sistem yang ada di luarnya, karena kewajiban, atau karena "terpaksa" bertahan hidup. Inilah abadinya orang modern yang kehilangan makan. (Penulis)

**Kecerdasan Yang direncanakan.**

Seorang mahasiswa fakultas Hukum, sudah dicetak sedemikian rupa dalam menggunakan logikanya, ia dituntut untuk selalu berpikir deduktif. Mata kuliah logika, di fakultas Hukum itu diberikan pada semester I dan ada juga Fakultas Hukum yang memberikan di semester II. logika, yang diajarkan hanya terbatas kepada logika dalam bentuk silogisme, dalam bentuk yang sederhana dapat dicontohkan, jika A melanggar Pasal 362 KUH-Pidana, maka A akan dihukum. inilah bentuk logikanya.

Tidak salah memang, karena logika semacam ini adalah suatu kebutuhan untuk kepentingan mereka saat lulus nanti, dan bekerja pada bidang hukum. dan ini, merupakan Warisan Kolonialisme Belanda terhadap pendidikan hukum, adalah penggunaan *optik preskriptif*. Dengan optik ini, hukum dilihatnya sebagai suatu sarana yang harus dijalankan. Lembaga pendidikan hukum yang menggunakan optik ini akan senantiasa mengajarkan kepada mahasiswanya keterampilan tentang bagaimana menguasai sarana itu dan bagaimana pula menggunakannya. Hal ini berarti bahwa pendidikan hukum kita tidak mendidik mereka untuk benar-benar dan sistematis mengkaji hukum sebagai suatu sarana pengaturan dalam masyarakat, melainkan hanya tentang bagaimana menjalankan hukum itu dengan benar. Secara singkat Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo. *Manfaat Telaah Ilmu sosial Terhadap Hukum*. 1980; 4) mengatakan, bahwa Pendidikan hukum warisan kolonialisme tersebut hanyalah "Keterampilan tukang" (*Craftsmanship*).

Dalam optik preskriptif tersebut, pendidikan hukum, di negara-negara dengan tradisi hukum Barat atau tradisi hukum eropa. Pelajaran hukumnya senantiasa untuk disampaikan kepada peserta

didik dalam bentuk suatu kumpulan kasus atau perkara berikut peraturan perundang-undangnya. Mereka (Mahasiswa) terus di dorong untuk mempelajari dan menerapkan hukum begitu saja secara lugas, rasional, serta objektif tanpa mempertanyakan lebih jauh. Ketentuan-ketentuan yang diajarkan senantiasa berada pada jalur-jalur, yang sudah digariskan oleh undang-undang. Dalam hukum pidana hal ini sangat kentara sekali, para mahasiswa hukum pidana hari-harinya diajarkan "mana aturanya"? perbuatan itu bukan perbuatan yang di larang, karena UU belum mengaturnya. Inilah sebagian warisan dari jaman Jajahan belanda.

Dalam pendidikan hukum seperti itu (khususnya dalam pengajaran hukum pidana), Mahasiswa memang cenderung menganggap diri mereka sendiri objektif, oleh karenanya mereka sangat jarang diminta untuk mempertimbangkan dampak lebih lanjut dari materi hukum yang tengah mereka geluti. Upaya apapun yang dilakukan untuk lebih memahami konsekuensi manusiawi dari hukum segera saja dipandang sebagai sia-sia belaka. Mereka, tentu saja tidak punya urusan dengan adil atau tidak adil terhadap kasus yang mereka bongkar, akan tetapi apa hukumnya (apa UU, Pasal berapa) yang cocok untuk kasus seperti ini.

Penggunaan optik *preskriptif* yang dominan dalam dunia pendidikan hukum di kita, berimplikasi pada kurang membantu dan mendorong mahasiswa untuk menghadapi hukum secara kritis dan juga kreatif. Oleh karena pendidikan hukum yang berorientasi pada optik *preskriptif* itulah, maka *out put* yang dihasilkannya pada akhirnya membentuk alam mereka, terutama adalah: Peraturan apakah yang harus dipakai dalam suatu kasus tertentu;\* Bagaimanakah teknik penerapannya.

Keadaan demikian mengandung resiko terjadinya semacam penyempitan, bahwa mereka tidak bisa menggunakan daya pikir kritis mereka untuk membedah hukum tersebut. Pada dasarnya pendidikan hukum yang tengah digeluti oleh berbagai Fakultas-Fakultas hukum di Indonesia, masih berorientasi kepada penguasaan hukum positif, hal ini sangat terasa sekali pada pendidikan hukum tingkat satu (S1). Pengajaran hukum seperti inilah yang kurang mampu untuk melihat hukum dari masyarakat yang sebenarnya. Karena mereka dibentuk untuk menjadi seorang *profesional*, bukan seorang yang menemukan hukum dalam masyarakat. Jelas paradigma pendidikan hukum di

Indonesia tampaknya masih didominasi oleh penggambaran mengenai kebenaran Profesional atau kebenaran formal yang tertuang dalam undang-undang daripada penguasaan kebenaran ilmiah.

Dari hal tersebut, kita dapat merasakan cara pandang *positivistik* dalam hukum (*positivisme* hukum) begitu mengedepan dan tampak terasa kuat di Fakultas Hukum. Hal inilah menurut Esmi Warassih (Esmi Warassih. *Sosiologi Hukum Yang Kontemplatif*. 2006) merupakan salah satu sebab sulitnya untuk melakukan pembaharuan dalam sistem hukum. Produk-produk hukum yang lahir begitu banyak membelenggu kehidupan bermasyarakat sehingga keadilan dan kemanfaatan serta kedamaian sulit untuk terwujud. Pendidikan hukum seperti inilah menurut **Richard A Posner** (Richard A Postner. *Frontiers of Legal Theory* 2001) hanyalah untuk melahirkan *effective lawyer* yang memiliki keterampilan litigasi dan negosiasi. Sehingga pada saat mereka terjun ke masyarakat, mereka mempunyai orientasi kepada klien dan kurang memperhatikan aspek non-hukum. Bahkan **Max Weber** menyatakan bahwa hukum cenderung untuk "*Getting thing done*" dan mengabaikan akan penderitaan masyarakat tertindas. Hal tersebut sudah pernah dilontarkan oleh *international legal center* pada tahun 1975 bahwa pendidikan hukum hanya memberikan pengetahuan tentang hukum sebagai seperangkat aturan-aturan normatif dan memberikan kemampuan menginterpretasikan.

Dalam pengajaran Ilmu Hukum Pidana, fakultas-fakultas hukum lebih menekankan terhadap ilmu hukum pidana positif, yang pada umumnya lebih banyak di berikan dalam program strata satu (S1). Terlebih lagi sasaran pendidikan tinggi hukum pada program S-1 yang digariskan oleh Konsorium Ilmu Hukum (KIH), adalah "Keahlian & Kemahiran profesional sebagai sarjana hukum". Pendidikan hukum pada tingkat tingkat S1 lebih diharapkan sebagai "*professional law school*" yang berbeda dengan S2 apalagi S3. dengan berorientasi pada kebutuhan praktis, maka kemahiran yang lebih ditekankan pada program S1 bukan pada kemahiran teoritis akademis atau kemampuan berpikir kritis ilmiah (*critical academic thinking*) seperti pada program S2 dan S3. kemahiran S1 selalu ditekankan pada kemahiran praktis dalam menguasai hukum positif untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum. Maka oleh karena itu pengetahuan hukum S1 lebih ditekankan kepada "pengetahuan hukum substantif" (*substantive legal knowledge*); jadi seperti yang telah disinggung di atas, ilmu hukum di



S1 ini lebih kepada penguasaan hukum positif yang berlaku dan terbatas pada teori-teori atau doktrin hukum yang terkait langsung dengan norma atau isi (substansi) hukum yang bersangkutan. Bertolak dari hal tersebut, maka di bidang hukum pidana materil lebih ditekankan atau lebih berorientasi kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perundang-undangan khususnya di luar KUHP. selanjutnya di bidang hukum formil hukum pidana lebih di tekankan terhadap hukum acara pidana, jadi selain pengajarannya yang *positif* proses dari penegakan hukum itu juga, yang dinamakan dengan *Criminal justice system*, adalah lebih berorientasi kepada ilmu hukum positif.

Dari pengajaran ilmu hukum pidana yang positif ini, maka pengajarannya lebih berorientasi kepada KUHP (*WvS*). Menurut **Barda Nawai Arief** (*Beberapa Apek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. 1996: 102) merupakan suatu keprihatinan tersendiri (dalam Fakultas Hukum). Keprihatinan di sini bersifat *dogmatis* dan *substansial*. Dengan mengajarkan KUHP (*WvS*) warisan belanda tersebut, secara langsung atau tidak langsung berarti mengajarkan dan menanamkan pula dogma-dogma, ajaran-ajaran, prinsip atau asas dan konsep pola pikir norma-norma substantif yang dituangkan secara *eksplicit* di dalam KUHP maupun yang terkandung secara *implisit* di dalam pemikiran, konsep dan paham yang melatar belakangi terbentuknya KUHP, sebagaimana dimaklumi, KUHP dilatar belakangi pemikiran dan paham *Individualisme-Liberalisme* dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik, walaupun ada juga pengaruh aliran Neo Klasik.

Subtansi (isi) dari pengajaran hukum pidana inilah yang menjadi permasalahan dalam penegakan hukum (Praktek Hukum). Kekhawatiran inilah yang patut kita waspadai atau kita curigai, dan kurang bijaksanaan dari pengajar hukum pidana di dalam menyampiakan dogma-dogma dan subtansi yang terdapat dalam KUHP, akan menghasilkan *output* yang terlalu kaku karena ia bersifat *dogmatis*. Hal ini, menurut **Barda Nawawati Arief** (*Ibid*), seperti juga yang telah dikatakan oleh **Esmi Warassih** diatas, akan menghambat kepada tujuan penegakan hukum maupun ide pembaharuan hukum pidana. Selanjutnya ia mengatakan, bahwa keresahan dan keprihatinan masyarakat terhadap penegakan hukum pidana serta kekuranglancaran proses pembaharuan hukum pidana di Indonesia

selama ini, tidak mustahil bermuara juga pada kekurangberhasilan atau kekurangbijaksanaan para pengajar hukum pidana dalam menyampaikan Ilmu Hukum Pidana Positif.

Sulit kiranya untuk mengadakan pengembangan hukum atau pembaharuan hukum pidana kalau pendidikan hukum SI yang diajarkan pada pola *positivistik*. Demikian pula dengan ilmu, teori hukum yang *positivistik* yang lebih ditekankan pada pengetahuan yang langsung berhubungan dengan hukum positif, kebiasaan menerima, memahami dan menerapkan peraturan. ini tentunya akan sulit untuk dijadikan pengembangan dalam ilmu atau teori hukum pidana. Secara logis kita dapat menarik sebuah kesimpulan: karena lulusan SI langsung terjun kemasyarakat, maka dengan sendirinya mereka akan tahu kenyataan yang sebenarnya. Seperti apa masyarakat itu, bagaimana hukum yang hidup itu, apakah masyarakat menginginkan adanya model lain dalam hukum. Tentunya dari merekalah sangat diharapkan adanya perubahan dalam cara memandang hukum. Karena yang diajarkan hanya “Hukum dan Kekuasaan”, hanya bagaimana menerapkan hukum dalam kasus-kasus tertentu, maka mereka akan kesulitan di dalam memahami perubahan dalam masyarakat yang sedang terjadi. Padahal merekalah yang selalu aktif menyaksikan perubahan karena mereka langsung terjun dalam kenyataan. Tentunya ini menjadi masalah besar dalam pengkajian Ilmu Hukum Pidana Indonesia selama ini.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan hukum di Indonesia selama ini, terlalu menekankan terhadap arti pentingnya penguasaan hukum positif, yang mempunyai paradigma *positivistik*. Padahal hanya dengan menggunakan pemahaman hukum secara *legalistik positivistis* dan berbasis peraturan (*rule bound*) tidak mampu untuk menangkap kebenaran karena memang tidak mau melihat dan mengakui hal itu. Dalam ilmu hukum yang *legalistis-positivistis*, hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi (dikurangi) menjadi suatu yang sederhana, *linear, mekanistik, deterministik*, terutama untuk kepentingan profesional. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum yang demikian yang masih dominan, yang termasuk kategori *legismenya* Schuyt. Oleh karena legisme melihat dunia hukum dari teleskop Undang-undang belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi, Kebiasaan yang dominan adalah melihat dan memahami hukum

sebagai suatu yang rasional logis, penuh dengan kerapihan dan keteraturam rasional.

Tentunya uraian di atas, memperlihatkan bahwa pendidikan hukum Indonesia belum menunjukkan keberhasilan yang diharapkan. Pendidikan hukum ini hanya mengandalkan nilai-nilai IQ (*Intelegent Quotient*), atau yang saya sebut dengan kecerdasan yang direncanakan, yang hanya berdasarkan pada nilai-nilai akademik saja, sangat jauh sekali Pendidikan hukum Indonesia dengan kecerdasan EQ (*emotional quotient*), padahal EQ ini mengajarkan tentang *integritas*, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, kebijaksanaan, keadilan, prinsip kepercayaan. Padahal justru hal inilah yang terpenting dalam pendidikan kita (Ary Ginanjar Agustian. *Emotional spiritual quotient*. 2003:xliii) apalagi dengan kecerdasan SQ (*spiritual qoutient*) sangat jauh sekali pendidikan hukum ini.

Dari penggunaan paradigma *positivistik* itulah, yang lebih menekankan kepada *Intelegent quotient* atau IQ. Sering pendidikan hukum ini mendapatkan kritikan yang pedas dari berbagai kalangan masyarakat, karena ada kecenderungan nilai-nilai yang diterapkan dalam pengajaran hukum, sering mereduksi problematika sosial menjadi sederetan sengketa antara individu-individu anonim yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya, jadi si individu bagaikan sesuatu yang sama sekali tidak berciri manusiawi, tanpa nama, tercabut dari konteksnya dan universal. Perkara-perkarapun dibaca bagaikan fakta-fakta belaka yang penyelesaiannya semata-mata dilandaskan pada *teknikalitas* hukum, dan bukan pada moralitasnya, yakni pada benar atau salahnya. Adapun dari pertanyaan, apakah masalah tersebut mempunyai kausal ataupun konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas bagi masyarakat? Pertanyaan ini bisanya bagi mereka tidak terlalu penting untuk dijawab. Dalam pendidikan hukum kita, secara sederhana menurut Erlyn Indarti (Erlyn Indarti. *Quo Vadis Pendidikan Hukum: suatu Renunga Bagi Paradigma "Baru" Hukum*. 2000: 20) penyelesaian suatu kasus yang diajarkan dalam pengajaran hukum., dapat dipandang sebagai *formula matematika*, maka para pihak tidak lebih dianggap sebagai bilangan '1', '2', '3'. Dan rumusnya untuk menyelesaikan hal ini sudah tersedia. (misalnya: X Y Z) Tugas para pengajar dalam hal ini, pertama-tama adalah dengan keterampilan teknis yang tinggi menggabungkan serpihan demi serpihan, potongan demi potongan bagian tekaki-teki



tersebut. Akan tetapi ini dilakukan tanpa harus menangkap keseluruhan gambar komposit dari hukum. Kita dapat lihat praktek hukum, misalnya seorang pengacara, dalam membuat surat Kuasa ia hanya memasukan siapa namanya, apa kasusnya, bagaimana hukumnya, yang sudah disediakan rumusnya terlebih dahulu.

Yang itulah kecerdasan silogisme, yakni kecerdasan yang selalu direncanakan oleh Instansi pendidikan, oleh tuntutan praktek, oleh kepentingan yang tidak memihak kepada rasa keadilan, jika di muka telah saya katakan bahwa "*.....dan ternyata Undang-undang itu menyimpan tabir kejahatan*", maka inilah sesungguhnya kecerdasan yang direncanakan untuk berbagai maksud, yang tentunya tidak diharapkan bagi sebagian masyarakat. yang saya maksudkan adalah, sebuah kecerdasan yang hanya menindas kaum lemah.

### **Dialektika Kecerdasan HUKUM: Pencapaian ke arah Spritual.**

Benarkan ini, sebuah dialektika ? kita tahu dalam pendidikan yang lebih mengandalkan IQ, yang berpandangan dengan paham *positivistik* dalam hukum, ini akan menambah permasalahan keterpurukan hukum di negara kita. **Acmad Ali.** (**Acmad Ali. Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya.**2002 : 30-31) Mengatakan dalam hal ini, bahwa menurutnya kendala utama untuk membebaskan bangsa ini dari keterpurukan hukum justru terletak pada *legal thought* (Pemikiran hukum) yang masih teramat *legalistik-positivistik* yang dianut oleh sebagian besar kalangan hukum kita. Akibatnya, ilmu hukum yang dipelajari dan yang hendak dijadikan andalan untuk menemukan solusi terhadap keterpurukan hukum tersebut, hayalah ilmu hukum positif yang sangat sempit, sehingga mustahil melahirkan solusi terhadap situasi yang teramat serius tersebut. Lihat:

Tentunya secara psikologis, kemauan berpikir yang diajarkan dalam pendidikan hukum hanyalah sebatas pada corak berpikir dengan menggunakan otak kiri. Ukuran dari pendidikan seperti itu adalah: Ukuran kecerdasan nilai matematika dan bahasa, Kunci kesuksesan adalah nilai-nilai IQ (*Intelligence Quotient*) seperti nilai rapor, atau IPK, dan Oreintasi pada pemecahan masalah (**Taufik Pasiak. Revolusi IQ/EQ/SQ (Antara Neurosains dan Alquran).** 2004: 120) selain itu juga dengan penggunaan paradigma *positivistik* dalam pendidikan hukum, maka dengan demikian dalam modernisme ilmu-

ilmu positif-empiris mau tak mau menjadi standar yang paling tinggi dalam pendidikan hukum, IQ lah diterapkan pada mahasiswanya. Akibat dari penggunaan semacam itu, nilai-nilai moral dan religius (SQ) kehilangan wibawanya, maka hasilnya timbullah disorientasi moral-religiuis, yang pada gilirannya mengakibatkan pula meningkatkan kekerasan, keterasingan, depresi mental, dan penyimpangan (Bambang Sugiharto. *Postmodernisme Tantangan Bagi filsafat*. 1996:29-30), Di gunakannya konsep SQ (*Spiritual quotient*), karena dengan menggunakan kecerdasan ini, menurut Danah Zohar & Ian Marsal, (*SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berpikir Integralistik dan holistik Untuk Memaknai Kehidupan.*, 2000), lebih menekankan terhadap persolan makna atau *Value*, yakni kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan dan jalan hidup seseorang akan lebih bermakna dibandingkan dengan yang lainnya. SQ adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi kita

Danah Zohar & Ian Marshal. (*Ibid*) Selanjutnya Zohar mengatakan: SQ itu berbeda dengan beragama, pada SQ secara harpiah beroperasi dari pusat otak, yaitu dari fungsi-fungsi penyatu otak. SQ mengintegrasikan semua kecerdasan kita, SQ Benar-benar menjadikan kita makhluk yang utuh secara intelektual, emosional, serta spiritual. Kemudian dalam pendidikan kita, di Indonesia dipadukan dengan ESQ. Walaupun pada dasarnya Zohar mengatakan, SQ itu bukan beragama, karena kita menyakini bahwa yang menciptakan kecerdasan itu adalah Allah, maka terhadap setiap kegiatan harus kita maknai dengan ibadah.

Kemudian alasan tersebut, penulis perkuat dengan. bahwa pendidikan kita (khususnya pendidikan hukum) masih belum berhasil menciptakan sumber daya manusia yang andal apalagi dalam menciptakan kualitas bangsa. Krisis multidimensi yang berkepanjangan ini, diyakini oleh banyak kalangan, dari akibat gagalnya sistem pendidikan di Indonesia. Begitu juga, merosotnya indeks Pembangunan Manusia, atau "*Human Development*". Indonesia tidak lepas dari rendahnya kualitas pendidikan. Mungkin kritikan pertama yang diterbitkan dalam bentuk buku, tentang kualitas pendidikan kita. Telah berhasil di suarkan oleh Eko Prasetyo dalam



**Bagian Sepuluh:**  
**Perluakah Mengganti Logika Deduktif Dalam Hukum?**  
**(Uraian Akhir Untuk Mencapai Tujuan Awal)**

Dan yakub berkata:  
hai anak-anaku janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu  
gerbang,  
dan masuklah dari pintu gerbang yang berlainan”  
(Yusuf: 67)

Di awal telah telah dijelaskan bahwa pengaruh yang cukup penting dari logika *Descartes* terhadap hukum, adalah daya jangkauan hukum terhadap aspek daya guna hukum hanya kepada dunia profesional yang sehari-hari mempraktekan hukum. di mana terjadi, bahwa ahli hukum hanya menmpergunakan bentuk-bentuk silogisme. Ketika terjadi reduksi bahwa ilmu hukum hanyalah ilmu yang mempelajari Undang-Undang semata, maka yang lebih dominan pada akhirnya adalah bagaimana hukum mewujud dalam kehidupan profesional hukum (hakim, jaksa, pengacara). Lembaga-lembaga seperti pengadilan dan legislatif menjadi pusat kegiatan praktek hukum, dengan demikian ilmu-ilmu teoretis dipandang tidak memiliki daya guna dalam masyarakat. Masyarakat digiring kepada sikap untuk selalu mengamini bahwa realitas profesi hukum adalah realitas sesungguhnya dari hukum. Gagasan ini sangat menonjol dari pemikir seperti **Hans Kelsen** misalnya, yang mengedepankan peran sentral dari pejabat-pejabat resmi khususnya pejabat peradilan sebagai fokus utama kegiatan hukum. Akibat dari penggunaan logika deduktif, maka persoalan yang menyangkut aspek-aspek lain yang lebih dalam cenderung tidak tersentuh. Hukum telah gagal memberikan penjelasan yang memadai mengenai realitas yang terjadi sesungguhnya. Kehidupan praktek hukum dipenuhi dan sangat ditentukan oleh oleh logika aturan. Titik terjauh yang dapat dicapai oleh logika aturan itu pada akhirnya hanyalah kepastian hukum. Praktek hukum yang berorientasi pada hukum tertulis (modern) dan juga sistem hukum yang mengedepankan *karakteristik* modern tersebut, selanjutnya menjadi tiang penyangga utama dari proses kegiatan praktek hukum. Pandangan paling ekstreem adalah pandangan yang melihat bahwa hanya yang formal yang memiliki kekuatan untuk disebut hukum.



Kegiatan atau praktek hukum yang sekarang ini harus diakui lebih kepada kegiatan yang berbau formalisme, bahwa proses administrasi lebih dipentingkan dalam upaya penyelesaian perkara, daripada memberikan keadilan. Dengan kerangka acuan koherensi logika tersebut, maka secara otomatis para pengemban hukum praktis, akan mengabaikan kerangka acuan keadilan, jadi prinsip keadilan yang menjadi tujuan dari hukum itu berada setelah suksesnya penalaran hukum, adil tidak adil sebuah putusan, tapi kalau sang hakim memutuskan sesuai dengan prosedur maka itu harus diterima sebagai sebuah keadilan. Perhatikanlah, ungkapan di bawah ini (Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*, 2003: 67)

“Bagaimanapun adilnya suatu putusan hukum, tetapi kalau sang hakim tidak bekerja sesuai dengan prosedur maka putusan yang bagus dan adil itu rawan terhadap gugatan. orang bilang, putusan hakim mengandung cacat hukum. sebaliknya, bagaimanapun “tidak adilnya” suatu putusan, tetapi apabila proses yang ditempuh sudah betul, maka status putusan tersebut lebih aman daripada “putusan yang adil tetapi cacat prosedur”.

Bila kita renungkan dari ungkapan di atas, maka telah memberi gambaran terhadap kita, bahwa pengemban hukum praktis, itu terjebak pada “*Proseduralisme*”, maka dapat dikatakan hukum di indonesia baik secara materil maupun secara formal, terlalu berpihak pada positivisme (*Discourse*), dan hukum Indonesia menambah Virus Positivisme. Gambaran ini, adalah sebuah logika yang mati, sebuah logika yang sudah tua namun masih dipakai dalam praktek hukum. Benarkah demikian? kita lihat dalam praktek penegakan hukum, selalu saja ada penggunaan kekerasan dari aparat penegak hukum, ini jelas membuatkn hati dan pikiran mereka, karena tujuan mereka adalah efektivitas hukum, bagaimanapun caranya asal hukum dapat diterapkan, buta hati yang saya maksudkan adalah tertutupnya hati, karena tidak pernah digunakan dan diasah. Menghidupkan hati dalam undang-undang dapat dilakukan dengan melihat pengalaman, hal ini sesuai dengan diktum Holmesian yang terkenal yaitu, *The life of the law has no been logic, but experience*. Dalam pengadilan (misalnya), seorangan hakim seharusnya tidak hanya menafsirkan undang-undang berdasarkan kepada pameo “*rules and logic*” semata yang lebih mengagung-agungkan nalar semata, namun harus juga dipadukan

dengan "nurani", artinya seorang hakim tidak lagi menjadi mesin atau robot undang-undang yang kaku. Prof. Roeslan Saleh (alm) menyatakan "membuat putusan hukum merupakan pergulatan kemanusiaan". Jadi hakim dituntut secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan Undang-undang. Seorang pengadil yang benar akan menggunakan "nuraninya" terlebih dulu baru kemudian "nalarinya" untuk menafsirkan aturan-aturan dalam hukum positif, cara itu dapat membantu membebaskan diri dari kungkungan dan belenggu undang-undang. Dengan memadukan nurani dan nalar, peradilan yang sudah bersifat menjadi mesin (mekanistik dan teknologis) akan dapat dijinakan. Aturan akan menjadi teks yang hidup, dengan kata lain aturan akan memiliki "roh" yang siap mengisi sudut-sudut peradilan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak terjadi pengebirian undang-undang dari kandungan moralnya. Konsep-konsep pemilahan dan pemisahan, pola pikir 'hitam-putih', dalam logika mekanis tidak lagi akan mendapat tempat dalam sistem peradilan. Semua ini, mengisyaratkan kepada kita bahwa perlu adanya penggantian dari logika Deduksi (analitik) ke logika Induksi (sintetik), logika yang dimaksudkan adalah logika yang secara aplikasi memiliki lebih makna. Inilah salah satu cara kreatif ditengah-tengah keterpurukan hukum Indonesia, cara ini bukan satu-satunya cara, namun gagasan ini patut dipertimbangkan oleh berbagai pihak.. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah boleh logika sintetik ini kita pakai? jelas boleh, karena Deduksi bukan satu-satunya cara dalam hukum, pemikiran ini penulis ambil dari Al-Qur'an Surat Yusuf: 67, yang berbunyi:

"Dan yakub berkata: hai anak-anaku janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu gerbang yang berlainan"

Inilah suatu momentum awal bagi kita (hamba hukum) untuk memperbaiki logika yang terpaku rapih, saatnya kita bogkar, kita dekonstruksi, menjadi logika berada di depan untuk mengarahkan kita kepada jalan yang sesungguhnya dapat mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Penggunaan logika ini, dapat kita bandingkan dengan strategi berperang tanpa pedang (Yagyu Munenori. *The Life-Giving Sword*. 2007: 31), tanpa pedang atau tanpa logika, bukan berarti mengambil logika lain, yang sudah kalah dengan realitas, tapi menggunakan

logika yang dimiliki dari kekayaan alam semesta ini , jadi artinya inilah saatnya mempertunjukkan logika sintetik.  
.....Semoga.....



## Daftar Pustaka

- Ahmad Tafsir.** *Filsafat Umum: Akal dan hati Sejak Thales sampai Capra*. PT Remaja Rosda Karya: Bandung, 2001.
- Alex Lanur.** *Logika: Selayang Pandang*. Kanisius: Yogyakarta, 1983.
- Alex Sobur.** *Semiotika Komunikasi*. Remadja Rosda Karya: Bandung, 2003.
- Ali Harb.** *Relativitas Kebenaran*. IRCiSoD: Jogyakarta, 2001.
- Anonim.** *Filsafat Ilmu*. Universitas Terbuka: Jakarta, 1985.
- Ary Ginandjar Agustian.** *ESQ: Emotional Spiritual Quotionent*. Arga: Jakarta, 2003
- ESQ Power: Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan*. Arga: Jakarta, 2007
- Betrand Russel.** *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan kondisi Sosio-Politik zaman kuno hingga sekarang*, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2004.
- Beerling.** *Pengantar Filsafat Ilmu*. PT. Tiara Wacana: Yogyakarta, 2003.
- Bernard Arief Sidharta.** *Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*. Pusat Kajian Humaniora. Universitas Katolik Parahyangan: Bandung, 2005.
- Burhanuddin.** *Logika Materiil: Filsafat Ilmu Pengetahuan*. PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1997.
- Cecep Sumarna.** *Filsafat Ilmu: dari Hakikat Menuju Nilai*. Pustaka Bani Quraisy: Bandung, 2006.
- C.A.Van Peursen.** *Orientasi Di Alam Filsafat*. PT Gramedia: Jakarta, 1983.
- Christopher Norris.** *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2006.
- Daniel Goleman.** *Emotional Intelligence, Kecerdasan Emosional, mengapa EI lebih penting daripada IQ*, PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta 1996.

**Danah Zohar & Ian Marshall**, *SQ - Spiritual intelligence-The Ultimate Intelligence*, Mizan: Bandung, 2002.

**D. H. M. Meuwissen**. *Pengembangan Hukum*. (Terjemahan B. Arief Sidharta). Dalam PRO JUSTITIA Tahun XII Nomor 1 Januari, 1994.

**Donny Gahral Adian**, *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif*, Jalasutra, Yogyakarta, 2006.

-----*Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan, dari David Hume sampai Thomas Kuhn*, Teraju, Jakarta, 2002.

**Dragan Milovanovic**, *A Primery in the Sociological Of Law*, Harrow and Heston Publishers, New York, 1994.

**E. Sumaryono**. *Dasar-dasar Logika*. Kanisius: Yogyakarta, 1999.

-----*Hermeneutik; Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999

**Edmund Leach**, *Dasar-Dasar Teori Strukturalis*, dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987,

**Esmi Warrasih**, *Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis*, Editor Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR, PT Suryadaru utama, Semarang, 2005

**Esmi Warrasih**, *Sosiologi Hukum Kontempelatif*, Makalah yang disampaikan pada Temu Kerja pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum. Fakultas Hukum se-Jawa Timur, Kerjasama FH UNIBRAW dan HUMA Jakarta, Malang, 22-23, Feruari, 2006

**F. Budi Hardiman**; *Filsafat Modern: Dari Machiaveli sampai Nietzsche*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007

-----*kritik Ideologi; Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta, Kanisius, 1990.

- , *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Kanisius Jakarta, 2003.
- , *Derrida Mengurai Hukum dan Keadilan*, Kalam 19, Jurnal Kebudayaan, 2002.
- Francis Fukuyama.** *The Great Disruption: hakikat Manusia Dan Rekonstruksi Tataanan Sosial*. Qalam Yogyakarta, 2002.
- Fritjof Capra,** *The Tao of Physchis*, (Terjemahan). Jalasutra: Yogyakarta, 2003.
- , *Titik Balik Peradaban; Sain, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan* (terjemahan dari *Turning Point; Science, Society and The Rising Culture*), Jejak: Jakarta, 2007.
- , *The Hidden Conection: Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*. Jalasutra: Yogyakarta, 2005.
- Gayatri Chakravorty Spivak,** *Membaca Penikiran Jacques Derrida*, Sebuah Pengantar, Ar- Ruzz, Jogyakarta, 2003.
- Hans Kelsen.** *Essays in Legal and Moral Philosophy*. (Terjemahan: B. Arief Sidharta. *Hukum dan Logika*). Alumni: Bandung, 2006.
- Hans Georg Gadamer,** *Keberaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, diterjemahkan dari judul asli "*Truth and Method*, The Seabury Press, New York, 1975. oleh Ahmad Sahidah, Pustaka Pelajar, Jogyakarta. 2004
- Hasbullah M Bakry.** *Sistematika Filsafat*. Widjaja: Jakarta, 1981.
- Hammersma,** *Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern*, Gramedia, Jakarta, 1983,
- H. Ph. Visser't Hooft.** *Filsafat Ilmu Hukum*. (Terjemahan B. Arief Sidharta). Penerbit Tidak Berkala. No 3, Laboratorium Hukum. FH-UNPAR: Bandung, 2002.
- Husain Heryanto,** *Paradigma Holistik; Dialog Filsafat, Sains dan kehidupan menurut Shadra dan Whitehead*, Teraju, Jakarta, 2003.



- Ian McLeod.** *Legal Method*. Second Edition: London: Macmillan Ian Press Ltd, 1996
- B Saenong,** dalam Bukunya *Hermeneutika Pembebasan; metodologi Tafsir Al-Qur'an menurut Hassan Hanafi*, Teraju, Jakarta, 2002
- Jacques Maritain.** *Formal logic*. Sheeds & Ward: New York, 1937
- JA Pontier,** *Penemuan Hukum; Rechtsvinding*, Diterjemahkan oleh Arief Sidharta; Lab Hukum, UNPAR, Bandung. 2001.
- Jack Reynold,** *Habitualy and Undecidability: A Comparison of Merleau-Ponty and Derrida on The Decision*, International Journal of Philosophical Studies, Vol. 10
- Jan Hendrik Rapar.** *Pengantar Logika: Asas-asas Penalaran Sistematis*. Kanisius: Yogyakarta 1996.
- Jostein Gardner,** *Dunia Sophie: Sebuah Novel Filsafat*, Mizan Bandung, 2004.
- John Fiske,** *Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, Jalasutra, Tanpa Tahun Penerbitan.
- John Horgan,** *The End Of Science, Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific*: Senjakala Ilmu Pengetahuan. Mizan: Bandung, 2005.
- John Lechte,** *Limapuluh Filsuf Kontemporer, Dari Strukturalisme sampai Postmodernisme*, Kanisius, Jakarta, 2001.
- Johnny Ibrahim.** *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia: Jawa Timur, 2006.
- Jujun S Suriasumantri.** *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*. Sinar Harapan: Jakarta, 1982.
- , *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik; Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan dewasa ini*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- J. Sudarminta,** *Filsafat Proses: Sebuah Pengantar Sistematis Filsafat Alfred North Whitehead*, Pustaka Filsafat, Kanisius, Jakarta, 1991.

- J.W. Haris.** *Law and Legal Science an Enquiry into The Concept Legal Rule and Legal System.* Oxford: Clarendon Press, 1982.
- K. Bertens,** *Filsafat Barat Abad XX, Inggris – Jerman,* Jakakrta, Gramedia, 1983.
- Filsafat Barat Kontemporer: Inggris dan Jerman,* PT Gramedia Pustaka Jakarta Utama, Jakarta, 2002.
- Kaelan,** *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat: Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni,* Paradigma Yogyakarta, 2005,
- Lois Ma'luf.** *Kamus Munjid.* Beirut: Daar al-Fikr, 1973.
- L.B. Curzon.** *Jurisprudence.* Cavendish: Publisihng Limited, 1995
- Lili Rasyidi & IB Wyasa Putera,** *Hukum sebagai Suatu Sistem,* Mandar Maju,Bandung, 2003.
- Lorens Bagus.** *Kamus Filsafat.* PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1996.
- Mundiri.** *Logika.* PT. RajaGrafindo Persada: Yogyakarta, 2006.
- M. J. Langeveled.** *Menuju ke Arah Pemikiran Filsafat.* PT Gramedia: Jakarta, 1959.
- Muhammad Al-Fayyadl,** *Derrida,* LkiS, Jogyakarta, 2005.
- Mudlor Achmad.** *Ilmu & Keinginan Tahu: Epistemologi dalam Filsafat.* Trigenda Karya: Bandung, 1994.
- M. Somers.** *Logika.* PT. Alumni: Bandung, 1992.
- Nafisul Atho & Arif Fahrudin** (editor), *Hermeneutika Transendental; Dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic Studies,* IRCiSoD Yogyakarta, 2003.
- Otje Salman & Anthon F. Susanto,** *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali,* Refika, Bandung, 2004.

- G. Soekadijo.** *Logika Dasar: Tradisional, Simbolik, & Induktif.* PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1999.
- edjawijatna.** *Logika: Filsafat Berpikir.* PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2002.
- ilipus Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati,** *Argumentasi Hukum,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- iggero J. Aldisert.** *Logic for Lawyers: A Guide to Clear Legal Thinking.* Clark Boardman Company, Ltd. New York, 1989.
- idarta,** *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks ke Indonesiaan,* Utomo, Bandung, 2006.
- idarta,** *Misnomer dalam Nomenklatur Posivisme Hukum,* Jurnal, Era Hukum, No. 2/ TH. 11/Januari 2004.
- standyo Wignjosoebroto,** *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,* ELSAM – HUMA, Jakarta, 2002.
- ven J. Burton.** *An Introduction To Law and Legal Reasoning.* Aspen Law & Business, 1995.
- larto.** *Metodologi Penelitian Filsafat.* PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2002.
- i Gazalba.** *Sistematika Filsafat.* Bulan Bintang; Jakarta, 1973.
- larto,** *Metodologi Penelitian Filsafat,* RajaGrafindo, Jakarta, 2002.
- ya Praksh Sinha.** *Jurisfrudence: Legal Philosophy in a Nutsheel.* West Publishing. St. Paul Minn, 1993.
- yu Munenori.** *The Live-Giving Sword.* PT. Gramedia: Jakarta, 2007.
- raf Amir Piliang,** *Hipерsemiotika, Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna,* Jalasutra, Yogyakarta, 2003.
- Pos-Realitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Post Metafisika,* Jalasutra, Yogyakarta, 2004.



-----*Sebuah Dunia yang Menakutkan, Mesin-Mesin Kekerasan dalam Jagat Raya Chaos*, Mizan, Bandung, 2001.

----- *Sebuah Jagat Raya Maya; Imperialisme Fantasi dan Matinya Realitas*, Kata pengantar dalam bukunya Mark Slouka, *Ruang yang Hilang ; Pandangan Humanis tentang Budaya Cyberspace yang Merisaukan*, Mizan, Bandung, 1999.



**DR. H. Muhamad Rakhmat., SH., MH.**

Lahir di Bandung 54 Tahun yang lalu aktif didunia Birokrat selama 29 tahun. pada tahun 2013 beralih Profesi menjadi tenaga pengajar (Dosen) di Universitas Majalengka juga aktif sebagai penulis diberbagai media cetak dan majalah buku/karya ilmiah yang telah diterbitkan antara lain : Hukum Administrasi Negara, Logika, Etika Profesi, Dimensi Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan daerah, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi dan Filsafat Hukum



**UNIT PENERBITAN UNIVERSITAS MAJALENGKA**  
**Jln. K.H. Abdul Halim No.103 - Majalengka Tlpn. (0233) 281 498**